DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA



Muhammad Husni Thamrin

Anhar Gonggong

MILIK DEPBUDPAR
TIDAK DIPERDAGANGKAN

MUHAMMAD HUSNI THAMRIN

Oleh :
Mardanas Safwan

DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DIREKTORAT JENDERAL SEJARAH DAN PURBAKALA
DIREKTORAT NILAI SEJARAH
2007

PENGANTAR

Pahlawan adalah seseorang yang pada masa hidupnya, karena terdorong oleh rasa cinta tanah air, rela berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Mereka telah berjasa dengan memimpin suatu kegiatan yang teratur untuk menentang penjajahan, melawan musuh dengan berjuang di medan perang maupun melalui bidang politik, ketatanegaraan, sosial-ekonomi, kebudayaan atau ilmu pengetahuan untuk kemajuan Indonesia.

Semangat cinta tanah air dari para pahlawan tersebut, wajib kita tanamkan dalam diri generasi muda Indonesia, agar mereka dapat mengetahui dan memahami bahwa **Negara Kesatuan Republik Indonesia** dibentuk melalui perjuangan panjang para pahlawannya. Untuk itu perlu dibuat biografi dari para pahlawan tersebut.

Penulisan biografi tokoh kesejarahan perlu kita tingkatkan untuk memperkaya pengetahuan dan memelihara peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan, kebanggaan serta meningkatkan semangat patriotisme.

Tujuan utama dari penulisan biografi pahlawan ini untuk membina kesatuan dan persatuan bangsa, membangkitkan kebanggaan nasional, mengungkapkan nilai – nilai budaya bangsa dan melestarikan jiwa dan semangat kepahlawanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping itu penulisan biografi pahlawan bertujuan untuk mengungkapkan kisah kehidupan para pahlawan agar menjadi suri tauladan bagi generasi penerus dan masyarakat pada umumnya.

Penulisan biografi pahlawan maupun tokoh sejarah itu sendiri merupakan kegiatan untuk memelihara kenangan tentang pahlawan nasional sekaligus juga bermakna sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan minat pada sejarah bangsa dan tanah air.

Buku ini merupakan hasil cetak ulang dari cetakan kedua yang diterbitkan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional tahun 1984 / 1985, setelah diadakan perbaikan sistematika dan redaksional.

Selamat membaca dan semoga buku ini bermanfaat bagi para pencinta sejarah dan masyarakat pada umumnya.

Jakarta, November 2007
Direktur Nilai Sejarah

Dr. Magdalia Alfian
NIP 131408189

DAFTAR ISI

Halaman

PENGANTAR .....

DAFTAR ISI .....

Bab I	:	Pendahuluan	1
Bab II	:	Harapan Seorang Ibu : Memikirkan Kehidup-an Bersama	6
Bab III	:	Pergerakan Nasional	13
Bab IV	:	Dari Tokoh Rakyat Betawi ke Tokoh Rakyat Indonesia	27
Bab V	:	Petikan-petikan Buah Pikiran	52
Bab VI	:	Penutup	164
FOTO	:	.....	171

BAB I PENDAHULUAN

Berhasilnya bangsa Indonesia membentuk dirinya kembali sebagai bangsa yang satu dengan mendiami sebuah negara yang disebut Indonesia, melalui bentuk perjuangan yang berliku-liku. Awal perjuangan yang lebih teratur ketika fajar matahari abad ke-20 telah muncul, yaitu ketika Budi Oetomo telah dilahirkan oleh sekelornpok orang terpelajar sebagai wadah perjuangan mereka pada tanggal 20 Mei 1908. Tiga puluh tujuh tahun kemudian, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, cita-cita untuk mewujudkan sebuah bangsa Indonesia yang satu dan merdeka berhasil dengan diproklamasikannya Negara Republik Indonesia sebagai negara merdeka di tengah-tengah bangsa dan negara lainnya di muka bumi ini.

Untuk mewujudkan sebuah negara yang merdeka ditempuh melalui perjuangan politik dan pergerakan nasional yang kemudian disusul oleh suatu perjuangan fisik. Pergerakan nasional telah berlangsung sejak tahun 1908 sampai pada tahun 1945 dan perjuangan fisik rnelalui pertempuran-pertempuran dahsyat telah berlangsung dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1949.

Di dalam kedua periode itu telah muncul sekian banyak pemimpin bangsa berkaliber nasional yang patut mendapat penghargaan tinggi atas jasa – jasanya. Diantara para pemimpin – pemimpin yang muncul pada zaman pergerakan nasional, mereka dapat melanjutkan perjuangannya di dalam masa

perjuangan fisik. Bahkan diantara mereka muncul sebagai pemimpin utama didalam periode perjuangan fisik dan sesudahnya. Pemimpin – pemimpin itu misalnya Sukarno, Hatta, Syahrir, Ali Sastroamijoyo, Sunario, Ahmad Subarjo dan banyak lagi yang di sini tidak disebut namanya. Di samping itu terdapat juga pemimpin pergerakan nasional yang oleh karena sesuatu hal telah meninggal sebelum proklamasi kemerdekaan dan tidak dapat mengikuti perjuangan tahap berikutnya. Yang demikian ini pun tidak sedikit jumlahnya dan salah seorang di antara mereka ialah Muhammad Husni Thamrin.

Kalau kita melihat cara dan langkah-langkah perjuangan para pemimpin pergerakan nasional, maka kepada kita nampak dua hal yang menonjol, yaitu cara dan langkah yang bersifat non-koperasi dan yang koperasi. Artinya, di kalangan pemimpin pergerakan nasional kita terdapat golongan yang sama sekali tidak mau bekerjasama dengan penjajah Belanda. Sebagai konsekuensinya kelompok ini berjuang melalui partai-partai mereka dengan program aksi yang selalu bertentangan dengan kehendak penguasa penjajahan waktu itu. Di dalam kelompok ini tersebut serentetan nama seperti Sukarno, Hatta, Syahrir, Ali Sastroamijoyo dan lain-lain. Sedang yang koperasi merupakan kelompok yang tetap berjuang untuk kemerdekaan bangsanya, akan tetapi melalui bentuk "kerjasama" dengan pihak penjajah. Salah satu dari mereka telah bersedia duduk di dalam lembaga "legislatif" ciptaan penjajah Belanda, yaitu yang dikenal dengan Dewan Rakyat atau *Volksraad.* Di antara pemimpin-pemimpin terkemuka dari kelompok ini antara lain ialah Dr. Sutomo, Sutarjo dan Husni Thamrin.

Di samping kedua kelompok itu, sebenarnya terdapat juga pemimpin pergerakan yang pada satu ketika bersikap non-koperasi, akan tetapi di lain saat juga mereka bersikap koperasi.

Tokoh ini antara lain ialah HOS Cokroaminoto, Haji Agus Salim. Muhammad Yamin dan lain-lain.

Pada kesempatan ini penulis akan mencoba menguraikan secara singkat, liku – liku perjuangan seorang pemimpin

pergerakan nasional dari kelompok yang bersikap koperasi, yaitu Muhammad Husni Thamrin. Tokoh ini adalah salah seorang pemimpin pergerakan nasional yang cukup "unik" kedudukannya di dalam perjuangan kemerdekaan bangsanya. Salah satu keunikannya ialah bahwa dia seeara sadar telah menempuh jalan koperasi sebagai langkah untuk meneapai suatu Bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka. Keunikan lainnya ialah bahwa sebagai seorang koperator, dia adalah seorang yang mempunyai pendirian yang "sangat maju" sehingga dapat bergaul dengan kaum nasionalis "kiri" dengan mudah.[1])

Keunikan-keunikan inilah yang antara lain menarik penulis untuk menelusuri liku-liku perjuangannya. Karena "besar atau kecil", jasa Muhammad Husni Thamrin telah nampak seeara jelas di dalam jalur-jalur sejarah bangsanya.

Di dalam menuliskan liku-liku perjuangan seseorang pemimpin tentu akan dijumpai pelbagai kesulitan, tidak saja disebabkan oleh karena tersedia bahan yang tidak memadai, akan tetapi juga disebabkan oleh pikiran-pikiran subyektif dari penulis. Oleh karena itu nilai tulisannya akan ditentukan oleh kemampuannya untuk berusaha sedapat mungkin; dan ini pekerjaan yang tidak mudah, "menekan" fikiran-fikiran subyektifnya tersebut guna mendekati sedekat mungkin nilai obyektifitas.

Sehubungan dengan penulisan riwayat Husni Thamrin ini, penulis ingin menyatakan bahwa tulisan yang dikerjakan ini bukanlah tulisan yang pertama kalinya. Beberapa tahun yang lalu telah ada penulis yang ditulis yang menguraikan riwayat hidupnya. Dapat disebutkan misalnya *Riwayat Penghidupan dan Perdjuangan Mohd. Husni Thamrin* karya Matu Mona yang ditulis pada tahun 1950. Selanjutnya, ketika ia masih hidup dan sedang muncul sebagai seorang politikus "terkemuka", harian *Pemandangan* telah membuat suatu uraian singkat tentang dirinya. Ini dilakukan pada tahun 1933.[2]) Sukamto SA juga telah menulis riwayat hidupnya dengan judul: *Matahari Jakarta Lukisan Kehidupan M. Husni Thamrin;* diterbitkan pada tahun 1937 oleh Pustaka Jaya.

Kesemua tulisan tersebut di atas telah menjadi bahan-bahan yang sangat berguna di dalam penulisan riwayat hidup yang kami lakukan ini.

Guna mendapatkan uraian yang agak teratur, maka penulis membagi tulisan ini dalam beberapa bab yaitu: Bab I: Pendahuluan dengan isi sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Bab II: Lingkungan Keluarga dan Pendidikan; bab ini memberikan uraian tentang lingkungan keluarga dan pendidikan Muhammad Husni Thamrin. Bab III: Selintas Tentang Pergerakan Nasional Indonesia; bab ini berisi uraian singkat tentang muncul dan berkembangnya pergerakan kebangsaan di wilayah Hindia Belanda waktu itu. Hal-hal yang melatar belakanginya, sikap-sikap mereka didalam mengha-dapi penjajahan Belanda, demikian pula sikap penjajah Belanda terhadap kaum pergerakan itu. Bab IV: Munculnya Seorang Pemimpin Pergerakan: Dari Kaum Betawi ke Parindra; di dalam bab ini akan digambarkan kemunculan Muhammad Husni Thamrin sebagai salah seorang pemimpin di dalam kalangan pergerakan nasional waktu itu. Sikap dan langkah-langkahnya akan menjadi fokus utama di dalam bab ini. Selanjutnya, sebagai seorang pemimpin, tentulah ia telah melontarkan sekian banyak ide, buah pikiran yang menjadi tumpuan dirinya untuk muncul sebagai seorang pemimpin pergerakan yang terkemuka. Karena itu diperlukan suatu bab khusus untuk memperoleh gambaran tentang ide-ide atau buah-buah pikirannya itu. Hal itu akan diberikan di dalam Bab V dengan judul: Kutipan-kutipan Buah Pikiran. Tulisan ini akan diakhiri oleh sebuah bab penutup, yaitu Bab VI. Pada bab ini akan diberikan rangkuman isi, kesimpulan dari semua uraian yang telah diberikan pada bab-bab terdahulu.

DAFTAR CATATAN BAB I

1) Ali Sastroamidjojo, *Tonggak-Tonggak Di Perjalananku,* BT. Kinta, Jakarta, 1974, hal. 101.

2) Lihat harian *Pemandangan,* Tahoen ke I, Nomor 17, 29 Juli, 1933.

BAB II HARAPAN SEORANG IBU: MEMIKIRKAN KEHIDUPAN BERSAMA [1])

Di dalam pidato pengangkatannya sebagai anggota *Gemeenteraad* Batavia yang dilakukan di depan sidang istimewa yang berlangsung pada 27 Oktober 1919, Muhammad Husni Thamrin antara lain berkata:

> "Tetapi saya pun minta izin supaya kepada sidang ini untuk menceritakan apa yang diharapkan oleh ibu saya almarhumah yang sederhana. Beliau mengharapkan saya menjadi orang pandai agar dapat memikirkan kehidupan bersama di sekeliling saya".

Tentulah harapan itu bukanlah sebuah harapan yang muluk. Bukankah setiap ibu, setiap orang tua selalu mengharapkan agar anak keturunannya menjadi orang baik-baik? Apalagi orang tua Muhammad Husni Thamrin adalah orang yang terpandang. Ayahnya seorang wedana; sebuah jabatan yang cukup tinggi di mata masyarakat pribumi waktu itu. Sebagaimana diketahui ayahnya adalah Tabri Thamrin yang menduduki jabatan wedana di sebuah kewedanaan di Batavia ketika itu. Wedana Tabri Thamrin adalah seorang berdarah Betawi asli. Muhammad Husni Thamrin dilahirkan oleh ibunya Nurkhamah pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 1894. Kelahirannya disambut dengan gembira oleh lingkungan keluarganya, apalagi oleh ibu dan ayahnya. Pada saat kelahirannya, ayahnya sedang berada di mesjid untuk menunaikan sembahyang Jum'at. Ketika dia kembali kerumahnya, Wedana Thamrin sangat gembira karena

dia sudah menjumpai seorang bayi diatas sebuah meja bundar, bayi itu sedang meronta-ronta, menjerit-jerit. Tindakan pertama yang dilakukannya di dalam menyambut kelahiran anaknya itu ialah menyerukan adzan di kedua telinga anak laki-lakinya itu.

Ketika bayi laki-laki Wedana Tabri ini lahir, dia digambarkan sebagai sangat besar. Dukun bayi yang membantu kelahirannya ketika menyambut kelahiran bayi itu berseru : "Wah, wah, wah besar sekali anak ini; apalagi kepalanya. Pantas ibunya hampir pingsan". "Di kalangan sementara orang, seorang bayi yang lahir dengan kepala yang besar mempunyai masa depan yang baik, karena dengan kepala besar anak itu digambarkan akan mempunyai kecerdasan yang tinggi. Dukun bayi itu, Nyak Iden, ketika akan meletakkan bayi itu ke tempatnya berseru lagi. "Mudah-mudahan jadi orang pangkat".

Harapan-harapan bagus telah menyambut kedatangannya ke tengah-tengah keluarganya.

Hari-hari pun berlalu dan Muhammad Husni Thamrin, yang juga dipanggil dengan nama Matseni tumbuh semakin besar menambah semarak keluarganya. Sebagaimana halnya anak-anak sebayanya, Muhammad Husni Thamrin pun mempunyai sifat-sifat nakal, bandel dan semacamnya. Dia mempunyai beberapa orang teman sebaya yang merupakan ternan sepermainan sehari-hari. Yang menarik dalam hal hubungan perkawanannya itu ialah bahwa di antara sekian banyak temannya itu, pada umumnya berasal dari rakyat biasa, orang-orang kecil. Mereka bukan anak-anak yang berasal dari kelas masyarakat *ambtenaar* sebagaimana dirinya. Kawan-kawannya itu bukanlah anak-anak wedana, anak-anak kepala kampung, bukan pula anak-anak pedagang besar atau yang semacamnya. Mereka justru adalah anak-anak penjual nasi atau anak-anak tukang gerobak dan atau penjual bunga untuk keperluan ziarah ke kuburan dan semacamnya.

Saatnya untuk memasuki sekolah pun tiba; ketika itu dia berusia enam tahun. Ketika akan memasuki bangku sekolah, di dalam dirinya terdapat juga rasa segan. Bahkan ketika suatu hari akan diantarkannya untuk memasuki sekolah untuk pertama

kalinya, Muhammad Husni Thamrin masih harus dicari. Pagi hari itu dia masih sempat pergi ke Sungai Ciliwung, bersama dengan kawan-kawan sebaya, untuk mandi bersama. Rasanya segan untuk pergi ke sekolah. Akan tetapi di balik itu, di dalam dirinya pun terdapat kesadaran bahwa hanya dengan bersekolahlah dia dapat mempunyai ilmu, dapat membaea, dapat menulis seperti ayahnya. Akhirnya pada hari itu dia pun diantar oleh ayahnya ke sebuah sekolah di Mangga Besar. Di sini dia menuntut pelajaran bersama dengan orang-orang Cina; lingkungan ini juga sedikit banyak memberikan keuntungan baginya di dalam bergaul dengan orang-orang yang tidak sebangsa dengannya. Akan tetapi di sekolah ini dia tidak begitu lama. Dua tahun kemudian dia dipindahkan ke *Bijbelschool* (Sekolah Injil) di Pintu Besi.

Seorang anak Betawi asli, yang ayah-ibunya tidak lepas dari ibadah sembahyang lima waktu memasuki sekolah orang "Serani"[2]); juga anaknya dididiknya melakukan secara baik ajaran-ajaran Islam. Anaknya diajari secara baik untuk membaca Al Qur'an. Bagi orang sekelilingnya, tindakan Wedana Tabri itu tentu dianggap aneh, lucu. Bahkan ketika itu anaknya, Muhammad Husni Thamrin, oleh ternan-ternan akrabnya telah mendapat panggilan baru: "anak Serani". Akan tetapi rupanya Wedana Tabri Thamrin sadar akan tindakannya ini. Bukankah mencari ilmu; bahkan sampai ke tanah Cina sekalipun, adalah merupakan pekerjaan yang dianggap mulia oleh agama Islam, agama yang dianut leluhurnya dan yang sekarang dianutnya pula dengan penuh keyakinan.

Selama menjalani pendidikan di sekolah ini sifat kanak-kanaknya juga terus berlangsung. Dia tetap berkawan dengan kawan – kawannya yang dulu, yang tidak dapat menjalani pendidikan sebagaimana yang dijalaninya sekarang ini. Mandi ke Sungai Ciliwung masih tetap dilakukannya. Akhirnya dia berhasil menyelesaikan pendidikannya pada tingkat ini. Ia kemudian melanjutkannya ke tingkat yang lebih tinggi, ke *Koning Willem III;* sekolah ini setingkat dengan HBS ketika itu. Akan tetapi pada tingkat ini dia tidak menyelesaikan pendidikannya itu. Dia berhenti untuk kemudian terjun ke dalam masyarakat, yang kelak

akan mengenalnya sebagai salah seorang pemimpin utamanya.

Berhenti dari sekolahnya sebelum tamat, agaknya dilakukannya secara sadar. Juga tindakannya itu bukanlah tindakan secara terpaksa oleh karena ketidakmampuannya. Ketika dia akan meninggalkan sekolahnya itu, dia pun melakukan pembicaraan yang dalam dengan ayahnya. Ayahnya rupanya dapat menerima kehendak anaknya untuk dengan segera terjun ke dalam masyarakat. Namun, keinginannya untuk melihat anaknya menjadi seorang *ambtenaar,* seorang yang mempunyai pangkat tinggi, adalah merupakan cita-citanya yang tetap dipegangnya. Sejalan dengan itu Wedana Tabri Thamrin berusaha, dan berhasil memasukkan anaknya menjadi magang (calon pegawai) di kantor Kepatihan Betawi. Kemudian pindah ke kantor Karesidenan Betawi. Akan tetapi di kedua tempat di Muhammad Husni Thamrin agaknya tidak kerasan bekerja.

Mungkin juga ketidakkerasannya itu disebabkan oleh karena pekerjaan sebagai pegawai kurang disenanginya. Ia bekerja di kantor-kantor tersebut untuk memenuhi harapan orang tuanya, yang sejak semula mengharapkan anaknya untuk menjadi *ambtenaar* sebagaimana yang ditempuh oleh ayahnya sendiri. Karena itu pada akhirnya dia pun minta keluar dari pekerjaannya sebagai pegawai pemerintah.

Dia kemudian pindah ke perusahaan perkapalan milik Belanda yaitu KPM. Pada perusahaan ini dia menduduki jabatan sebagai "pemegang buku". Dalam hitungan waktu masa kerja Muhammad Husni Thamrin di KPM dapat dikatakan cukup lama, kurang lebih 10 tahun, yaitu 1914 - 1924.

Dalam masa-masa itulah titik-titik perubahan hidup Muhammad Husni Thamrin untuk kemudian menjadi salah seorang pemimpin dalam pergerakan nasional mulai tampak Salah satu faktor terpenting dalam awal perubahan itu ialah perkenalannya dengan seorang berbangsa Belanda, Van der Zee. Ketika Muhammad Husni Thamrin bekerja di KPM dia berkenalan dengan Van der Zee salah seorang tokoh politik sosialistis dan merupakan salah seorang anggota *Gemeenteraad* Kota Betawi.

Di dalam perkenalan kedua orang yang berbeda kebangsaannya ini, nampaknya telah terjalin dialog yang pada gilirannya membuka jalan untuk saling menyampaikan ide-ide kemasyarakatan masing-masing. Ketika itu Muhammad Husni Thamrin memang telah menunjukkan minatnya terhadap usaha-usaha perbaikan kehidupan masyarakat Betawi. Dia telah memperhatikan keadaan masyarakat sekelilingnya yang berupa keadaan kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Perhatiannya terhadap hal-hal yang menyangkut secara langsung tentang peri kehidupan masyarakat itu tampaknya dilatarbelakangi oleh pengalaman di masa kecilnya. Yang dimaksud ialah pertemanannya secara intim dengan anak-anak sebayanya yang berasal dari lapisan "rakyat jelata", yang jelas sangat berbeda dengan asal dari keluarga Muhammad Husni Thamrin yang anak wedana itu.

Di antara sekian banyak usaha perbaikan yang menarik minatnya, ialah usaha penanggulangan banjir yang selalu melanda Betawi oleh karena meluapnya air Sungai Ciliwung.

Perkenalannya dengan van der Zee membuka kemungkinan bagi Muhammad Husni Thamrin untuk mewujudkan ide-ide usaha perbaikan keadaan Kota Betawi waktu itu. Di lain pihak van der Zee, yang waktu itu merupakan salah seorang anggota *Gemeenteraad,* dapat memanfaatkan buah-buah pikiran dari Muhammad Husni Thamrin. Karena buah pikiran Muhammad Husni Thamrin memang cukup menggugah hati nurani van der Zee, maka tidak sedikit buah pikiran Muhammad Husni Thamrin yang telah dicerna oleh van der Zee untuk kemudian dilontarkan ke depan para anggota *Gemeenteraad* untuk menjadi bahan pembahasan. Salah satu dari buah pikiran yang dimaksud ialah persoalan pembendungan banjir Sungai Ciliwung yang persoalannya pernah dilontarkan van der Zee di depan sidang *Gemeenteraad* untuk memperoleh tanggapan-tanggapan persetujuan. Ternyata usaha van der Zee tidak sia-sia. Akhirnya gubernur jendral setuju untuk mengusahakan agar air Sungai Ciliwung tidak lagi mendatangkan suatu bencana. Dia melaksanakan suatu proyek untuk maksud itu.

Ketika pelaksanaan proyek penanggulangan air kali Ciliwung akan diawali pekerjaannya, van der Zee mengajak Husni Thamrin untuk menyaksikannya. Dengan itu Muhammad Husni Thamrin dapat menyaksikan realisasi dari buah pikirannya yang selama ini diharapkannya dapat terwujud.

Persahabatan antara Muhammad Husni Thamrin dengan van der Zee makin erat. Rasa saling percaya tumbuh pada mereka berdua. Dan hal ini makin membuka jalan Muhammad Husni Thamrin untuk melangkah ke jalan pengabdiannya kepada masyarakatnya.

Ketika terbuka kesempatan untuk pengangkatan anggota *Gemeenteraad* diketuai van der Zee, maka kesempatan itu digunakan sebaik-baiknya oleh Muhammad Husni Thamrin; dan dia mendapat dukungan sepenuhnya dari van der Zee. Pada tanggal 29 Oktober 1919 Muhammad Husni Thamrin mengawali langkahnya sebagai seorang pengabdi masyarakat, secara resmi, ketika dia diangkat sebagai anggota *Gemeenteraad* untuk pertama kalinya. Dari sinilah dia berhasil mengembangkan dirinya untuk menjadi salah seorang pemimpin "terkemuka" di dalam usaha bangsanya mendapatkan kembali kemerdekaannya, yang selama ini telah dirampas oleh penjajah Belanda.

Dengan peristiwa itu, maka berarti pula bahwa awal dari terwujudnya harapan dari seorang ibu, untuk menjadikan anaknya sebagai seorang yang bersedia bekerja untuk kepentingan bersama, makin nampak, makin terbuka kemungkinannya untuk berwujud.

DAFTAR CATATAN BAB II

1) Bab ini dikerjakan dengan berdasarkan isi dari karya-karya terdahulu seperti "Mereka yang Terkemuka, yang dibicarakan: Moh. Hoesni Thamrin", dimuat di dalam harian Pemandangan, Tahoen Ke I, Nomor 17, 29 Juli 1933: Matu Mona, *Riwayat Penghidupan Dan Perjuangan Mohd. Husni Thamrin,* Pustaka Timur, Medan, 1950; Soekamto S.A., Matahari Jakarta Lukisan Kehidupan M. Husni Thamrin, Pustaka Jaya, Jakarta, 1974.

2) Istilah atau sebutan *Serani* digunakan untuk orang-orang yang beragama Kristen, baik Katholik maupun Protestan.

BAB III PERGERAKAN NASIONAL

Dalam karier politiknya, Husni Thamrin bergumul di dalam situasi usaha bangsanya untuk memperoleh kembali kemerdekaan yang selama ini telah dirampas bangsa Belanda Masa itu, di dalam babakan sejarah nasional kita,disebut dengan "zaman pergerakan nasional". Dalam masa itulah Muhammad Husni Thamrin muncul menjadi salah seorang pemimpin pergerakan yang disegani. Karena itu agaknya riwayat hidup Muhammad Husni Thamrin sebagai seorang politikus, tidaklah dapat dipisahkan dengan situasi yang dihadapinya ketika itu.

Sejalan dengan keterangan di atas, maka sangat bermanfaat kiranya untuk memberikan suatu gambaran yang agak panjang tentang situasi pergerakan ketika itu. Bab III ini akan digunakan untuk maksud itu.

Cakrawala baru di Hindia Belanda telah mulai menampakkan dirinya dengan lebih terang, lebih memberikan kemungkinan wujud kemerdekaan bangsa akan dapat diraih dan dinikmati kembali.

Hal itu terjadi ketika sekelompok pemuda-pemuda terpelar membentuk sebuah organisasi sosial yang dikenal dengan nama: Budi Utomo. Pembentukannya dilakukan oleh Dr. Sutomo dan kawan-kawan. Akan tetapi sebelum Budi Utomo dibentuk pada 20 Mei 1908 itu, seorang dokter Jawa, bernama dr. Wahidin Sudirohusodo telah terlebih dahulu mengambil inisiatip untuk membantu anak-anak pribumi guna memperoleh pendidikan yang

lebih baik. Untuk maksud itu maka haruslah terlebih dahulu membentuk sebuah organisasi yang digunakan untuk membantu para pemuda yang akan melanjutkan pendidikannya. Untuk merealisasi cita-citanya itu, dr. Wahidin Sudirohusodo sejak tahun-tahun 1906 dan 1907 telah melakukan "semacam" kampanye untuk memperoleh dukungan dari masyarakatnya, terutama dari para penguasa tradisional ketika itu. Usahanya itu tidak sepenuhnya memperoleh dukungan darl para: bangsawan tradisional.

Kenyataan yang dihadapi oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo itu dilatar belakangi oleh sikap "tertutup" kaum bangsawan di Jawa ketika itu. Artinya mereka pada umumnya belum bersedia untuk membuka kesempatan kepada golongan dan lapisan masyarakat lainnya guna memperoleh "kesejahteraan" yang lebih baik daripada apa yang telah diperolehnya selama ini. Dalam penglihatan mereka, belum tiba waktunya bagi para orang pribumi di luar golongan priyayi bangsawan untuk memperoleh pendidikan. Karena memang mereka ditakdirkan untuk tetap "bodoh". Ajakan dr. Wahidin Sudirohusodo untuk mendirikan sebuah organisasi yang bertujuan membantu biaya pendidikan anak-anak pribumi (yang bukan priyayi /bangsawan) tidak memperoleh tangga-pan yang sewajarnya; malah disambut dengan nada sinis.

Namun demikian ide dari dr. Wahidin Sudirohusodo itu telah membuka mata hati sekelompok golongan terpelajar yang ketika itu sedang menuntut ilmu di lembaga pendidikan kedokteran OSVIA. Merekalah yang mendirikan sebuah organisasi dengan tujuan seperti yang dikampanyekan oleh dr. Wahidin Sudihusodo. Merekalah yang membentuk Budi Utomo untuk pertama kalinya. R. Sutomo dan R. Gunawan Mangunkusumo adalah tokoh-tokohnya yang terkemuka.

Beberapa bulan setelah tanggal pendiriannya, 20 Mei 1908, Budi Utomo mengadakan kongresnya yang pertama di Yogyakarta. Di dalam kongres yang diadakan pada tanggal 5 Oktober itu, telah diambil pelbagai keputusan yang menyangkut pada langkah-langkah yang akan diambilnya; antara lain

dijelaskan tujuan dari Budi Utomo yaitu untuk menciptakan kemajuan yang selaras (harmonis) buat bangsa dan negeri terutama sekali untuk memajukan pengajaran, pertanian, peternakan dan perdagangan, teknik dan industri serta kebudayaan yang meliputi kesenian dan ilmu pengetahuan.[7]) Di dalam kongres itu dipilih ketua Pengurus Besarnya yang pertama, yaitu Bupati Karanganyar Tirtokusumo.

Lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi sosial politik tentulah ditunjang oleh pelbagai faktor, baik itu berasal dari luar maupun yang ada di dalam negeri waktu itu. Faktor yang berasal dari luar sudah lazim disebutkan yaitu kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang 1904-1905. Hal ini digambarkan sebagai suatu kejadian yang berhasil menggugah "rasa harga diri" bangsa-bangsa di Asia, termasuk Indonesia, karena ternyata dengan kejadian tersebut telah ditunjukkan bahwa bangsa kulit putih bukanlah bangsa yang tak terkalahkan sebagaimana yang digambarkan selama ini. Sebagaimana diketahui, ketika itu pada umumnya negeri Asia berada di bawah penjajahan bangsa-bangsa berkulit putih, bangsa yang digambarkan serba bisa, cerdas dan tak terkalahkan. Faktor lainnya ialah lahirnya kebijaksanaan politik ethik yang menyangkut pada usaha perbaikan nasib akan negeri, antara lain di bidang pendidikan. Ini nantinya melahirkan anak-anak pribumi terdidik. Akan tetapi sebenarnya bukanlah oleh karena adanya kehendak pemerintah negeri induk (penjajah) untuk memperbaiki kehidupan anak negeri, akan tetapi juga sebenarnya, dan terutama sekali berlandaskan pada pemikiran untuk kelangsungan kekuasaan penjajahan di negeri kita. Ketika itu mereka memerlukan tenaga-tenaga "rendahan" yang sehat dan terdidik. Karena itu diperlukan kebijaksanaan yang lebih bagi bidang kesehatan dan pendidikan anak negeri. Faktor keadaan dalam negeri merupakan pendorong utama lahirnya Budi Utomo, sebagai organisasi sosial politik. Kemiskinan, perbedaan hak-hak di antara warga penjajah dengan yang terjajah dan semacamnya, merupakan kondisi-kondisi yang sangat rawan di Hindia Belanda pada waktu itu. Karena dorongan keadaan di dalam negeri untuk melahirkan sebuah organisasi sosial politik sangat besar. Penekanan

pentingnya dorongan yang lahir dari keadaan dalam negeri, tidaklah menghilangkan kenyataan akan adanya saling keterkaitan faktor-faktor yang disebutkan di atas.Tentang tekanan dari daya dorong faktor-faktor diatas, DMG Koch memberikan penilaiannya sebagai berikut:

> ". . . Tambahan dan perbaikan pelajaran sekolah sebagai faktor yang penting dari politik etis itu, dan kemenangan Jepang atas Rusia, tak dapat tiada telah menimbulkan dorongan semangat bagi pergerakan rakyat Timur. Tapi kedua peristiwa itu tak dapat dipandang sebagai sebab yang lebih dalam pada timbulnya Budi Utama. Sebab-sebabnya itu adalah lebih dalam letaknya. Ia harus dicari di dalam keadaan, yang memberi kepada suasana yang sedang berlaku di negeri ini, yaitu yang berhubungan dengan peri kehidupan rakyat dan tingkat-tingkat pergaulannya.
>
> .....
>
> .....
>
> .....
>
> Yang menjadi sebab ialah rasa tak senang, yang kian lama kian bersarang di dalam kalbu rakyat. Makin diinsyafkannya, bahwa hidupnya memang sengsara, makin mendalamlah rasa itu."[1])

Pada awal masa pertumbuhannya Budi Utomo dapat dikata-kan sebagai organisasi "lokal"; artinya lingkup keanggo-taannya hanya terbatas pada orang-orang Jawa, (dan juga orang Madura). Sifatnya yang lain ialah organisasi golongan priyayi; artinya pada umumnya anggotanya berasal dari golongan priyayi yang terdiri dari kaum bangsawan, pegawai negeri, dan orang-orang terpelajar.[2])

Setelah beberapa tahun kelahiran Budi Utomo, maka lahir pula organisasi-organisasi modern lainnya, yaitu Sarekat Islam (SI) dan *Indische Partij.* Akan tetapi berbeda dengan Budi Utomo yang mendahului kelahirannya, SI dan *Indische Partij* lebih jelas menunjukkan dirinya sebagai gerakan politik. Dasar kedua organisasi yang lahir kemudian ini juga lebih jelas yaitu Islam dan Nasional. SI pada mulanya lahir dari usaha pedagang pribumi

untuk mengorganisasi dirinya di dalam suatu organisasi untuk menghadapi para pedagang Cina yang ketika itu memang memegang monopoli perdagangan, Haji Samanhudi adalah salah seorang pendirinya. Jika SI berdasarkan gerakan Islam, maka *Indische Partij* pada ideologi nasional. Hal ini jelas terlihat dalam anggaran dasarnya; dengan tegas tujuannya menyatakan "Untuk membangun patriotisme semua bangsa Hindia kepada tanah airnya, yang telah memberi lapangan hidup kepadanya, dan menganjurkan kerjasama atas dasar persamaan ketatanegaraan guna memajukan tanah air Hindia dan untuk mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka.3) Dengan adanya pencantuman hal-hal yang tersebut di atas itu, maka nampak kepada kita bahwa para pendiri *Indische Partij* telah memiliki konsep yang sangat jelas akan apa yang dicapainya, yaitu untuk memperoleh sebuah negara Hindia yang merdeka yang didiami oleh bangsa/rakyat yang merdeka pula. Oleh karena itu mereka telah mempunyai suatu konsep kebang-saan yang disebut: *Indiers.* Yang dimaksudkannya ialah bangsa yang mendiami wilayah yang ketika itu diberi nama Hindia Belanda.

Di dalam perkembangannya kemudian, corak politis dari SI dan *Indische Partij* makin jelas. Gerak SI juga makin menunjukkan bahwa tujuannya tidak hanya untuk melawan dominasi ekonomi pedagang Tionghoa lebih dari itu dimaksudkan pula untuk aksi bersama menghadapi semua penghinaan terhadap penduduk bumiputra. la juga merupakan reaksi terhadap rencana *Kerstening Politiek* dari kaum *Zending.* perlawanan terhadap kecurangan-kecurangan dan penindasan-penindasan dari pihak pegawai bumiputra dan Eropa. Pendeknya perlawanan Sarekat Islam ditujukan kepada setiap bentuk penindasan dan kesombongan rasia!. [4]) Di lain pihak *Indische Partij* telah pula berusaha untuk mencapai tujuannya, untuk melahirkan sebuah bangsa Indier dengan melalui pelbagai langkah, seperti antara lain (1) memelihara nasionalisme Hindia dengan meresapkan cita-cita kesatuan kebangsaan Hindia: meluaskan pengetahuan umum tentang sejarah kebudayaan Hindia; menyatupadukan intelek secara bertahap ke dalam golongan-golongan bangsa yang masih hidup

bersama dalam keadaan terpisah karena ras dan ras peralihan masing-masing; menghidupkan kesadaran diri dan kepercayaan kepada diri sendiri.(2) Menyingkirkan kesombongan rasial dan keistimewaan ras, baik dalam bidang ketatanegaraan maupun dalam bidang kemasyarakatan[5]), dan banyak lagi rencana-rencana lainnya yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang disebutkan di atas.

Apa yang ingin dicapai oleh SI pada dasamya juga hal yang diperjuangkan oleh *Indische Partij.* Hal yang demikian itu adalah wajar. Karena hubungan antara pemimpin dari keduanya cukup erat. Bahkan salah satu tokoh terkemuka, seperti Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantoro) adalah anggota SI waktu itu.

Jika kita melihat perkembangan dari ketiga organisasi sosial-politik tersebut, maka nampak bahwa SI telah mampu berkembang sedemikian pesatnya dalam waktu yang singkat. Salah satu faktor yang menyebabkannya ialah karena orientasi kerakyatannya sangat menarik perhatian dan memancing minat dari lapisan rakyat "jelata" ketika itu. Hal ini sangat berbeda dengan Budi Utomo yang ,dikuasai oleh kaum priyayi.

Dalam fase pertama ini, selain ketiga organisasi sosial – politik diatas itu, masih terdapat pula organisasi yang bertujuan untuk melaksanakan gerakan pembaharuan agama (Islam), yaitu Muhammadiyah. Organisasi ini lebih banyak menyibukkan diri di dalam kegiatan pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Di dalam fase pertama ini telah banyak tindakan politis yang dilakukan oleh partai-partai ini, terutama oleh SI. Sampai dengan pecahnya pemberontakan 1926 – 1927, pelbagai kejadian poliis telah terjadi; bentuknya berupa pemogokan buruh, pembrontakan setempat dan semacamnya

Ketika pemberontakan 1926-1927 berhasil ditumpas oleh pemerintah kolonial dengan jalan kekerasan, dalam bentuk penangkapan dan pendigulan, maka lahirlah organisasi politik yang lebih jelas menunjukkan cita-cita perjuangannya untuk mencapai suatu negara nasional yang bernama Indonesia, dan yang merdeka. Pendirinya adalah Sukarno, tokoh yang kelak

muncul sebagai tokoh pergerakan nasional yang paling terkemuka. Oapat dikatakan, sejak kemunculan-nya yang pertama itu, tokoh inilah yang paling banyak memberi corak perpolitikan di negeri kita; malah sampai saat-saat kejatuhannyapun, tokoh ini masih mempunyai pendukung yang tidak sedikit jumlahnya. Sumbangan yang terpenting yang diberikan kepada bangsanya, ialah konsep pemersatuan bangsa diatas suatu bangunan negara kesatuan.

Ketika PNI didirikan oleh Ir. Sukarno dan kawan-kawannya pada tahun 1927, maka tindakan pemerintah kolonial memang telah memberikan corak yang lebih keras di dalam menghadapi tindakan-tindakan kaum pergerakan. Namun demikian, tindakan kekerasan pemerintah kolonial ini tidaklah mengurungkan maksud para pemimpin PNI untuk berpegang kepada asas non-koperasi. Penangkapan-penangkapan kembali dilakukan oleh pemerintah kolonial dengan tuduhan-tuduhan sebagai komunis. Penangkapan itu dilakukan baik terhadap tokoh-tokoh politik yang ada di Hindia Belanda maupun yang ada di negeri Belanda. Pada bulan Maret 1928 pemimpin mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia (PI) ditangkap dan diajukan ke depan pengadilan di Den Haag: mereka itu ialah Muhammad Hatta, Ali Sastroamijoyo, Abdul Majid dan Natzir Sutan Pamuncak. Di depan pengadilan itu Muhammad Hatta sebagai pemimpin PI telah mengajukan suatu pidato pembelaan yang berjudul: *Indonesia Vrij* [6]) yang sangat terkenal karena analisanya yang tajam itu. Dalam pidato pembelaannya itu Muhammad Hatta telah menyatakan secara jelas prinsip-prinsip PI yang memang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam hal ini antara lain dia berkata:

> "Tuan Ketua! Sampailah saya sekarang pada soal aksi Perhimpunan Indonesia. Setelah saya menguraikan prinsip-prinsipnya, maka menjadi jelas kini bahwa dalam usaha mempersiapkan untuk kemerdekaan Indonesia, Perhimpunan Indonesia menjalankan politik yang langsung

menuju sasaran. Ia tak mau mengambil jalan-jalan samping lagi, yang hanya menuju pada lebih banyak kegetiran.

Selamat tinggal politik memohon dan mengemis!

Selamat tinggal politik memohon restu!

Selamat tinggal politik menadahkan tangan!

Perhimpunan Indonesia sadar sepenuhnya, bahwa aksi yang mendasarkan prinsip non-koperasi akan mampu memulihkan pada bangsa Indonesia suatu kepercayaan pada diri sendiri dan merangsang kesadaran politiknya."[7])

Demikianlah, dari kutipan di atas, nampak dengan jelas bahwa perjuangan PI adalah untuk mencapai Indonesia Merdeka dengan menempuh azas non-koperasi.

Tuduhan yang diajukan kepada keempat tokoh PI itu, yaitu menghasut kekuasaan umum, tidak dapat dibuktikan. Mereka pun pada akhirnya dibebaskan.

Setelah Bung Hatta dan kawan-kawan menghadapi pengadilan kolonial di Den Haag, maka menyusul pula Bung Karno dan kawan – kawan , di depan pengadilan di Bandung. Bung Karno ditangkap bersama – sama Gatot Mangku praja, Maskun dan Supriadinata. Setelah ditahan beberapa bulan, akhimya mereka diajukan ke depan pengadilan pada 18 Agustus 1930. Pemeriksaan kepada mereka di depan pengadilan memakan waktu berbulan-bulan; barulah pada 22 Desember 1930 hakim menjatuhkan putusannya kepada keempat terdakwa ini.

Pembelaan Bung Karno yang berjudul: *Indonesia Menggugat* telah memberikan analisa tajam terhadap situasi penjajahan Belanda ketika itu. Pidato pembelaan itu sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh yang luas. Dengan cepat pidato tersebut telah tersebar luas. Ini menguntungkan sekali bagi pendidikan politik rakyat, terutama yang terorganisasi dalam partai politik.[8])

Sejak lahimya Budi Utomo yang kemudian disusul oleh SI, *Indische Partij,* kemudian PNI, maka tidak sedikit kesulitan yang dihadapi; hal ini tidak hanya bersumber dari luar, tetapi juga karena

tingkah laku internal organisasi-organisasi itu sendiri. Sarekat Islam misalnya, telah melahirkan pelbagai pertentangan di dalam tubuhnya, yang bagaimana pun akan sangat melemahkan dirinya. Dimulai dengan masuknya unsur-unsur ISDV yang marxistis. dan kemudian melahirkan PKI; kemudian pecah lagi dan berdirilah Partai Islam Indonesia, disusul kemudian Barisan Penyedarnya Haji Agus Salim. Pembrontakan 1926 – 1927 [9]) melahirkan pula perpecahan di antara tokoh-tokoh PKI, yaitu antara Semaun-Alimin yang mendukung pembrontakan itu dengan Tan Malaka yang menentang diadakannya pemberontakan tersebut.

PNI pun pada akhirnya pecah pula, yaitu Partindo dan PNI (Pendidikan). Ketika Bung Karno keluar dari penjara, maka dia berusaha untuk mempersatukan kedua golongan ini, dan tidak mau menggabung ke dalam salah satu pihak. Akan tetapi usaha Bung Kamo itu gagal. Adanya perpecahan di kalangan golongan kiri ini dinilai oleh Ali Sastroamijoyo dalam kata – kata sebagai berikut :

> "Pertentangan antara kedua partai kaum nasionalis kiri ini segera menjadi sangat tajam dan berlangsung dengan sengit sekali. Padahal perbedaan antara mereka sebetulnya tidak begitu besar. Yang paling menyedihkan ialah bahwa bekas anggota-anggota Perhimpunan Indonesia yang dahulu di negeri asing bersatu di dalam perjuangannya menentang penjajahan, di tanah air terpecah belah dan bertentangan di dalam menghadapi Pemerintah kolonial.",[10])

Kegagalan Bung Karno untuk mempersatukan para bekas anggota PNI, yaitu Partindo dan Pendidikan Nasional Indonesia itu dengan sendirinya mengharuskan dirinya untuk memilih satu di antaranya; ternyata dia memilih Partindo, dia memilih Mr. Sartono dan kawan-kawannya. Pilihannya itu bukanlah suatu yang kebetulan. Tentu ada faktor-faktor yang mendorongnya untuk memilih Partindo.

Jika kedua partai itu dilihat cara geraknya, maka memang nampak perbedaan yang sangat penting artinya, yaitu bentuk keljanya. Partindo adalah merupakan partai yang lebih ban yak berdasarkan diri untuk memperoleh dukungan manusia sebanyak-banyaknya. Jadi corak partainya adalah partai massa.

Di lain pihak, PNI (Pendidikan) lebih banyak mengandalkan usahanya pada pendidikan politik, menyadar-kan rakyat akan kedudukannya sebagai warganegara. Karena itu PNI (Pendidikan) lebih mendasarkan diri pada pendidikan kader; karena itu PNI (Pendidikan) lebih bersifat partai kader.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dimengerti jika sekiranya Bung Kamo pada akhimya memilih Partindo. Sebagai pemimpin pergerakan waktu itu dia selalu berusaha untuk memperoleh dukungan massa yang sebanyak banyak-nya. Jalan pikirannya inilah yang dilanjurkan oleh Partindo.

Di dalam masa pergerakan itu, tentulah telah digunakan taktik-taktik untuk mencapai tujuan, yaitu suatu negara merdeka. Pada garis besarnya taktik hanya terdapat dua, yaitu yang berasaskan non – koperasi dan yang koperasi. Pada zaman itu lazim dikatakan bahwa yang non-koperasi adalah kelompok yang tidak mau bekerjasama dengan penjajah. Mereka bersifat konfrontatif. Mereka ini lazim juga disebut dengan "golongan nasionalis kiri". Sebaliknya kelompok koperasi adalah kelompok yang bersedia bekerjasama dengan pemerintah penjajah; karena itu kelompok ini bersedia menduduki lembaga-lembaga pemerintah ketika itu, seperti *Volksraad* Ketika itu lembaga ini merupakan lembaga legislatif. Golongan yang bersedia bekerjasama dengan pemerintah ini, lazim disebut "golongan nasionalis kanan ".

Di antara kedua golongan ini, dari segi taktik. memang mempunyai perbedaan yang sangat prinsipal sehingga tidaklah dapat dipertemukan. Akan tetapi walaupun demikian, hal itu tidaklah berarti bahwa keduanya tidak dapat bekerja-sama. Dalam pelbagai kesempatan yang bersifat politik keduanya juga bersedia untuk bekerjasama. Hal ini, misalnya, dapat ditemukan dalam organisasi politik gabungan federatif: Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Inisiatip pembentukannya berasal dari Ir. Sukarno yang ketika tampil sebagai pemimpin yang baru saja membentuk PNI. Tujuan organisasi federatif ini ialah untuk menciptakan persatuan di antara kaum nasionalis yang ketika itu nampak terpecah. Dalam

federasi ini bertemulah tokoh-tokoh nasionalis kiri dan kanan. Karena mereka mewakili organisasi-organisasi mereka masing-masing. Muncul Sukamo sebagai pemimpin terkemuka, demikian pula muncul Muhammad Husni Thamrin yang mewakili Kaum Betawi. Sukarno adalah lambang dari golongan kaum nasionalis kiri yang non-koperasi, sedang Muhammad Husni Thamrin adalah salah seorang tokoh paling terkemuka di dalam kalangan nasionalis kanan. Keduanya muncul sebagai tokoh-tokoh sentral di dalam gerak langkah PPPKI.

Banyak langkah yang menuju terciptanya persatuan yang telah diusahakan oleh PPPKI itu. Namun di dalam perkembangannya kemudian PPPKI tampaknya tidak dapat menghindarkan diri dari pertentangan-pertentangan intern mereka. Mereka rupanya tidak dapat mempertahankan keputusan-keputusan kongres – kongres mereka yang setiap kali melahirkan ide untuk mempersatukan diri dengan sekokoh-kokohnya.

Ketika PPPKI ternyata tidak dapat lagi menjalankan fungsinya, makin tidak dapat menciptakan persatuan diri sebagaimana yang dicita-citakan, maka oleh beberapa orang tokoh, diambil keputusan untuk membangun kembali sebuah organisasi federatif pula; organisasi ini diberi nama Gabungan Politik Indonesia, disingkat GAPI. Ide pembentukannya muncul dari Muhammad Husni Thamrin dari Parindra. Dalam pertemuan yang diadakan pada bulan Mei 1939, telah diambil keputusan seperti berikut:

> "Berhubung dengan ancaman perang yang telah ada di muka pintu, perlu sekali diusahakan kerjasama. Kerjasama itu hanya mungkin, jika kepada rakyat Indonesia diberikan hak-hak baru. Diambil keputusan supaya sekalian perhimpunan yang menggabungkan diri ke dalam Gapi, janganlah bertindak sendiri-sendiri, melainkan serentak merupakan Gapi".

Dengan keterangan di atas, maka tampak bahwa Gapi sebagai organisasi federatif, juga telah berusaha keras untuk menyatukan semua organisasi politik dalam satu wadah yang kuat. Di dalam organisasi federatif ini, sebagaimana halnya di

dalam PPPKI, bertemu pulalah unsur-unsur golongan nasionalis kiri dan kanan.

Di dalam masa periode pergerakan ini, terdapat suatu gejala historis yang sangat penting artinya, yaitu muncul pelbagai organisasi pemuda yang membawa nama identitas tempat asal-kelahirannya; misalnya ada *Jong lava, Jong Ambon, Jong Sumatera, Jong Minahasa, Jong Celebes,* dan lain-lain. Akan tetapi walaupun mereka atas namakan tempat asal-kelahiran mereka itu tidaklah berarti bahwa mereka tidak memberikan sumbangan terhadap usaha terwujudnya bangsa Indonesia yang satu. Bahkan sebenarnya dari kongres merekalah bergemanya ide: satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Mereka telah mengikrarkan ketiga hal tersebut diatas didalam Kongres Pemuda yang kedua pada tanggal 28 Oktober 1928.

Ikrar, yang kini dikenal dengan istilah: Sumpah Pemuda, sangat besar sumbangan dan artinya didalam kelanjutan perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia di atas satu bangunan negara Indonesia.

DAFTAR CATATAN BAB III

1) D.M.G. Koch, *Menudju Kemerdekaan Sedjarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia sampai* 1942, (Terjemahan Abdoel Moeis), Jajasan Pembangunan, Djakarta 1951, ha1.8-9.

2) Bernard H.M. Viekke, *Nusantara (Sejarah Indonesia),* Dewan Bahasa Dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, Kuala Lumpur, 1967, hal. 353.

3) Abdurrachman Surjomuhardjo, *Pembinaan Bangsa Dan Masalah Historiografi Kumpulan Esei dan Artikel,* Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LEKNAS-LIPI), Jakarta 1978, hal. 48.

4) *Ibid.,* halo 5

5) *Ibid.*

6) Telah diterjemahkan oleh Drs. Hazil dan diterbitkan oleh Bulan Bintang, pada tahun 1976, dengan judul: *Indonesia Merdeka.*

7) *Ibid.,* hal. 97.

8) Ali Sastroamijoyo, *Tonggak-Tonggak Di Perjalananku,* P.T. Kinta, Jakarta, 1974, hal. *104.*

9) Adalah keliru jika orang menganggap bahwa pemberontakan 1926-1927 sebagai sepenuhnya pemberontakan yang dilakukan oleh PKI. Sebab didalam kenyataannya, tidak

sedikit dari mereka yang ikut pemberontakan adalah, non PKI, terutama dari orang-orang Islam. Akan tetapi PKI memang mempunyai terutama dari orang-orang Islam. Akan tetapi PKI memang mempunyai kelihaian untuk menunggangi keresahan mereka dan menggunakan mereka.

10) Ali Sastroamijoyo, *op.,cit.* hal. 108.

BAB IV DARI TOKOH RAKYAT BETAWI KE TOKOH RAKYAT INDONESIA

Munculnya Muhammad Husni Thamrin sebagai tokoh pergerakan yang berkaliber nasional tidaklah mudah. Untuk mencapai tingkat itu ia memulai dari bawah, dari tingkat lokal. Dia memulai geraknya sebagai seorang tokoh (lokal) Betawi. Sebagaimana telah disinggung pada bab terdahulu, Muhammad Husni Thamrin sejak muda telah memikirkan nasib masyarakat Betawi yang sehari-hari dilihatnya. Sebagai anak wedana, dia tidaklah terpisah dari rakyat "jelata". Malah dia sangat dekat dengan mereka. Sebagaimana anak-anak sekelilingnya, yang terdiri dari anak-anak rakyat jelata, dia pun tidak canggung-canggung untuk mandi-mandi bersama di Sungai Ciliwung; dia tidak canggung-canggung untuk tidur bersama mereka, sebagaimana yang pernah disaksikan oleh ayahnya sendiri. Kelincahannya sebagai pemimpin agaknya telah menampak sejak masih usia "remaja".

Pada masa pergerakan nasional telah muncul organisasi-organisasi sosial politik yang membawa nama asal tempat kelahiran mereka masing-masing. Ketika itu ada yang menggunakan Pasundan, Sumatra, Ambon, Minahasa, Selebes dan lain-lain; juga ada yang menggunakan nama Betawi yaitu Kaum Betawi. Pada awal pembentukan mereka, pada umumnya organisasi-organisasi kedaerahan ini hanyalah bertujuan untuk bergerak di bidang usaha-usaha perbaikan dan kegiatan-kegiatan

di bidang sosial dan kebudayaan. Misalnya mereka berusaha untuk memperbaiki bidang-bidang pendidikan, kesehatan dan bidang-bidang sosial mereka. Akan tetapi perkembangan situasi dalam periode itu mendorong mereka untuk mengubah tujuan yang semula, dan karena itu pada umumnya justru berkembang sebagai organisasi politik. Tidak sedikit dari tokoh-tokoh mereka akan muncul sebagai tokoh-tokoh terkemuka dalam pergerakan nasional kita; sebutlah nama itu seperti Ratulangi dan Muhammad Husni Thamrin.

Sejak pengangkatannya sebagai anggota *Gemeen-teraad,* Muhammad Husni Thamrin makin giat untuk memperjuangkan ide-idenya untuk memperbaiki keadaan masyarakat kaum Betawi. Posisinya pun makin lama makin kuat dan baik. Dia akhirnya secara berangsur makin dipercayai untuk menduduki jabatan-jabatan kemasyarakatan yang penting. Di dalam *Gemeenteraad* dia pun makin terkemuka. Di dalam lembaga ini dia pun giat untuk menciptakan kekuatan-kekuatan nasionalis di dalam satu wadah, dan karena itu akhirnya dia berhasil membentuk satu fraksi khusus, yaitu fraksi nasional.

Pada tahun 1929 terjadi suatu insiden penting di dalam *Gemeenteraad,* yaitu yang menyangkut pengisian lowongan jabatan wakil walikota Betawi (Batavia). Tindakan pemerintah kolonial ketika itu memang sangat tidak bijaksana, karena ternyata lowongan jabatan itu diberikan kepada orang Belanda yang kurang berpengalaman, sedang untuk jabatan itu ada orang Betawi yang jauh lebih berpengalaman dan pantas untuk jabatan itu. Tindakan pemerintah ini mendapat reaksi keras dari fraksi nasional. Bahkan mereka mengambil langkah melakukan pemogokan; ternyata usaha mereka berhasil dan pada akhirnya Muhammad Husni Thamrin diangkat sebagai wakil walikota Batavia.

Dua tahun sebelum kejadian di atas, Muhammad Husni Thamrin memang telah melangkahkan kakinya ke medan "perjuangan" yang lebih berat, karena dia ditunjuk sebagai anggota lembaga yang lebih luas jangkauannya dan lebih tinggi martabatnya. Pada tahun 1927 ditunjuk sebagai anggota *Volksraad* untuk mengisi lowongan yang dinyatakan kosong oleh

Gubernur Jendral. Pada mulanya kedudukan itu ditawarkan kepada HOS Cokroaminoto tetapi ditolak. Kemudian ditawarkan lagi kepada Dr. Sutomo tetapi juga dia menolak. Dengan penolakan kedua tokoh "besar" ini, maka dibentuklah suatu panitia, yaitu panitia Dr. Sarjito yang akan memilih seorang yang dianggap pantas untuk menduduki kursi *Volksraad* yang lowong. Panitia Dr. Sarjito akhimya menjatuhkan pilihannya kepada Muhammad Husni Thamrin; alasan yang dikemukakannya ialabahwa Muhammad Husni Thamrin cukup pantas menduduki kursi itu mengingat pengalamannya sebagai anggota *Gemeenteraad.*

Sebagai pemimpin yang tadinya bersifat lokal, maka dengan pengangkatannya sebagai anggota *Volksraad* tentulah horizon penglihatannya harus lebih luas, lebih menjangkau ke depan. Karena sebagai anggota *Volksraad,* tentulah dia menghadapi permasalahan yang lebih beraneka ragam, sejalan dengan sifat dan kedudukan Volksraad itu sendiri.

Pada tahun pengangkatannya sebagai anggota Volksraad, keadaan di Hindia Belanda mengalami perubahan yang sangat penting, yakni adanya sikap pemerintah kolonial yang keras, lebih bertangan besi. Ini adalah salah satu akibat yang paling "buruk" yang lahir dari terjadinya pemberontakan 1926 dan 1927. Akan tetapi di lain pihak ketika memasuki tahun 1927 itu pula, langkah pergerakan nasional kita juga mengalami perubahan sebagai akibat dari didirikannya PNI, dan munculnya Bung Kamo sebagai pemimpin utamanya.

Sejak awal kemunculannya, Ir. Sukamo dengan PNI-nya telah menempuh jalan non-koperasi terhadap pemerintah penjajah. Di dalam kongresnya yang pertama di Surabaya (1928), PNI telah menelorkan keputusan yang menyangkut program aksinya; antara lain disebutkan bahwa di dalam bidang politik PNI bertujuan untuk mencapai Indonesia Merdeka; di bidang ekonomi iabertujuan untuk mencapai perekonomian nasional, dan di bidang sosial bertujuan untuk memajukan pendidikan nasional.[1]) Untuk mencapai maksudnya itu Ir. Sukarno (yang lebih populer dengan sebutan Bung Karno), dan kawan-kawannya

telah melakukan pelbagai kegiatan yang bertujuan untuk membangun kesadaran kebangsaan di kalangan rakyat pada umumnya. Bung Karno terkenal sebagai seorang yang sangat pandai berpidato di depan massa rakyat, dan dengan kepandaiannya itu dia berusaha untuk membangun kesadaran rakyat. Di depan rakyat dia tidak lupa menimbulkan angan-angan rakyat dengan jalan menceritakan kebesaran bangsa Indonesia di masa lampau; dalam hal ini antara lain tentang kebesaran negara-negara kerajaan yang pernah ada di Indonesia, misalnya seperti Sriwijaya dan Majapahit. Ketinggian nilai-nilai kebudayaan kita juga tidak ketinggalan untuk "dipropagandakan" di depan rakyat umum.

Suatu hal yang menarik dari pemimpin-pemimpin PNI ialah rencana mereka untuk menyebarkan pengetahuan dan pemahaman terhadap sejarah nasional Indonesia, hal yang sejalan dengan apa yang telah dikatakan di atas sehubungan pidato-pidato Bung Karno di depan massa. Pemahaman dan penyebaran sejarah yang bersifat nasional itu tentulah berbeda dengan gambaran sejarah yang selama ini disajikan oleh pemerintah kolonial. Kebesaran bangsa Indonesia dan ketinggian nilai-nilai kebudayaan peninggalan sejarahnya sangat tinggi; tidak kalah besarnya dengan bangsa penjajah dan juga tidak kalah tinggi nilainya dengan peninggalan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa yang menjajahnya. Bagi yang dijajah pemahaman historis terhadap eksistensi dirinya melalui gambaran perjalanan sejarahnya sangatlah penting. Pelajaran sejarah nasional, karena itu, mempunyai pula kedudukan yang penting. Karena, sebagaimana dikatakan KM Pannikar, tanpa suatu pemahaman historis suatu bangsa tidak dapat berdiri.[2])

Suatu alat lain, yang jika dilihat dari pembangunan suatu bangsa Indonesia yang merdeka adalah sangat sentral kedudukannya, ialah penciptaan bahasa nasional. Dan sebagaimana kita ketahui, bahasa Melayu telah berhasil disetujui dan dikembangkan sebagai bahasa Indonesia. PNI dan Sukarno pun telah menyadari akan hal ini. Ketika ada usaha untuk menghapuskan pelajaran bahasa Melayu di HIS, maka Ir. Sukarno telah menentangnya. Dalam penglihatan Sukarno, persatuan

nasional akan dibahayakan, jika mata pelajaran bahasa Melayu dihapuskan. Lebih baik yang dihapuskan adalah pengajaran bahasa daerah.

Dalam pendapat Sukarno, perbedaan bahasa tidak akan menghalangi persatuan Indonesia, tetapi makin disebar luaskannya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia akan lebih mempercepat pencapaian kemerdekaan. Orang yang tidak pandai berbahasa Melayu tidak dapat menangkap pidato-pidato para pemimpin rakyat atau mengikuti berita-berita dalam koran nasional, dan ia sendiri tidak dapat berbicara di muka umum.[3]) Dalam hubungannya dengan Muhammad Husni Thamrin, dia pun telah membela bahasa Melayu yang telah dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Pada tahun 1938, tepatnya 12 Juli 1938, dia telah menggunakan bahasa Indonesia untuk pertama kalinya di depan sidang Volksraad. Dan pada tahun 1939, di depan sebuah rapat umum yang diadakan oleh Parindra, dia telah mengecam pemimpin redaksi *Deli Courant* yang mencela pemakaian bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Muhammad Husni Thamrin di depan rapat umum itu menyebut pemimpin surat kabar ini sebagai orang Belanda yang sombong. Tentang hal itu dia berkata :

> "Orang Belanda yang sombong itu ialah Tuan SB Klooster, Hoofredaktur Deli Courant. Ia katanya tidak tahu Indonesia dan bahasanya. Dikatakannya bahasa Indonesia yang dipakai oleh anggota bangsa kita di Gemeenteraad baru-baru ini, adalah *Potjes Maleisch.*
>
> Dimanakah ada perkataan Potjes Maleisch? Kalau ia mengatakan bahasa Indonesia itu Potjes Maleisch, tentu ia berkata itu Krom Hollandsch.
>
> Dikatakannya bahasa Indonesia tidak diijinkan dipakai di raadraad kalau ia bilang tidak diijinkan, maka ia seorang *Bodoh!*
>
> Bahasa Indonesia menurut undang-undang boleh dipakai dalam raadraad. Kalau ia bilang tidak boleh, nyatalah ia tidak menghormati undang-undang yang diperbuat oleh pemerintah. Ialah undang – undang yang diperbuat oleh pemerin-tahnya sendiri. Oleh sebab itu".....saya perintahkan supaya wakil-wakil kita berbahasa Indonesia". [4])

Dari keterangan-keterangan yang dikatakan di atas, nampak oleh kita bahwa pelajaran sejarah nasional dan bahasa Indonesia telah menjadi alat yang dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai Indonesia merdeka seperti yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional waktu itu.

Tindakan-tindakan Sukarno dan rekan-rekannya makin dicurigai sebagai tindakan-tindakan politis yang akan berakibat buruk bagi pemerintah, jika tidak dicegah. Pemikiran yang demikian ini telah mendorong pemerintah kolonial untuk mengambil tindakan-tindakan kekerasan kepada para pemimpin PNI, Ir. Sukarno, dan kawan-kawan. Tindakan-tindakan kekerasan itu sampai pada penggeledahan rumah-rumah kediaman mereka. Tindakan keras pemerintah kolonial ini telah mendapat reaksi dari kaum pergerakan, tidak hanya dari golongan nasionalis kiri yang non-kooperator, tetapi juga dari golongan nasionalis kanan yang kooperatif. Di *Volksraad* misalnya, tindakan pemerintah menggeledah rumah para pemimpin PNI itu telah menjadi bahan pembicaraan penting, bahkan telah diajukan suatu mosi kepada pemerintah untuk segera memberikan keterangannya atas tindakan-tindakannya itu; mosi itu adalah beradal dari Kusumo Utoyo cs, dan yang diajukan pada 3 Januari 1930. Adapun bunyi lengkap mosi Kusumo Utoyo cs itu adalah sebagai berikut

> "College van Gedelegeerden".
>
> mengingati tidak aman hati yang terbangkit di antara segala golongan penduduk karena perbuatan menentang beberapa perhimpunan nasionalist; mempersilahkan pemerintah seboleh – bolehnya pada hari pembukaan persidangan Volksraad di muka ini, pada 10 Januari yang akan datang, sudah memberi keterangan kepada Majelis tentang pertimbangan-pertimbangan yang telah menjadikan sebab bagi pemerintah akan melakukan perbuatan ini dan tentang hasil-hasil umum daripada pemeriksaan polisi yang telah dilakukan".[5])

Dengan jelas di dalam mosi dikatakan tentang adanya rasa tidak aman di kalangan rakyat karena tindakan-tindakan penggeledahan polisi terhadap para aktifis PNI itu. Ketidaktentraman yang terdapat di dalam masyarakat itu

dinyatakan lagi oleh anggota Volksraad Kusumo Utoyo ketika dia memberikan pemandangannya untuk menjelaskan mosi yang diajukannya. Dia berkata sebagai berikut:

> "Tuan Voorzitter! Sebagai telah dinyatakan dengan terangnya di dalam motie, perkara-perkara yang telah kejadian lantaran dari perbuatan pemerintahan dan polisi pada masa yang akhir-akhir itu telah menimbulkan sesuatu perasaan hati yang tidak arnan. Orang idak tahu, apakah sesungguhnya yang telah menjadikan perbuatan yang luas ini, dan orang tidak mengetahui juga maksud Pemerintah dengan perbuatan itu. Apakah aksi ini hanya ditujukan kepada PNI, ialah Partij Nasional Indonesia, atau apakah maksud pemerintahan dan polisi akan melakukan sesuatu pengawasan juga kepada perhimpunan-perhimpunan Bumiputera yang sangat sederhana haluannya?"[6])

Sementara itu Muhammad Husni Thamrin juga telah memberikan reaksinya yang sangat keras terhadap tindakan-tindakan pemerintah yang melakukan penggeledahan ter-hadap para pemimpin PNI itu. Demikian kerasnya, sehingga di dalam persidangan yang diadakan 27 Januari 1930 itu telah terjadi perdebatan yang sengit antara Muhammad Husni Thamrin, sebagai pembicara, dengan wakil pemerintah. Pada kesempatan itu Muhammad Husni Thamrin antara lain berkata

> "Perbuatan Pemerintah itu, kami akan berkata saja. sungguhpun menurut wet, tetapi tidak benar dan tidak perlu adanya.
>
> Oleh karenanya, Tuan Voorzitter, maka kita percaya bahwa kritiek-kritiek yang telah dilakukan atas penggeledahan yang baru kejadian itu akan diberi taksiran harga yang sepatutnya oleh Pemerintah. Dengan hal yang demikian itu Pemerintah akan mesti merasa dan mengakui, bahwa penggeledahan-penggeledahan yang begitu luas dan dengan alasan sebab-sebab yang hingga kini telah dinyatakan olehnya, bukan saja penggeledahan-penggeledahan yang demikian itu tidak dapat ditanggung jawab atasnya, malahan telah mendapat sifat provocatie, sifat memancing-mancing adanya". [7])

Penggunaan kata *provocatie* oleh Muhammad Husni Thamrin pada saat itu juga telah menimbulkan protes dari wakil pemerintah yang hadir. Wakil pemerintah, melalui ketua, telah meminta kepada Muhammad Husni Thamrin untuk menarik kembali perkataan *provocatie* itu. Akan tetapi Muhammad Husni Thamrin menjawab bahwa perkataan yang digunakannya itu serupa dengan apa yang telah digunakan oleh wakil pemerintah.[8]) Selanjutnya di dalam kesempatan itu Muhammad Husni Thamrin juga telah menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan perintah penggeledahan itu, para pelaksana telah melakukan penyelewengan-penyelewengan karena juga telah melakukan penggeledahan terhadap orang-orang yang bukan PNI, misalnya terhadap orang-orang Muhammadiyah.[9])

Penggeledahan – penggeledahan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama ditujukan kepada para pemimpin PNI, memang sangat luas jangkauan wilayahnya dan berkali-kali dilakukan. Sehubungan dengan hal ini, Muhammad Husni Thamrin telah mengemukakan angka-angka, di depan sidang Volksraad, sebagai berikut:

> "Betawi 50 penggeledahan, Bandung 41 penggeledahan, Cheribon 24 penggeledahan, Pekalongan 42 penggeledahan, Sukabumi dan Cianjur 31 penggeledahan, Solo 11, Kudus 6, Jogya 35 penggeledahan, Padang 2, Medan 25, Semarang 30, Tebing Tinggi tidak terkenal banyaknya, Pangkalan Brandan 12, Krawang 25, Serang semua orang yang menjalankan politik digeledah rumahnya, Garut 20, Malang tidak terkenal, Blitar idem, Palembang idem, Gresik 6, Bogor 20, Surabaya ditaksir 20, Teluk Betung tidak terkenal banyaknya, Banjarma-sin 5 (lihatlah Soeloeh Rakyat Indonesia No.1 tertanggal 1 Januari 1930), Lubukpakam dan Galang pada 2 rumah sekolah B.a., Tanjong Balei rupa-rupa penggeledahan rumah, Medan 25, Siantar 8, Pangkalan Brandan 12, Makassar 28, Binjei 5 dan sekitarnya 3 (lihat-lah Bat. Nwbl. 31 Desember 1929).[10])

Penangkapan-penangkapan terhadap tokoh-tokoh PNI pada akhimya dilakukan sebagai realisasi dari tindakan-tindakan

berbentuk penggeledahan. Bung Karno dan beberapa orang kawannya kemudian ditangkap untuk kemudian diajukan ke depan pengadilan di Bandung.

Ketika penggeledahan, dan untuk kemudian dilanjutkan dengan penangkapan-penangkapan itu, keadaan Hindia Belanda memang mengalaini kegoncangan sebagai akibat dari depresi ekonomi yang terjadi pada akhir 1929. Sebagaimana diketahui, depresi ekonomi dunia ini telah mendorong Pemerintah Hindia Belanda untuk mengambil tindakan-tindakan "pengamanan", baik yang bersifat politis maupun ekonomis. Tindakan yang mereka jalankan itu ialah menangkap dan memenjarakan orang yang dituduh sebagai biang keladi pemberontakan seperti Bung Karno dan kawan-kawannya. Dengan demikian mereka berharap akan dapat dihindarkan terjadinya pemberontakan oleh rakyat, yang justru paling menderita akibat depresi itu.[11]) Sedang di bidang ekonomi pemerintah Hindia Belanda telah menjalankan tindakan penghematan, an tara lain dalam bentuk penurunan gaji para pegawai negeri dan buruh. Akan tetapi kedua tindakan ini justru membawa akibat sampingan yang makin meruwetkan keadaan. Penangkapan terhadap diri Bung Karno tidaklah meredakan keadaan genting ketika itu, dan pergerakan menuju kemerdekaan tidak terhenti olehnya. Selanjutnya tindakan penghematan berupa penurunan gaji pegawai saja. buruh mengakibatkan terjadinya pembe-rontakan di atas kapal perang *Zeven Provincien,* yang dilakukan para kelasi bumiputra, kapal perang inipada tahun 1933. Dalam salah satu pidatonya di depan *Volksraad,* 1934, ketika menilai situasi yang dihadapi dan keadaan pada masa beberapa tahun yang lalu, Muhammad Husni Thamrin telah memberikan peringatan kepada pemerintah akan kemungkinan terjadinya pemberontakan-pemberontakan dalam bentuk yang lebih teratur, sebagaimana halnya yang telah dilakukan para awak kapal *Zeven Provincien* itu.[12])

Demikianlah, sejak awal Muhammad Husni Thamrin menjadi anggota *Volksraad.* dia harus tnenghadapi pelbagai persoalan yang lahir oleh karena adanya situasi "genting dan ruwet" yang terjadi ketika itu. Akan tetapi tampak dengan jelas

bahwa, sebagai tokoh pergerakan, dia telah siap untuk menghadapinya.

Sementara itu pergerakan nasional tetap berjalan, dan dari mereka telah terjadi kontak-kontak untuk menggabungkan diri dalam satu partai. Yang kita maksudkan ialah langkah-langkah yang diambil oleh Dr. Sutomo untuk menggabungkan Partai Bangsa Indonesia dengan Budi Utomo; usaha ini berhasil dengan digabungkannya kedua partai itu dengan nama: Partai Indonesia Raya, atau lebih terkenal dengan nama singkatnya: Parindra. Pada mulanya Parindra hanya terdiri dari dua partai PEI dan Budi Utomo; tetapi kemudian dia dapat menarik perhatian dari pemimpin partai atau organisasi kedaerahan lainnya. Sehubungan dengan organisasi ini maka di dalam pertumbuhannya kelak dapat memunculkan cukup banyak pemimpin yang "terkemuka", salah satu di antaranya ialah Muhammad Husni Thamrin; di dalam kepengurusan partai ini dia menduduki jabatan penting, yaitu sebagai ketua departemen politik.

Penggabungan kedua partai/organisasi itu, Budi Utomo dan PBI menunjukkan adanya perubahan sikap dan cara berfikir dari kedua organisasi itu. Sebagaimana diketahui, tadinya Budi Utomo hanyalah merupakan organisasi priyayi dan keJawaan. Dan pada awal kelahirannya, partai ini memang didominasi oleh golongan tua dan priyayi. Akan tetapi di dalam tubuhnya juga terdapat anak-anak muda yang berfikiran radikal, seperti Cipto Mangunkusumo. Golongan ini menghendaki agar Budi Utomo bergerak penuh di bidang politik. Akan tetapi pemikiran maju dari para pemimpin Budi Utomo sudah mulai nampak dalam keputusannya pada bulan April. Karena dalam keputusan ditetapkan untuk membuka Budi Utomo bagi seluruh golongan bangsa Indonesia. Dan sejak itu terbukalah Budi Utomo bagi masuknya semua golongan bangsa Indonesia.[13]) PBI demikian pula halnya. Organisasi ini tadinya berasal dari *Studie Club Surabaya* kemudian mengubah dirinya menjadi sebuah organisasi partai dengan nama Persatuan Bangsa Indonesia. Dalam perkembangannya kemudian Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) dapat menjadi sebuah partai

yang "cukup berarti" sehingga mampu menarik perhatian masyarakat yang lebih luas. Sikapnya terhadap pemerintah pun tidaklah selalu kooperasi, akan tetapi juga terkadang bersikap non-kooperasi. Sebagai suatu contoh ialah sikapnya terhactap *Volksraad,* pada tahun 1932. Ketika itu PBI bersikap non-koperasi terhadap lembaga ini karena sikap pemerintah terhadap PNI.[14])

Demikianlah, akhirnya Budi Utomo dan PBI membuka diri untuk menerima gagasan-gagasan yang lebih luas; bahkan untuk itu partai ini bersedia untuk melebur diri, menghilangkan identitas namanya, yaitu dengan melebur diri ke dalam satu partai baru dengan nama baru pula, yaitu nama yang mencita-citakan bangun sebuah Indonesia Raya di (bekas) jajahan Belanda bernama Hindia Belanda.

Untuk menyelusuri lahirnya, dan sambutan orang terhadapnya, maka ada baiknya kita mendengar pidato sambutan Dr. Sutomo di dalam resepsi penggabungan Budi Utomo dengan PBI di Solo. Menurut Dr. Sutomo, lahirnya dan sambutan orang terhadapnya, tidak lain adalah karena peranan nasionalisme; dan menurut Dr. Sutomo nasionalisme adalah lawan dari imperialisme. Walaupun begitu, ada kalanya kedua hal yang berlawanan ini dapat beketjasama, misalnya dalam hal-hal yang praktis seperti kesehatan, bidang kesejahteraan, pendidikan dan lain-lain.

Ketika Dr. Sutomo menyinggung sifat nasionalisme yang dianut oleh Parindra sebagai partai politik, maka antara lain dia berkata:

> "Adapun sifat nasionalisme umum itu ialah ....., 2 hak politik dan pengaruh politik, 3 mendapat ketentuan yang tertentu wet-wet yang melindungi kemajuan sebagai bangsa.
>
> Tetapi sifat khusus dari Parindra ialah begini: Partai ini partai kebangsaan sebulatnya anggotanya cocok dengan keadaan masyarakat kita, artinya terdiri dari berjenis golongan bangsa kita, dari tani yang miskin pengetahuan dan miskin harta, sampai kepada kaum pertengahan, kaum terpelajar dan kaum bangsawan.
>
> Parindra bekerja dan berusaha menuju, bermaksud perbaikannya berjenis golongan itu yang sekiranya akan

menguntungkan atau setidak-tidaknya tidak akan merugikan golongan yang lainnya."[15])

Dari keterangan tersebut nampak bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh Parindra ialah untuk mempersatukan semua golongan masyarakat yang ada di Hindia Belanda, dengan landasan nasionalisme.

Di dalam perkembangannya kemudian,Partindo berkembang menjadi sebuah partai yang cukup berpengaruh di kalangan masyarakat. Beberapa organisasi kemudian melebur diri ke dalam Parindra, seperti Sarekat Sumatera, Partai Sarekat Selebes, dan juga Kaum Betawi. Pertumbuhannya menjangkau hampir seluruh Indonesia. Pada mulanya partai ini dapat mendirikan 53 cabang dengan 2.425 orang anggota. Pada tahun 1936 partai ini melakukan banyak kegiatan, antara lain dalam bentuk rapat-rapat umum yang bertujuan untuk mempropagandakan azas – azasnya kepada masyarakat umum.16)

Ada hal yang cukup menarik dari partai ini, yaitu pernyataannya yang menyangkut golongan petani. Parindra beranggapan bahwa kedudukan petani sangat penting di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini dinyatakan oleh Dr. Sutomo dalam kata-kata sebagai berikut:

> "Dasar daripada masyarakat kita ini, ialah kaum tani. Kaum inilah sesungguhnya yang dimaksud marhaen itu, karena melarat segala-galanya. Ke arah ini Parindra harus banyak mengeluarkan tenaga bekerjanya meneruskan yang sudah dijalankan, pun pula berusaha tentang imigrasi. Kepadanya tidak lupa dituntun tentang kooperasi berjenis rupa.
>
> Supaya dengan bekerja memperbaiki kalangan rakyat jelata ini, dapatlah mereka itu ketingkatan yang lebih tinggi. faedah guna mendatangkan Indonesia Mulia".[17])

Jika kita memperhatikan perkembangan Parindra sejak awal, maka nampak bahwa di dalam partai ini telah bergabung sekian banyak tokoh berkaliber nasional, seperti Dr. Sutomo, Dr. Ratulangi. dan juga Muhammad Husni Thamrin. Di dalam kepengurusan partai ini, Muhammad Husni Thamrin telah

memegang fungsi cukup penting dalam kelangsungan roda kehidupan dari Parindra, Muhammad Husni Thamrin mendu-duki jabatan sebagai ketua Departemen Politik.

Kemunculannya sebagai salah seorang pemimpin "utama" Parindra menuntut kemampuan kegiatan yang lebih besar daripadanya. Sebab sebagai Partai baru yang bercita-cita besar un-tuk mencapai suatu negara Indonesia Raya sebagaimana yang tercantum di dalam anggaran dasarnya, pasal 2,[18]) maka sudah barang tentu Parindra harus bergiat untuk mempropagandakan cita-citanya itu. Salah seorang pemimpin andalannya untuk mencapai itu semua, ialah Muhammad Husni Thamrin.

Kemunculan Muhammad Husni Thamrin sebagai salah seorang pemimpin utama Parindra, sebenarnya bukanlah sesuatu yang tiba-tiba, bukan sesuatu yang bersifat kebetulan. Karena tingkah laku politiknya, sejak lama telah membuka jalan baginya untuk muncul sebagai salah seorang pemimpin utama Parindra, Hal ini kita Uhat misalnya tindakan dan inisiatifnya untuk membentuk sebuah kekuatan nasionalistis di dalam *Volksraad.* yakni dengan melalui pembentukan apa yang terkenal dengan nama Fraksi Nasional. Di dalam pertumbuhannya, kekuatan ini dapat mempunyai pengaruh yang cukup besar di *Volksraad,* walaupun anggota mereka hanya terdiri dari 10 orang saja.

Alasan yang mendorong Muhammad Husni Thamrin untuk membentuk Fraksi Nasional ialah: 1. Sikap pemerintah Hindia Belanda terhadap gerakan politik di luar *Volksraad,* terutama terhadap PNI; 2. Anggapan dan perlakuan yang sarna oleh pemerintah terhadap semua gerakan nasional baik non maupun kooperasi. Terutama dalam peristiwa peng-geledahan tokoh-tokoh PNI yang juga dilakukan terhadap anggota-anggota perkumpulan yang bersifat moderat dan bersifat koperasi; 3. Didirikannya *Vaderlandsche* Club (VC) pada tahun 1929 sebagai protes terhadap *athisch beleid* Gubernur Jenderal de Graef.[19]) Sedang tujuan yang ingin dicapai oleh Fraksi Nasional ini ialah untuk mewujudkan Indonesia Merdeka yang sedapat mungkin dilakukan dalam waktu yang selekas-lekasnya. Tentang hal ini

Muhammad Husni Thamrin di dalam pidatonya di depan Volksraad pada 27 Januari 1930, telah menyatakan antara lain:

> "art.1. Nationale Fractie menghendaki supaya Indonesia merdeka seberapa boleh dengan selekas-lekasnya.
>
> art. II. Maksud ini diusahakan tercapainya:
>
> a.. dengan jalan mengusahakan kejadiannya perubahan perubahan peraturan kerajaan.
>
> b. dengan jalan mengusahakan terhapusnya segala perbedaan politik, ekonomis dan intelektuil, yang kejadiannya daripada sifat pertentangan yang ada di negeri jajahan;
>
> c. dengan jalan mempergunakan segala daya upaya yang halal yang patut buat perkara itu."20)

Adapun para anggota dari fraksi ini, ialah Kusumo Utoyo, Dwijosewoyo, Datuk Kayo, Mokhtar, Nya Arief, Soangkopon, Pangeran Ali, Suradi, Suroso dan Thamrin. Thamrin telah diangkat sebagai ketua fraksi ini. 21) Sejalan dengan situasi ketika itu, maka langkah awal yang dilakukan oleh Fraksi Nationale ini ialah mengadakan pembelaan terhadap tindakan-tindakan penggeledahan terhadap para pemimpin nasionalis "kiri", terutama PNI. Sebagaimana telah disinggung di atas, ketika para pemimpin PNI mengalami penggeledahan oleh pemerintah kolonial karena kegiatan-kegiatannya dianggap membahayakan pemerintah, dipandang telah melakukan aksi-aksi politis yang membahayakan ketentramam umum.

Langkah penting lainnya ialah mengadakan oposisi terhadap peraturan pemerintah kolonial yang menyangkut pendidikan, yaitu apa yang terkenal dengan "Ordonansi Sekolah Liar". Tindakan ini jelas akan sangat merugikan bangsa Indonesia, dan hal ini tentu sudah diperhitungkan sedemikian rupa oleh mereka. Tujuan mereka jelas untuk memberikan pukulan terhadap salah satu alat utama pergerakan bangsa Indonesia ketika itu.

Dengan ordonansi itu pemerintah (kolonial) diberi kuasa untuk mengatur wujud dan isi sekolah-sekolah partikelir yang oleh mereka dianggap liar; karena dalam pengertian mereka sekolah-

sekolah yang tidak dibiayai oleh pemerintah dan dikelola oleh bangsa Indonesia adalah liar. Dengan sendirinya tindakan pemerintah ini sangat merugikan pergerakan kebangsaan kita yang bertujuan untuk mencapai Indonesia merdeka. Sebab bagaimana pun juga sekolah-sekolah yang dikelola oleh golongan pribumi adalah merupakan sumber utama daripada bertumbuh dan berkembangnya "kesadaran" untuk membangun sebuah negara di wilayah Hindia Belanda dengan nama: Indonesia; atau singkatnya sekolah-sekolah partikelir asuhan golongan pribumi adalah merupakan "dapur" nasionalisme dan atau kesadaran nasional. Dalam menghadapi tindakan pemerintah melalui ordonansinya itu, tampaknya para pemimpin pergerakan nasional dapat mempersatukan pikiran dan tindakan mereka. Mereka nampaknya bersedia melupakan pertentangan di antara mereka. Baik golongan nasionalis "kiri" maupun golongan nasionalis kanan secara bulat menentang ordonansi ini, dan berseru secara bersama agar ordonansi segera dicabut. Sehubungan dengan hal ini, peranan Muhammad Husni Thamrin sangat penting artinya. Dia melakukan tuntutan melalui *Volksraad* agar supaya ordonansi ini segera dicabut. Bahkan demikian tegasnya menghadapi ordonansi ini, sampai-sampai Muhammad Husni Thamrin mengancam untuk mengundurkan diri sebagai anggota *Volksraad* jika ordonansi ini tidak dibatalkan.[22])

Menghadapi tantangan dari kaum pergerakan ini, maka pihak pemerintah kolonial nampaknya bertindak cukup hati-hati. Untuk itu Menteri Jajahan De Graaff telah meme-rintahkan kepada gubernur jendral agar menghadapi oposisi terhadap ordonansi itu dengan "semangat menyesuaikan diri",23) Untuk itu pemerintah kolonial telah melakukan pendekatan terhadap pemimpin pergerakan nasional yang bergerak di bidang pendidikan seperti Ki Hajar Dewantoro,24) Dengan adanya tindakan-tindakan secara bersama dari kaum pergerakan itu, pemerintah kolonial telah mundur dan terpaksa membatalkan ordonansinya tersebut.

Dari keterangan di atas terlihat kita bahwa tingkah laku Husni Thamrin sebagai seorang politikus kaliber nasional telah

dimulainya jauh sebelum terbentuknya Parindra, di mana dia telah muncul sebagai salah seorang pemimpin utamanya.

Sementara itu pergerakan nasional tetap berlangsung dengan segala cara yang mungkin dapat ditempuh. Sehubungan dengan itu di dalam *Volksraad* telah terjadi beberapa tindakan yang berusaha untuk mewujudkan cita-cita kaum pergerakan nasional. Salah satu langkah yang dimaksud ialah lahirnya apa yang kini dikenal dengan nama Petisi Sutarjo. Usul petisi ini diajukan oleh Sutarjo Kartohadikusumo yang didukung oleh beberapa anggota *Volksraad* terkemuka lainnya, seperti IJ Kasimo, Ratulangi dan lain-lain. Petisi yang diajukan pada 15 Juli 1936 itu berisi permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan Negeri Belanda di mana anggota-anggotanya mempunyai hak yang sarna. Tujuannya adalah untuk menyusun suatu rencana yang isinya adalah pemberian kepada Indonesia suatu pemerintahan sendiri dalam batas pasal 1 Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda. Pelaksanaannya akan dijalankan secara berangsur-angsur dalam waktu 10 tahun atau dalam waktu yang akan ditetapkan kemudian oleh sidang permusyawaratan itu.[25]) Tentu saja langkah ini menimbulkan pelbagai reaksi, baik yang bernada setuju maupun yang bersifat menolak. Perbedaan pendapat seperti ini juga terjadi di kalangan kaum pergerakan yang berada di dalam *Volksraad.* Dalam hubungannya dengan Muhammad Husni Thamrin. petisi ini ditolaknya karena isinya dianggapnya sangat lemah. 26) Karena adanya perbedaan pendapat di antara para anggota*Volksraad* itu, maka ketika diadakan pemungutan suara, yang menerimanya hanyalah 26 orang, dan yang menolaknya 20 orang.[27])

Walaupun banyak yang menentang, namun para penyokong Petisi ini tetap berusaha untuk menyebarluaskan kegiatan mereka kepada masyarakat luas. Salah satu langkahnya ialah membentuk *Central Comite Petisi Sutarjo* (CCPS) yang dilakukan pada 4 Oktober 1937. Sedang di daerah-daerah dibentuk cabang *Comite Petisi Sutarjo.*

Kegiatan dari CCPS dan cabang-cabangnya ialah melakukan rapat-rapat umum untuk memperoleh sokongan dari masyarakat luas. Antara lain misalnya mengadakan rapat

bersama di antara partai-partai politik dan rapat-rapat umum terbuka.

Walaupun kegiatan-kegiatan dari para penyokong Petisi ini, yang tentu dimaksudkan untuk memperoleh dukungan yang selebar-lebarnya agar dapat memberikan pengaruh kepada sikap pemerintah kolonial, namun pemerintah kolonial bersikap lain, yaitu menolak petisi ini. Penolakan itu dikeluarkan pada tanggal 16 Nopember 1938. Alasan yang dikemukakan oleh pemerintah Belanda ialah:

1. bahwa pengharapan daiam petisi itu tidak membuat keterangan yang jelas tentang maksud dan tujuannya yang seimbang dengan besarnya arti dari apa yang diharapkannya, sedang konferensi imperial yang diharapkan dalam konferensi itu adalah bertentangan dengan *staatsrecht* yang sekarang masih berlaku dalam kerajaan;
2. bahwa dengan alasan ini saja pengharapan dapat petisi itu tidaklah dapat diperolehnya.
3. bahwa artikel 1 daripada Grondwet sarna sekali tidak memuat keterangan yang manapun juga tentang hak berdiri sendiri dari Hindia – Nederland dalam lingkungan Kerajaan Nederland yang dipunyai ataupun yang dapat diharapkan akan mendapatnya.[28])

Jika kita memperhatikan situasi yang ada dan berkembang sehubungan Petisi Sutarjo ini, maka alasan penolakan yang diajukan oleh pemerintah kolonial seperti di atas, maka kita dapat menyangka bahwa hal-hal yang di atas bukan alasan yang terkuat. Sehubungan dengan itu, dapat diduga bahwa alasan penolakan itu, walaupun ini tidak dinyatakan secara tersurat, bahwa penolakan itu bersumber dari keadaan pergerakan sendiri di dalam menghadapi petisi ini. Yang kita maksudkan ialah bahwa partai-partai politik dan kaum pergerakan umumnya tidaklah memberikan dukungan secara bulat; bahkan pecah dalam lingkungan pro dan kontra.

Tentu saja kenyataan ini membuka kemungkinan kepada pemerintah kolonial untuk menilai ketidak kompakan golongan pergerakan sebagai sesuatu kelemahan yang dapat mendorongnya untuk menganggap Petisi Sutarjo sebagai suatu tindakan politik yang dapat "diremehkan". Dalam kenyataannya memang demikian, karena pada akhirnya petisi ini mengalami nasib sial, dia ditolak oleh Pemerintah Kolonial Belanda.

Sementara itu Parindra tetap giat manjadikan dirinya sebagai salah satu partai yang cukup berarti ketika itu. Partai ini tetap berusaha untuk memperluas jangkauan pengaruhnya di kalangan masyarakat dan juga berusaha untuk mengkonsolidasikan dirinya. Sejalan dengan itu maka pada tahun 1937, tepatnya 15-17 Mei, Parindra melangsungkan kongresnya yang pertama. Perhatian organisasi-organisasi lainnya terhadap pelaksanaan Kongres Parindra ini sangatlah besarnya; ini dapat dibuktikan dengan datangnya sekian puluh organisasi lain untuk menghadiri resepsi pembukaannya, demikian pula kawat-kawat yang mengucapkan selamat atas diselenggara-kannya Kongres Parindra tersebut. Peranan Muhammad Husni Thamrin di dalam kongres ini sangatlah besarnya, karena kedudukannya ketika itu adalah sebagai *hoofdcomite.*Sebagai *hoofdcomite* dia telah membuka kongres itu dengan memberikan suatu pidato yang memberikan gambaran tentang keadaan Parinda ketika itu. Dalam pidatonya itu antara lain dia telah membentangkan kemajuan-kemajuan yang telah diperoleh Parinda sejak ia didirikan.

Dalam pidato pembukaannya, Muhammad Husni Thamrin antara lain berkata:

> "Antara beberapa perhimpunan perhimpunan di Indonesia maka pada masa ini Partai Indonesia Raya menjadi partai politik yang berarti di Indonesia.
>
> Dengan mengutip perkataan ini bukan kami hendak melupakan atau mengecilkan lain-lain perhim-punan.
>
> Benar kita mempunyai puluhan perhimpunan-perhimpunan sosial, puluhan perhimpunan-perhimpunan kebudayaan, puluhan perhimpunan-perhimpunan vakve-reenigingen, puluhan

perhimpunan-perhimpunan pemuda, ratusan perkumpulan cooperasi dan mereka itu juga berbuat politik, mengikut dan memperhatikan tetapi dalam paham kami susah mereka itu dinamakan politi eke partily, oleh karena yang ditujukan diprogramnya bukan terutama berdasar atas pokok-pokok politik, akan tetapi ada yang tertulis dalam programnya masing-masing yaitu terutama memperhatikan kulturil, ekonomis, atau vakbelangen."[29])

Beberapa bulan kemudian setelah kongres Parindra yang pertama itu, Muhammad Husni Thamrin, sebagai wakil pengurus besar (PB) Parindra, telah mengadakan perjalanan ke daerah-daerah untuk meninjau keadaan Parindra di daerah-daerah tersebut; antara lain dia mengunjungi Kalimantan Selatan dan Sulawesi, yaitu di Kota Makasar. Di kedua tempat ini Muhammad Husni Thamrin telah menga-dakan pelbagai pertemuan dan rapat partai. Banyak persoalan politik telah dikemukakannya di dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan itu.[30])

Pada tahun 1939, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, dalam kedudukannya sebagai anggota *Volksraad,* Muhammad Husni Thamrin, bersama rekan-rekannya yang lain telah mengajukan suatu mosi yang menyangkut pengadaan pendidikan sastra di Indonesia.

Dalam mosi itu diharapkan agar selambat-lambatnya pada tahun 1940, sebuah Fakultas Sastra sudah dapat didirikan. Mosi ini disetujui dengan perbandingan suara 29 lawan 17 suara.31) Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Muhammad Husni Thamrin adalah salah seorang "pencipta" lahirnya pendidikan tinggi di bidang sastra.

Memasuki tahun 1939, Muhammad Husni Thamrin agaknya makin menggiatkan diri untuk mencari jalan guna menghimpun semua kekuatan-kekuatan sosial-politik dalam satu wadah yang dapat menciptakan suatu gagasan bersama. Usaha ini pada akhirnya dapat berwujud dengan dibentuknya apa yang kita kenai dengan nama Gabungan Politik Indonesia (GAPI).

Pembentukan organisasi ini didorong oleh inisiatif Muhammad Husni Thamrin. Dialah yang mengundang para

pengurus organisasi sosial-politik untuk menghadiri rapat yang bertujuan untuk menjajaki kemungkinan pendirian suatu organisasi yang mampu menciptakan persatuan. Dialah yang memimpin sidang dari rapat yang diadakan itu. Dalam rapat itu telah dilakukan pembicaraan mendalam tentang situasi perpolitikan dan kemungkinannya mendirikan sebuah wadah yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Dalam kata pembukaannya, sebagai pimpinan pertemuan, Muhammad Husni Thamrin telah menguraikan secara singkat tentang pertumbuhan usaha-usaha untuk menciptakan suatu wadah konsentrasi kekuatan kaum pergerakan. Disinggungnya *Radicale Concentratie* di dalam *Vo,Iksraad All Indian* Co*ngres*, dan kemudian PPPKI.

Dalam pembukaan itu, juga ia berkata,

> "Sebab sudah nyata sekali, bahwa maksud yang suci untuk mengadakan badan persatuan untuk bekerja bersama-sama buat memperkatakan nasib rakyat, mempelajari soal-soal rakyat dan membangunkan persatuan aksi. Memang tak dapat dibantah dan disangkal lagi bahwa badan yang demikian itu besar sekali gunanya, sebab itulah kita dapat memperdekatkan perhimpunan satu sama lain, bekerja bersama-sama menjauhkan perselisihan dan percekcokan.
>
> Biarpun jalan-jalan dan cara bekerja berlain-lainan, tetapi tiap-tiap perhimpunan Indonesia maksudnya satu, yaitu untuk memuliakan bangsa dan nusa dan untuk mencapai kemerdekaan rakyat Indonesia."[32])

Dari keterangan di atas nampak bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh Muhammad Husni Thamrin dengan usahanya itu ialah untuk menciptakan persatuan di kalangan kaum pergerakan, yang ketika itu memang "terpecah-pecah". Setelah dibentuk, maka susunan pengurusnya pun diadakan. Untuk periode pertama kepemimpinan GAPI berada di tangan Muhammad Husni Thamrin, Mr. Amir Syarifuddin, dan Abikusno Cokrosuyoso. Segera setelah dapat bekerja, maka program aksi GAPI ialah Indonesia berparlemen. Dengan aksi politik Indonesia ber-parlemen itu, maka GAPI bertujuan untuk mewujudkan cita-citanya yang tercantum di dalam anggaran dasarnya (pasal

2) yaitu hak untuk menentukan dan mengurus nasib bangsa sendiri.[33]) Untuk mencapai itu ditempuh jalan "berangsur" yaitu dengan menciptakan sebuah parlemen sejati dan pemerintah yang bertanggungjawab kepada parlemen.[34])

Untuk mencapai tujuan itu, banyak langkah yang telah dilakukan oleh para pengurus GAPI, dan salah satu yang terpenting ialah diadakannya suatu kongres yang dihadiri oleh pelbagai pihak dan organisasi, yaitu Kongres Rakyat Indonesia (KRI) dengan tema Indonesia Berparlemen. Salah satu keputusan penting dari KRI ialah penetapan bendera Merah Putih dan lagu Indonesia Raya sebagai bendera dan lagu persatuan bangsa Indonesia. 35) Dalam pandangan para pendukung aksi GAPI itu, parlemen yang ditujunya itu adalah alat yang' terbaik untuk mencapai tujuannya. "Sebab tidak ada lain alat lagi. melainkan alat demikian itu yang dapat membawa Rakyat Indonesia ke arah kemuliaan.[36])

Akan tetapi nampaknya alasan yang dikemukakan oleh para pemimpin GAPI tidak juga dapat diterima oleh pemerintah kolonial. Reaksi yang datang dari mereka adalah tetap "negatip". Mereka tetap beranggapan bahwa bangsa Indonesia belum juga "matang," untuk berdiri sendiri. Hal yang demikian ini dikatakan oleh Menteri Jajahan Walter. Oleh menteri ini aksi yang dilakukan oleh GAPI itu hanyalah merupakan aksi dari sekelompok kecil kaum terpelajar Indonesia yang merasa sudah cukup mampu untuk memegang tanggung jawab pemerintahan. [37])

Menjawab langkah-langkah GAPI jtu pemerintah kolonial Belanda membentuk sebuah komisi yang bertugas untuk *menye*lidiki kemungkinan-kemungkinan perubahan ketata-negaraan, yaitu yang terkenal dengan nama Komisi Visman. Komisi ini telah melakukan pelbagai hubungan dan wawancara dengan pihak-pihak yang dianggapnya perlu dan penting. Tetapi golongan radikal tidak diajaknya berbicara. Akan tetapi hasilnya baru dapat diserahkan pada tahun 1942, beberapa saat sebelum berkuasanya Jepang di Indonesia. Tetapi hasilnya, tidak lebih dari "gumpalan-gumpalan kebo-hongan", sebagaimana yang

dikatakan oleh Dr. WF Wertheim yang merupakan salah seorang anggota komisi ini. [38])

Dari gambaran yang dikemukakan di atas, nampaklah kepada kita bahwa Muhammad Husni Thamrin telah muncul sebagai salah seorang tokoh terkemuka dalam pergerakan rakyat Indonesia. Beliau telah memulainya sebagai tokoh Kaum Betawi, untuk kemudian sampai ke tokoh nasional Indonesia.

DAFTAR CATATAN BAB IV

1) I Nyoman Dekker, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia,* Lembaga Penerbitan Almamater YPTP-IKIP Malang, Malang, 1975, hal. 56.

2) K.M. Pannikar, *:Asia* And *Western Dominance,* George Allen & Unwin.LTD, London, 1959, hal. 321.

3) S.L. van der Wal. *Pendidikan* di *Indonesia 1900-1940 Kebijaksanaan Pendidikan* di *Hindia Belanda 1900-1940.* Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Badan Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta, 1977, hal. 136-7.

4) "Medan -Incident Toean Thamin! Toean soedah rasai sendiri sekarang", *Seroean Kita,* 8 Desember 1939, hal.443.

5) Motie Koesoemo Oetojo C.s. Tentang Tidak Aman Hati di antara pendoedoek negeri (dimadjoekan kepada persidangan Collbge van Gedelegeerden daripada Yolksraad pada 3 Januari 1930 *di dalam HOS Tjoktoaminoto, Sedjarah Pergerakan Indonesia* 1929-1930. Pembitjaraan-pembitjaraan Di Yolksraad, jilid I.Fonds National, 1930, hal. 1.

6) *Ibid.*

7) *Ibid*, hal. 19

8) *Ibid.*

9) *Ibid.,* hal. 23

9) *Ibid.,* hal. 23

10) *Ibid.*

11) Adam Malik, *Mengabdi Republik Adam Dari Andalas,* jilid I, Gunung Agung, Jakarta, 1978, hal. 168.

12) *Pidato M.H. Thamrin Pada Tanggal13 Juli* 1934.

13) Pipitseputro, *Beberapa Aspek dari Sejarah Indonesia,* Nusa Indah, Ende Flores, 1973, hal. 211. 1973, hal. 211.

14) A.K. Pringgodigdo, *Sedjarah Pergerakan Rakyat Indonesia,* Dian Rakyat, hal. 115.

15) *Soeara Oemoem,* Extra-Blad, Sabtoe, 28 December 1935. 16) A.K. Pringgodigdo, *op.cit.,* hal. 117.

17) "Soeara Oemoem", *loc.cit.*

18) A.K. Pringgodigdo, *op.cit.,* hal. 116.

19) Sartono Kartodirdjo dkk, (ed. Umum), *Sejarah Nasional Indonesia,* (jilid V), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1976, hal. 222.

20) H.O.S. Tjokroaminoto, *op.cit.,* hal. 12.

21) *Ibid.*

22) Sartono Kartodirdjo, dkk (ed. *umum),op.,cit.* hal. 225.

23) S.L. van der Wail, *op.cit.,* hal. 186.

24) *Ibid.,* hal. 172.

25) Sartono Kartodirdjo, dkk (ed. umum), *op.cU.,* hal. 226. 26) 1. Nyoman Dekker, *op.cit.,* 96.

27) Sartono Kartodirdjo, dkk. (ed. umum), *up.cit.,* hal. 229.

28) Ab. Tj., "Petitie-Soetardjo Ditolak", di dalam *Soara PSJI,* No.9, Th. ke II, Desember, 1938, hal. 145.

29) "Congres Parindra Jang Ke I Moelai tanggal 15-17 Mei 1937. Di Gedoeng Pemoefakatan Gang Kenari Djakarta-Raya",

di dalam *Soeara Parindra,* Tahoen ke II, Mei-Juni, 1937, hal. 4.

30) Untuk keterangan lebih lanjut tentang perjalanan Husni Thamrin itu, lihat laporan perjalanan di dalam *Soara Parindra,* Tahoen Ke II, September, 1937, hal. 180-189.

31) S.K. van der Wal, *op.cit.,* hal. 250.

32) "Rapat Pendirian Konsentrasi Nasional", didalam *Soeara Parindra,* 1939, hal. 121.

33) "Anggaran Dasar Dari Gaboengan Politik Indonesia", didalam *Soeara PSII,* Th. Ke III, No.2, Mei, 1939, hal. 17.

34) "Seroean GAPI Oentoek Menjadarkan Ra'jat Indonesia Atas. Isi Dan Maksoed Resoloesi Indonesia Berparle-men", didalam *Soeara Parindra,* Th. ke V, No.9, September, 1940,hal. 276.

35) Sartono Kartodirdjo, dkk, (ed. umum), *op.cit.* hal. 238.

36) Soekanto Sastrodihardjo, "Indonesia Raya ialah Indonesia Berpalemen", di dalam *Pembela Rakyat,* thn. ke I, No. 41-42,17-24, Februari, 1940.

37) "Politik Djadjahan Nederland Terhadap Indonesia. Minister Welter Anggap Indonesia Belum Cukup Matang Buat dapat baik-baik Politik lebih luas. Manifest GAPI Disesalkan. Keadaan Rakjat Tjukup Makmur", di dalam, *Pembela Rakjat,* Thn. ke L, No. 43-44,5 Maret, 1940.

38) I Nyoman Dekker, *op.cit.,* hal. 97.

BAB V PETIKAN-PETIKAN BUAH PIKIRAN

Sebagai seorang pemimpin pergerakan nasional tentulah Muhammad Husni Thamrin mempunyai pelbagai ide, pendapat yang telah menjadi landasan gerak langkahnya. Ide, pendapat itu tentulah sebagian telah diutarakannya, baik secara lisan, misalnya dalam forum *Volksraad,* di mana dia telah menjadi anggota sekian tahun, sejak tahun 1927; demikian pula ide, pendapat itu telah dituangkannya dalam pelbagai tulisannya di beberapa media massa, seperti *Soeara Parindra.* Berdasarkan sumber-sumber yang ada, Muhammad Husni Thamrin adalah seorang yang mempunyai minat di dalam hampir semua aspek kehidupan, baik itu masalah politik, ekonomi dan sosial budaya. Untuk memperoleh gambaran, walaupun hal itu pastilah tidak akan lengkap, maka pada bab ini akan diberikan petikan-petikan pendapat dari beliau; petikan itu menyangkut pada pelbagai aspek kehidupan.

Sejak penangkapan Ir. Sukamo oleh pemerintah kolonial pada tahun 1929, maka telah ramai dibicarakan di kalangan masyarakat, terutama kaum politisi. Kenyataan ini juga menjangkiti para anggota *Volksraad* karena ternyata telah mengundang anggotanya untuk memperdebatkannya. Bahkan tidak hanya perdebatan biasa, tetapi telah mengundang beberapa orang anggotanya untuk mengusulkan suatu pembicaraan istimewa terhadap kasus ini. Hal yang demikian ini telah

mendorong Koesoemo Oetojo untuk mengajukan mosi agar permasalahan diperdebatkan di dalam *Volksraad.*

Untuk jelasnya, di bawah ini dikutipkan pidato Kusumo Utoyo ketika memberikan keterangan atas mosi yang diajukannya. Kusumo Utoyo berkata :

> "Sebagai telah dinyatakan dengan terangnya di dalam mosi. perkara-perkara yang telah kejadian lantaran dari perbuatan pemerintah dan polisi pada masa yang akhir-akhir itu telah menimbulkan sesuatu perasaan hati yang tidak aman. Orang tidak tahu, apakah yang sesungguhnya telah menjadikan sebabnya perbuatan yang luas ini, dan orang tidak mengetahui juga maksud pemerintah dengan perbuatan itu. Apakah aksi ini hanya ditujukan kepada PNI, ialah Partij Nasional Indonesia atau apakah maksud pemerintahan dan polisi akan melakukan sesuatu pengawasan juga kepada perhimpunan-perhimpunan Bumiputera yang sangat seder-hana haluannya?
>
> Tidak aman hati orang adalah begitu rupa, Tuan Voorzitter. sehingga telah timbul fikirannya akan mengadakan *vergadering-vergadering openbaar* juga tentang perkara itu; tetapi kami harap, bahwa kita telah dapat mewurungkan vergadering-vergadering itu, yang di dalam perikeadaan yang ada itu hanya bisa menimbulkan kekeruhan belaka. Sekarang kita tahu juga, bahwa oleh teman anggota kita tuan Middendorp tentang perkara ini telah disampaikan suatu pertanyaan kepada Pemerintah, suatu pertanyaan, yang sungguhpun dalam ma'na umum kita dapat menyetujui, tetapi kita kuatir, Tuan Voorzitter, bahwa jawab pemerintah atas pertanyaan itu akan datang pada waktunya kita akan sangat asyik membicarakan begrooting tambahan. Oleh karena itu kita telah menimbang perlu meminta kepada Pemerintah buat melahirkan bicaranya dengan terang tentang perkara itu sebelum atau pada hari pembukaan persidangan yang kedua daripada Volksraad."[1])

Penggeledahan, penangkapan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial terhadap tokoh-tokoh pergerakan PNI, dan lain – lainnya itu, telah memancing reaksi yang keras dari Muhammad Husni Thamrin. Beliau adalah penyokong dari mosi yang diajukan oleh Kusumo Utoyo. Ketika beliau berkesempatan

untuk berbicara dalam rangka mosi itu, maka dia telah memberikan reaksinya yang cukup keras. Demikian kerasnya, sampai-sampai menimbulkan protes dari sementara pihak. Untuk memperoleh gambaran tentang sikap beliau itu, di bawah ini akan dikutipkan sebagian dari isi pidatonya itu.

"Tuan Voorzitter! Dalam pada berpindah kepada pemandangan umum, kalau seandainya disini kami melaku-kan sesuatu pangkat yang serupa dengan wakil pemerintah buat Perkara Umum, tetapi sudah tentu saja suatu pangkat daripada pergerakan Ra'yat Indonesia yang berserikat menjadi satu, maka kami hendak melahirkan suatu pidato, yang di dalam dasar maksud, pendirian dan pemilihan perkataannya sama sekali boleh dikutipkan daripada pidatonya. Wakil pemerintah yang terhormat buat Perkara Umum, yang telah dilahirkan pada 10 Januari lalu.

Kalau seandainya di sini kami melakukan pangkat itu, maka pidato itu akan berbunyi begini: Tuan Voorzitter, kita segera merasa wajib akan menyatakan artinya pangkat kita sebagai anggota Volksraad berhubung dengan penggeledahan-penggeledahan yang telah kejadian itu sebagai tanda tandanya cemburuan yang diucapkan terhadap kepada pergerakan Ra'yat pada umumnya dan kepada PNI pada khususnya. Kita telah pertimbang-timbangkan, apakah kecuali yang lain-lainnya dengan mengingati nasehat yang termaktub dalam surat berkala "Timboel", dalam perkara ini kiranya tidak lebih baik ta'usah bertukar pikiran dengan Pemerintah, yang tinggal diam yang demikian itu akan bisa berarti sebagai tanda yang nyata-nyata daripada perasaan tidak aman perasaan marah pada banyak-banyak orang, yaitu perasaan yang ada hampir pada segenapnya pergerakan Bumiputera lantaran dari penggeledahan-penggeledahan yang telah kejadian pada pemimpin-pemimpin dan orang-orang bukan pemimpin PNI dan juga pada orang – orang yang lebih banyak lagi bilangannya yang bukan pemimpin dan bukan anggota PNI. Tuan Voorzitter! Tetapi kita, bahwa Volksraad boleh mempunyai hak dan buat sebagian boleh jadi hendak meminta hak akan mendengarkan uraian yang serupa itu" tetapi dengan mengingati itu, suatu uraian dari pihak kita bisalah perlu dan berguna adanya, agar supaya lenyaplah kalau-kalau ada salah tanpa dan salah paham.

Pengharapan Volksraad akan supaya lekas ada keterangan, yang dinyatakan di dalam mosinya tuan-tuan Kusumo Utoyo C.s. yang pada tanggal 13 bulan ini telah diterima baik oleh College van Gedele-geerden dengan tidak mengadakan stemming dari tiap-tiap anggota, penghargaan itu tidak lain melainkan hanya menguatkan kita didalam persangkaan-persangkaan yang sudah ada pada kita tentang perkara ini.

Kamu lihat Tuan Voorzitter, itulah suatu kutipan yang hampir sarna bunyinya daripada pidatonya Wakil pemerintah yang terhormat. Kalimat-kalimat yang berikut pun adalah suatu kutipan yang hampir sama bunyinya juga. Dalam pada permakluman-permakluman yang berikut, sedangkan kami hanya membicarakan perkara-perkara yang terutama saja, pertama-tama kami akan menguraikan pertimbangan-pertimbangan yang telah membawa kita kepada perasaan tersebut itu. Kemudian daripada itu bolehlah kiranya kami melahirkan sepatah perkataan untuk mempergunakan hasil-hasil yang telah terdapat buat sementara. Akhir kemudiannya kami hendak melahirkan pemandangan yang sangat singkat tentang perikeadaan pada dewasa ini, terutama sekali berhubung dengan kebijaksanaan pemerintah yang telah dilakukan hingga kini dan akan dilakukan buat selanjutnya. Tuan Voorzitter, apakah yang telah menjadikan sebabnya kita mendapat perasaan tidak aman dan amarah itu?

Untuk menjawab pertanyaan itu, bolehlah kiranya lebih dulu kami peringatkan, betapa dalam pad perbuatan kita pada tahun 1926 dari pihak kita telah diberi peringatan terhadap kepada membangkitkan pengharapan yang baik-baik dengan terburu-buru, betapa pemberian ingat ini telah diulangi, dalam selama persidangan Volksraad yang duluan dikuatkan buat ke sekian kali dengan perkataan-perkataan seperti berikut:

"Meskipun perkara-perkara nyata, yang dibawa oleh keduanya buat membenarkan tempat pendiriannya, tidak menunjukkan banyak perkara yang sungguh-sungguh ada, maka sebagai Leitmotivenya Afdeelingsverslag bahagian politik bisalah orang mendapati suatu perasaan tidak senang pada golongan-golongan, yang dalam tahun-tahun yang duluan dengan banyak kepercayaan telah membukakan matanya terhadap kepada zaman baru yang dibuka oleh Walu-negeri yang sekarang ini.

Akan tetapi, Tuan Voorzitter, meskipun keberatan-keberatan perasaan politik kami sesudah keluarnya Memorie van Antwoord dalam banyak-banyak hal telah menjadi puas, tidaklah boleh kami lalai akan memperingatkan, bahwa zaman politik yang dibuka pada tahun ini adalah berisi suatu tanda, membikin orang menjadi mengerti mengapa perasaan-perasaan itu telah menjadi tidak aman, yaitu tanda, bahwasanya oleh karena sekarang udara telah menjadi terang terhadap communisme, orang disuruhnya memikirkan "orang-orang tukang bikin gaduh daripada pangkat yang kedua", boleh jadi dengan maksud buat melenyapkan mereka itu juga, sungguhpun tidak langsung dengan jalan persaingan, tetapi tentulah dalam urusan pergaulan hidup bersama-sama dan budi pekerti.

Sungguh-sungguh itulah telah menimbulkan fikiran, bahwa hanya dengan menunjukkan sifat yang berbahaya daripada suatu haluan nasionalis yang sangat terlampau-lampau, orang hendak memudahkan jalannya mengadakan aturan-aturan yang lebih jauh terhadap kepada golongan-golongan, yang tidak langsung dan tidak dengan syarat apa-apa lagi bersetuju dengan kebijaksanaan Pemerintah yang akan dilakukan dan seolah-olah Pemerintah dengan hati-hati dan dengan laku yang sederhana hendak mengetahui fikiran politik yang ada pada orang ramai (Handelingen 1929 kaca 95).

Begitulah bunyinya ucapan yang menyatakan perasaan tidak aman itu, Tuan Voorzitter! Kemudian daripada itu, kalau persangkaan itu ternyata benar, tentulah akan kejadian perbuatan-perbuatan. Perbuatan-perbuatan ini tentulah akan kejadian adanya. Tuan Voorzitter, kalau seandainya pergerakan Rakyat ada di dalam suatu keadaan yang boleh meluluskan kejadiannya perbuatan-perbuatan, akan tetapi oleh karena keadaan tidak meluluskan akan membalas suatu perbuatan yang tidak adil dengan perbuatan yang serupa itu juga ataupun tidak dapat membantu suatu perbuatan yang tidak adil dengan daya upaya kekuasaan, maka pergerakan itu tidak lain hanyalah dapat melahirkan perkataan-perkataan saja, di mana sesungguhnya ada lebih baik dilakukan perbuatan-perbuatan adanya.

Semenjak pertengahan Juni yang lalu, di mana ada diucapkan perkataan yang kami sebutkan tadi, yang diikuti oleh

`"pemberian ingat yang penghabisan ini", dari Wakil pemerintah buat Perkara Umum dalam bulan Agustus yang lalu, suatu pemberian ingat yang sesungguhnya bukan pemberian ingat, oleh karena perkataan-perkataannya yang tidak tertentu maksudnya dan kalimat-kalimatnya yang mengandung dua makna itu memberi kelapangan bagi segala rupa tafsir, maka semenjak itu pemimpin-pemirnpin yang terutama terlebih lagi pemimpin-pemimpin PNI, yang sudah menjadi terlalu sangat hati-hati lantaran pengalamannya lain-lain orang dan lantaran dari peraturan jajahan, mereka itu baik di dalarn perbuatan dan kelakuannya maupun dalam ucapan-ucapannya, dengan sebenar-benarnya pemimpin-pemimpin PNI itu juga telah beberapa kali meminta kepada pengikutnya supaya tidak menginjak jalannya perkosaan, dan supaya mereka melakukan perlawanan untuk maksud perhimpu-nannya semata-mata hanya dengan daya upaya yang halal belaka. Lain daripada itu adalah di sana-sini lain-lain orang, yang hampir selamanya tidak mempunyai sesuatu jabatan pimpinan dalam PNI, mereka itu tinggal diam saja walaupun kalau ada terlahir suara-suara yang menuju lain haluan, oleh karena sungguh aneh agaknya walau orang-orang yang tidak ada pikulan tanggungjawab itupun juga tidak suka percaya kepada sembarangan omong – kosong yang disiarkan oleh sembarang orang saja, ataupun kursus-kursus atau di vergadering-vergadering di muka orang ramai mereka itu melahirkan bicara kepada orang-orang yang hadir dengan perkataan-perkataan, yang terlalu sangat nyata di dalam pemberiannya ingat supaya terlebih-lebih dan selamanya tinggal aman, selamanya menurut perintahnya pembesar-pembesar, meskipun kadang-kadang perintah-perintah itu rupanya tidak adil dan tidak patut adanya. Walaupun kiranya ada satu dua orang hamba kekuasaan yang rajin sang at menyukainya, tetapi ucapan-ucapan yang serupa itu mustahillah akan dapat dimasukkan ke dalam cengkera-mannya wet-siksa.

Jadi dengan perkataan-perkataan itu kekuasaan yang syah di atas negeri-negeri ini tidaklah pernah dihinakan; kepada hamba kekuasaan yang kadang-kadang hendak melewati atasnya wet dipertunjukkan, bahwa tiap-tiap orang hamba yang terbesar dan tertinggi harus takluk kepada wet-wet yang telah ditentukan, dan

dengan hal yang demikian itu pada orang-orang yang mendengar tidaklah pernah dapat ditimbulkan fikiran bahwa agaknya kekuasaan ini akan lekas lenyaplah adanya. Dengan cara yang demikian itu, juga di Priangan Tengah, tidaklah dapat dibangkitkan perasaan-perasaan hati yang tidak senang dan pengharapan-pengharapan yang bukan-bukan. Karena itu pada akhirnya tidak juga bisa timbul suatu keadaan yang menguatirkan, tidak bisa timbul juga dalam pada bertambah-tambah pengaruhnya pergerakan Rakyat. Jadi suatu letupan, walaupun sangat diharapkan oleh orang-orang bodoh dan keliwat-liwat sukanya kepada kekuasaan sebagai sebabnya akan "melabrak dengan leluasa" tidaklah pernah akan bisa kejadian adanya.

Sedangkan walaupun begitu pergerakan Rakyat menimbang-nimbang betapa akan boleh melembekkan sedikit perikeadaan yang bagus bagi pergerakan itu bukankah nyata dan dapat dirasakan tambah luasnya pengaruh-pengaruh pergerakanpun sebaliknya perikeadaan itu menimbulkan ke kuatiran kepada pemimpin-pemimpin oleh karena justru tambah luasnya pengaruh ini menjadi bahaya terbesar bagi hidupnya pergerakan. Pada segenap tahun yang lalu dari rupa-rupa sumber yang datanglah keterangan-keterangan dan khabar-khabar tentang suatu bahaya yang mengancam, suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa. Khabar-khabar angin timbullah pada segenap tahun, yang cuma terdengar di satu dua tempat dan isinya tidak tertentu ataupun tidak perhubungannya antara satu dengan yang lainnya. Begitulah dalam tahun yang lalu telah lebih dari satu kali terdengar khabar tentang pengiraan- pengiraan akan kejadiannya perbuatan dalam tahun 1929-1930. Akan tetapi khabar-khabar angin yang serupa itu haruslah diuji dengan tidak mengurangkan taksiran tentang kepentingan yang sungguh-sungguh. Betapa banyak juga khabar-khabar yang terdengar tentang akan lekas kejadiannya perbuatan pemerintah, betapa banyak juga pemberian ingat yang terdengar dari orang-orang, oleh pemimpin-pemimpin yang mendapat cap teranggap sepuluh kali ati-atinya, dan pemimpin-pemimpin yang mudah menjadi takut yang melihat hantu pada siang hari, dan betapa juga yakinnya pemimpin-pemimpin akan sang at perlunya terlalu ati-ati sekali dalam pada memimpin tiap-tiap Pergerakan Rakyat,

betapa damai juga sifatnya dalam menentukan maksudnya, akan tetapi di dalam suatu udara jajahan., Tuan Voorzitter, betapa banyak juga khabar-khabar yang datang malahan kerap kali di suatu tempat saja banyaknya melewati bilangan 50, pada akhirnya yang memberi keputusan ialah kepercayaan kepada keadilan perkaranya, kepercayaan kepada perasaan- perasaan adil yang ada pada mereka yang harus menjaga keamanan dan ketertiban, kepercayaan kepada kebersihan maksud-maksudnya Pergerakan Rakyat, ialah keyakinan bahwasanya keadaan itu sarna sekali tergenggam di dalam tangannya, keinsyafan bahwa perbuatannya benar-benar tinggal di dalam watas-watasnya wet dan kepercayaan kepada akan dipenuhinya asas-asas yang dilakukan oleh Pemerintah.

Dengan sungguh-sungguh dijaga agar tidak kejadian tiap-tiap perbuatan yang kelewat-lewat pada tiap-tiap anggota yang berserikat, pemilihannya anggota-anggota adalah dilindungi oleh tanggung-tanggung yang serupa itu, sehingga menurut cara kata manusia walaupun tidak sama sekali akan kejadian kekeliruan, tetapi sangat sedikitlah pengharapan akan kejadiannya.

Menjanjikan rupa-rupa perkara yang menyenangkan hati, sepertinya bebas dari pembayaran pajak, rumah-rumah batu, uang kontan dan lain-lain sebagainya, kalau orang mengikuti pergerakan, itulah daya upaya untuk meluaskan pengaruh, yang daya upaya demikian itu disingkirkan jauh-jauh daridirinya pemimpin-pemimpin pergerakan Rakyat pada umumnya dan pemimpin-pemimpin PNI pada khususnya, oleh karena pemimpin yang disebut itu tidak sekali-kali menyukai penambahan pengaruh dengan cara yang rendah sifatnya itu. Paksaan dan ancaman pun buat maksud itu adalah juga daya upaya yang tidak terkenal baginya. Sebaliknya, hampir pada tiap-tiap vergadering dan kumpulan yang lainnya, kepada orang-orang yang hadir oleh Ir. Sukarno dipertunjukkan perkataan-perkataan Geribaldi kepada pengikut-pengikutnya, ketika mereka menanya kepadanya apakah pembalasannya bagi kesetiaan mereka. Dan selamanya jawabnya ialah: Kelaparan, kesengsaraan, pakaian yang koyak-koyak dan kemudaratan itulah yang akan menjadi bahagianmu. Dalam hal ihwal yang disebutkan di sini, Tuan Voorzitter, dapatlah

diterangkan, bahwa sekalian pemimpin yang ternama dari pada PNI dan perhimpunan-perhimpunan yang lainnya semuanya meninggalkan tempat kedudukannya dan pergilah ke Solo, di mana ada kewajiban-kewajiban yang lainnya memanggil mereka. Pendeknya, sungguhlah tidak akan dapat ditanggung jawabnya, Tuan Voorzitter, kalau mereka meninggalkan tempat kedudukannya apabila telah menampak hanya sesuatu tanda saja yang menguatirkan yang boleh dilihat olehnya, yang akan dapat menyebabkan kejadiannya suatu letupan biarpun sangat kecilnya juga, oleh karena dalam pada kejadiannya perkara-perkara yang serupa itu selamanya orang-orang penduduklah yang mendapat nasib yang termalang; jadi tidaklah dapat ditanggungjawabnya dan bersalahan dengan perasaan tanggung jawab yang telah berulang-ulang dipertunjukkan dari pihaknya pemimpin-pemimpin PNI dan perhimpunan-perhimpunan yang lainnya, apabila dalam suatu peri-keadaan yang begitu menguatirkan pemimpin-pemimpin itu meninggalkan tempat, di mana sesungguhnya mereka itu harus berada. Apabila tanda-tanda alamat itu sungguh ada dan sungguh adanya itu dianggap patut oleh Pergerakan Rakyat setelah difikirkan dengan sungguh-sungguh, maka mereka itulah akan memikul bahayanya kalau permusuhan-permusuhan yang telah dipermaklumkan itu sungguh kejadian juga adanya. Meninggalkan tempat kedudukan akan berarti khianat kepada perkara yang dijunjung begitu tinggi oleh semuanya mereka itu.

Jadi tidak ada sebabnya buat sesuatu perbuatan justitiel politioneel, Tuan Voorzitter, pun juga tidak ada sebabnya lantaran dari persangkaan akan bisa kejadiannya suatu kejadiannya suatu kejahatan."

Demikianlah, dari keterangan-keterangan yang dikemukakan di depan *Volksraad* itu, Muhammad Husni Thamrin telah menunjukkan suatu bentuk pembelaan, bahkan suatu bentuk kecaman yang cukup pedas. Bahkan tindakan itu telah dianggapnya sebagai suatu bentuk provokasi dari pemerintah.

Selanjutnya, kita akan melihat pandangan Muhammad Husni Thamrin yang menyangkut penetrasi (pengaruh) Jepang di Indonesia. Sebagaimana diketahui bangsa Jepang orang satu-satunya bangsa Asia yang mampu berkembang sejajar

dengan bangsa Eropa dan Amerika. Karena keberhasilannya itu, maka Jepang berkeinginan untuk memperluas penga-ruhnya di kawasan lain, termasuk di Indonesia, yang waktu itu dijajah oleh kolonialis Belanda.

Pandangan Muhammad Husni Thamrin ini telah dikemukakan di depan sidang *Volksraad,* Juli 1934. Selanjutnya ikutilah penuturannya sebagai berikut:

> "Tuan Voorzitter! Marilah saya mulai membicarakan tentangan reaksi di tanah ini karena kemasukan atau dipenetrasi oleh Jepang. Dan marilah kita lihat apakah sikapnya Pemerintah di sini terhadap rakyat dan apakah cukup penjagaan anak Indonesia yang harus diurus kepentingannya.
>
> Saya hendak membuat pemandangan itu dengan tidak berpihak kepada siapapun tidak pula memakai perasaan sentimen, hanya dengan jalan logat memberikan suatu penerangan tentangan kejadian-kejadian yang termasuk di hati bangsa Indonesia di waktu sekarang. Jepang telah menjalankan perdagangannya di tanah ini seperti suatu serangan yang maha hebat. Dia telah mendapat kemenangan memasuki daerah ini. Betapalah tampik sorak di dalam hatinya Jepang membawa perdagangan untuk keperluan anak Indonesia yang sehari-hari, dan diperhatikan olehnya pula bahwa anak negeri hanyalah bisa berbelanja sehari-hari dengan uang setengah-setengah sen saja. Dan karena itulah maka Jepang menjualkan barang-barangnya dengan murah harganya dan dapat dibeli di segala tempat. Pembagian penjualan di seluruh negeri teratur pula dengan rapi. Serangan perdagangan ini yang hanya berlaku dalam tempo 3 tahun saja sudah merebut kemenangan. Lain pula hanya bangsa Eropa. Sudah beranak cucu, turun-temurun duduk di negeri ini, tetapi kemenangan dalam hal perdagangan tidaklah secara dengan kemenangan Jepang. Dengan tidak dapat ditolak lagi, Jepang terus memasukkan perekonomiannya di tanah ini. Kemenangannya bertambah sempurna karena ti-daklah berlaku sombong, baikpun kepada si pembeli yang hina miskin. Dengan sepintas lalu saja dapat dilihat betapa sopan dan ramahnya bangsa Jepang kepada si pembeli anak Indonesia. Di toko-toko bangsa Eropa anak negeri

ini berasa seolah-olah dia tidak dihargakan oleh tuan-tuan toko Eropa .

Tuan Van Baalen: Itu perasaan saja.

Tuan Thamrin: Sebenarnya, sebab di sini saya membuat analyse yang berdasarkan atas perasaan.

Apakah kita akan heran lagi. tuan Voorzitter. bila melihat tingkah laku seperti tersebut, bangsa Indonesia lebih suka berlangganan atau berbelanja kepada Jepang, sedang- kan mata dan kupingnya sudah tertarik pula kepada barang-barang yang harganya murah, barangnya bagus dan lama tahannya pula?

Heran lagi kita melihat bagaimana terangnya kelihatan kesukaan anak negeri membeli barang Jepang itu, lebih suka daripada barang Eropa, karena pada tiap-tiap anak Indonesia adalah perasaan bahwa ia tidaklah merugikan perdagangan nasionalnya jika membeli barang Jepang? la tahu bahwa tidak ada pabrik-pabrik bangsanya sendiri yang membuat barang-barang itu, sehingga ia tidak merugikan dagangan kebangsaannya. Tak pula dapat mengherankan, karena biarpun mereka itu masih rendah pengetahuannya, tetapi sudah bisa menaruh perasaan lebih baik membeli barang-barang kepada Jepang. Membeli kepada Jepang berarti menguatkan tenaganya terhadap perdagangan Eropa yang kedudukannya dipandang adalah terlalu kuat. Tahun yang lalu telah saya katakan bahwa orang tani bangsa Indonesia itu mempunyai dunia pemikiran dan perasaan yang kaya dan pelbagai rupa. Apakah bangsa Barat menyangka Sitani yang rendah itu tidak mengetahui, bahwa kemasukan barang perdagangan Jepang di tanah kita tidak akan membawa kejadian-kejadian yang berarti politik, di belakang hari? Betul amat susah untuk memperlihatkan, bahwa orang desa itu pun dapat juga merantang-rantangkan pikiran dan mendapat kesimpulan, bahwa penetrasi perdagangan Jepang dapat disangkutkannya kepada cita-cita politik dari negeri Jepang.

Untuk penerangan akan uraian saya yang di atas ini, inilah satu contoh. Dalam contoh ini tuan akan melihat sebagaimana kaya raya pikirannya "Inlander yang bodoh" itu.

Marilah kita balik 20 tahun ke belakang. Adakah kira-kira 20 tahun yang lalu, saudagar-saudagar Jepang pertama kali datang ke tanah

ini dan perdagangan mereka tak lain daripada barang-barang perhiasan kertas dan obat-obat. Ketika itu dibuatnyalah suatu reklame, di mana-mana, untuk obat Jintan, ialah obat mulur yang harganya cuma beberapa sen satu-satu dosnya.

Tuan Hamer: Jadi orang Jepang rupanya sudah bekerja 20 tahun untuk memperoleh pasar di Hindia ini.

Tuan Thamrin: Permulaan yang 20 tahun itu dan kebanjiran perdagangan di dalam 3 tahun ini tidak boleh diperbandingkan satu sama lain.

Propaganda yang dijalankan oleh Jepang itu ialah membawa papan reklame yang bermerek JINTAN. Dalam reklame itu dituliskan sebuah Jenderal Jepang dan di bawahnya ditulis dengan huruf yang besar-besar: JINTAN. Dengan sebentar waktu saja nama yang baru ini menjadi buah tutur anak negeri dan dari huruf-huruf kata itu, diartikan kata ini: J (jenderal) I (ini) N (nanti) T (tulung) A (anak) N (negeri). Beberapa orang yang jenaka menukarkan perkataan "Tulung" dengan "Tangkap".

Tuan Voorzitter! Dari manakah datangnya pengertian kata yang luar biasa ini, yang tidak berhubung sama sekali dengan barang yang diperdagangkan?

Betul contoh yang saya tunjukkan ini tidak berarti besar, tetapi heran benar kita melihat bagaimana rakyat jelata itu menyambungkan kedatangan Jepang ke tanah ini dengan cita-citanya staat-kundig untuk berpengaruh di tanah ini. Bila kita lihat dan meman-dang apa yang tertulis dalam pikiran bangsa Jawa, maka dapatlah kita ketahui bahwa sejak dahulu di dalam babad telah ada dikias-kiaskan bahwa nanti yang akan berkuasa di tanah ini, suatu bangsa kulit kuning. Inilah keterangannya maka rakyat Jawa itu menyambungkan kedatangan bangsa Jepang kemari dengan cita – cita politiknya tadi.

Dalam dongeng-dongeng turun-temurun dari bapak ke anak, sudah diceriterakan bahwa Jayabaya telah lebih dahulu mengatakan, bahwa tanah Jawa ini akan ditaklukkan oleh bangsa kulit kuning. Orang boleh mengangkatkan pundaknya mendengarkan ceritera babad ini. tetapi bagi orang Jawa adalah

cerita ini dipercaya teguh seperti kepercayaannya kepada wali-wali, Nabi atau kepada hari kiamat.

Sebenarnyalah ramalan Jayabaya ini dan kejadian-kejadian yang akan datang sudah diketahui orang semua dan terpatri masuk dalam hati dan pikiran bangsa Jawa. Tidaklah kita akan heran lagi bahwa cerita ini tidak akan hilang dari bangsa Jawa, karena menurut ceirta yang terlukis di jantung hatinya itu, nasib kerajaan tanah Jawa ini bergantung pada ramalan Jayabaya itu.

Pemandangan yang saya sebutkan di atas ini, telah saya baca dalam surat kabar bulanan "Het Tijdschrift" tanggal 1 Mei 1912, karangan dari tuan R. Nitipraja. Tuan Kusumo Utoyo membilang kepada saya bahwa tuan Nitipraja, yang sekarang sudah wafat, dulunya jadi Hoofdjaksa di Jogja, menjadi berdiam di kota pusat peradaban (cultuur) bangsa Jawa.

Beginilah ramalan Jayabaya:

Yen negara Jawa gedene woos sa godong kelor, hingkono bakal ditekem dening wong Cina; Hananginglawase moong sa umure jagung; Sa wuse hiku bakal bali hana hing tangene wong Jawa maneh.....

Menurut pikiran penulis itu, maka kalimat ini harus diterjemahkan begini;

Jika negeri Jawa besarnya sebesar daun kelor (dalam pengertian staatkunding) maka negeri itu akan dikalahkan oleh orang Tionghoa (Jepang?). Tetapi lamanya hanya seumur jagung; kemudian akan kembali lagi ke tangan orang Jawa sendiri.

Pendapatan itu disambung pula begini:

Yen tunjung putih woos sirna hingkono bakal muktine wong Jawa:

Kalau kembang terate putih (pemerintah Belanda?) habis berbunga, maka datanglah waktu yang sentosa untuk sekalian pen-duduk tanah Jawa.

Cerita yang sebagai ini dari Jayabaya hidup seperti dikatakan tadi dalam mulut, bibir dan dalam hati rakyat Jawa.

Orang tentu saja boleh mengangkat bahu mendengarkan cerita itu. Orang boleh juga menyangka rendah akan kepercayaan yang bukan-bukan ini, tetapi mereka itu harus mengerti juga bahwa cerita Jayabaya itu mengandung suatu kepercayaan yang teguh dalam hati bangsa Jawa, yaitu mereka ini percaya bahwa kejadian-kejadian itu semuanya akan benar datang dan terjadi.

Menurut pendapatnya tuan Nitipraja ramalan Jayabaya itu senantiasa terkandung dalam hati bangsa Jawa, baikpun dalam waktu kesusahan atau kesempitan politik, maupun juga dalam zaman kema-juan sosial, ekonomi dan lain-lain.

Pendek kata, ramalan Jayabaya belum pernah terlepas dari hati bangsa Jawa!

Apakah oleh karena ramalan Jayabaya, maka serangan Jepang itu, baik dalam hal ekonomi dan politik tidak dapat ditolak lagi dan orang menyerahkan dirinya dengan ridha hati?

Bangsa Eropa yang tenang pikirannya, tentulah memajukan dua pertanyaan terhadap keadaan ini:

Pertama: Apakah betul tanah ini akan dipengaruhi politik oleh negeri Yapan?

Pertanyaan yang sebagai ini kalau dipikir sepintas lalu benar sekali, tetapi orang lupa memikirkan bahwa perdagangan atau handel itu adalah menyimpan politik di dalam bungkusnya. Handel itu mengandung bibit pengaruh pada siapa yang berdagang. Siapa yang belum percaya akan kebenaran perkataan ini, haruslah diperingatinya sekali lagi riwayatnya kedudukan bangsa Belanda pertama kali di tanah ini "ataupun riwayatnya kerajaan Eropa di tanah jajahan yang lain-lain yang juga dimulai dengan perdagangan saja".[2])

Kemudian kita lanjutkan pandangannya tentang masalah-masalah politik lainnya, yaitu tentang kedudukan Fraksi Nasional dari Parindra dalam hubungannya dengan Volksraad. Untuk itu di bawah ini kita kutipkan sebagai berikut:

"Oleh karena di dalam Volksraad telah dibentuk golongan baru yang menamakan dirinya *Indonesische nationalistische groep* dalam golongan mana terdapat 2 anggota yang tadinya menjadi

anggota Nationale Fractie, maka dalam beberapa surat-surat kabar telah terdapat beberapa pemandangan tentang kejadian ini.

Jika kami memberi sedikit pemandangan tentang bangunnya *Indonesische nationalistische groep*, maka bukan maksud kami untuk mengeritik atau berfihak pada salah satu golongan, akan tetapi hanya untuk memberi sedikit penerangan.

Sebagaimana kami telah terangkan dalam peman-dangan umum, maka kami tetap menyesal bangunnya golongan baru itu oleh karena melemahkan golongan Nationalisten dalam Volksraad dan oleh karena kepada dunia luar tertampak perpecahan di kalangan Nationalisten:

Jika diperiksa keterangan kami sebagai Ketua Nasional Fraksi tentang azas tujuannya Fraksi ini dan dibandingkan dengan keterangan itu dengan apa yang dikemukakan oleh Mr. M. Yamin atas nama Indonesische nationalistische groep maka seolah-olah hanya ada perbedaan tentang nama saja. Ini sudah tentu tidak benar..

Perbedaan antara 2 golongan itu bisa nyata dari pidato-pidato tuan-tuan Yamin dan Thamrin dan anggotanya masing-masing golongan tentang berbagai-bagai soal maupun di lapangan politik atau ekonomi.

Dengan singkat saja, maka boleh dinyatakan bahwa anggota-anggota Nationale Fractie mempertahankan dan memperhatikan kepentingannya Indonesia seumumnya dengan Indonesische natio-nalistische groep temtama mementingkan apa yang berhubung dengan tempat asalnya masing-masing anggota atau hanya dengan "buitengewesten" seumumnya.

Inilah perbedaan yang nyata dan supaya diketahui oleh umum sebab bukan maksud kami untuk menerangkan perbedaan yang lebih jauh atau yang lain antara 2 golongan itu. Akan tetapi perlu juga sekiranya kita periksa artinya perkataan fractie dan artinya perkataan groep supaya menjauhkan salah paham kepada umum.

Perkataan fractie biasanya dipakai di dalam badan-badan perwakilan untuk sesatu golongan yang menyetujui azas dan

tujuan golongan itu. Oleh karena itu di Volksraad terdapat berbagai-bagai fractie, umpamanya saja:

Nationale Fractie, P.P.B.B. Fractie, Katholieke fractie, Vaderlandsche Club fractie, P.E.B. fractie dan seterusnya.

Dalam badan 2e dan Ie-Kamer di Negeri Belanda terdapat S'D.A.P. fractie, N.S.B. fractie, dan sebagainya.

Perkataan groep dipakai oleh Indonesische nationalistische groep tidak seharusnya dipakai untuk sesuatu golongan di dalam badan perwakilan.

Perkataan groep tidak biasanya dipakai dalam lapangan politik, akan tetapi dalam pergaulan sehari-hari umpamanya saja familie groep, eilanden groep, taal-groep, bolksgroep dan sebagainya.

Oleh karena itu bukan di tempatnya dan salah pula jika memakai perkataan groep buat sesuatu golongan yang bekerja dalam lapangan politik.

Marilah sekarang kita periksa sejarahnya Nationale fractie.

Fractie ini didirikan pada tanggal 27 Januari 1930 dan yang menjadi anggotanya di waktu dibentuknya yaitu tuan-tuan:

Kusumo Utoyo (Midden-Java), Dwidjosewojo (Vorstenlanden), Datoek Kayo (Weskust van Sumatra), Mochtar (Palembang), Nja Arif (Atjeh), Soangkoepon (Ookust van Sumatra), Pangeran Ali (Borneo), Soetadi (Midden Java), Soeroso (Oost Java) dan Thamrin (West Java).

Kalau kita periksa sejarah yang singkat ini, jauh dalam tahun pendirian itu, maka berdirinya Nationale Fractie sudah semestinya oleh karena perasaan persatuan antara segala golongan Indonesia di itu waktu berkobar-kobar.

Di luar dunia Volksraad telah didirikan badan persatuan untuk segala lapisan yaitu badan PPPKI dan sudah tentu wakil-wakil rakyat yang duduk dalam Volksraad tidak mau ketinggalan buat bangunkan badan persatuan dalam Volksraad yaitu Nationale Fractie.

Tambahan pula terlebih dulu di kalangan golongan Eropa

telah didirikan perkumpulan Vaderlandsche dub yang bermaksud mempersatukan segala aliran politik di kalangan golongan Eropa dan untuk memberantas angan-angan politik rakyat Indonesia.

Kalau kita periksa sejarah yang singkat ini maka ternyata pada kita, bahwa bentuknya Nationale Fractie sudah semestinya dan sudah pada tempatnya juga buat waktu sekarang untuk mempertahankan segala kepentingan rakyat Indonesia. Perpecahan dalam golongan Nationalisten sudah tentu berarti melemahkan kekuatannya dan oleh karena itu harus disesalkan.

Kami tetap berpendapatan juga buat waktu sekarang hidupnya angan-angan rakyat Indonesia akan mempersatukan dirinya dan angan-angan masih tetap berkobar-kobar.

Tak akan diterima oleh masyarakat Indonesia segala anjuran atau segala aliran yang berkehendak memecahkan persatuan yang diingin selalu olehnya, dan yang dengan susah payah telah dicapai olehnya.

Tuan Voorzitter! Juga pada tahun ini oleh fractie kami akan digunakan bahasa Indonesia di bagian pemandangan umum. Sebenarnya ada saatnya oleh fractie kami diper-timbangkan menggunakan bahasa Belanda di tahun ini oleh karena telah nyata hak memakai bahasa Indonesia diakui oleh Pemerintah biarpun ia menyatakan penyesalannya ketika kami memakai bahasa Indonesia di dalam Volksraad pada tahun yang lalu.

Menyesal sekali kami melihat sikapnya badan-badan gemeen-teraad terhadap pemakaian bahasa Indonesia dalam badan-badan mana hak menggunakan bahasa Indonesia telah dipungkiri dan menjadi soal perbincangan yang hebat, dan beberapa badan itu mempertimbangkan akan melarang memakai bahasa Indonesia dalam badan gemeenteraad.

Dalam gemeenteraad Medan dan Semarang burge-meesternya telah melanggar kesopanan oleh karena ia tidak membalas pandangan salah satu lid sebab pemandangan lid ini diadakan dalam bahasa Indonesia.

Selama belum ada pengakuan umum dan yang ikhlas dari sekalian raad-raad bahwa pemakaian bahasa Indonesia menjadi satu hak yang tertentu dan yang tidak bisa digugat lagi, maka

kami orang akan terus memakai bahasa Indonesia dalam Volksraad dan terus juga kami akan mengajarkan pula kepada umum untuk memakai bahasa ini.

Perubahan sikap tentang pemakaian bahasa menjadi bukan terletak di tangan kita.

Penghargaan terhadap pemakaian bahasa Indonesia bisa berakibat timbulnya penghargaan pula terhadap bahasa Belanda.

Tuan Voorzitter! Oleh karena tahun ini ada susunan Volksraad yang baru maka sebaiknya jika kami memperkenalkan diri Nationale Fractie maupun tentang azas dan tujuannya atau tentang anggotanya. Tujuan Nationale Fractie ternyata dari fasal 1 yang berbunyi demikian :

Fasal 1.

Tujuan Nationale Fractie mencapai kemerdekaan Indonesia dengan selekas-lekasnya.

Fasal 2.

Tujuan ini akan dicapai dengan jalan :

a. Mengadakan perubahan-perubahan susunan peme-rintah yang berdasar democratie dan perbaikan masyarakat.

b. Menghilangkan segala perbedaan politik, ekonomi dan perbedaan lain yang terdapat dalam masyarakat jajahan (koloniale antithese).

c. Mempergunakan segala jalan yang sah untuk mencapai maksud tersebut.

Perlu sekiranya buat ini kali kami terangkan lebih luas tentang nama dan dasarnya tractie National.

Jika kita periksa lebih jauh artinya perkataan fractie, maka dengan perkataan ini biasanya yang dimaksud golongan dari suatu partai politik. Keadaan fractie Nasional ada berlainan oleh karena anggotanya bukan terdiri dari anggota suatu partij saja tetapi setiap anggota Volksraad, maupun berpartij atau tidak, yang berdasar

atas kenasionalan bangsa Indonesia boleh masuk menjadi anggota.

Oleh karena itu maka fasal 1 dari azas tujuan fractie kami jelaskan sebagai berikut:

Fractie Nasional bukan bermaksud menjadi fractie dari satu partij sebagaimana boleh jadi di artikannya dengan perkataan fractie. Anggotanya terdiri dari anggota volksraad dari setiap golongan yang berdasar atas kenasionalan bangsa Indonesia.

Biarpun terang maksud tractie kami dengan mencapai kemerdekaan Nasional dad bangsa Indonesia dan jalan-jalannya yang dipermaklumkan, maka dirasa perlu menambah perkataan-perkataan "yang berdasar demoeratie" untuk menjelaskan maksud kami hanya kenasionalan ini yang ditujukan.

Tuan Voorzitter! Fraetie kami sengaja menerangkan bahwa ia menuntut kemerdekaan Indonesia oleh karena kami yakin yang hanya dengan kemerdekaan bangsa dan nusa masyarakat Indonesia akan bisa sempurna.

Sudah tentu kemerdekaan bangsa dan nusa membawa mencapai pula susunan pemerinah yang sebaik-baiknya.

Susunan pemerintah yang sebaik-baiknya bisa terdapat jika pemerintah itu disusun dan dikuasai oleh anak negeri sendiri, oleh karena hanya mereka ini yang bisa mengetahui dan merasai keperluan-keperluan masyarakat Indonesia.

Lagi pula segala pergerakan di sesuatu negeri jajahan akhirnya meneapai kemerdekaan bangsa dan nusa, biarpun tujuannya diselimuti dengan perkataan-perkataan yang lemah lembut. Sebab sudah selayaknya bahwa setiap bangsa mencapai kemerdekaannya oleh karena hanya makhluk Tuhan yang tidak berakal beringin diperhambakan selama-selamanya dan tidak mempunyai angan-angan untuk merdeka. Juga cocok dengan hukum alam bahwa segala makhluk yang bernafas membutuhkan sumber yang memberi kehidupan dan kekuasaan padanya sebagaimana juga pohon dalam rimba membutuhkan matahari untuk hidupnya.

Oleh karena apa yang tersebut di atas maka fractie kami berpendirian mencapai kemerdekaan bangsa dan nusa dan kami

orang akan bertentangan dengan segala golongan atau aliran yang hendak mencegah tujuan-tujuan kami. Sudah tentu kita tidak akan atau sudi bekerja bersama-sama dengan sesuatu fractie atau golongan yang bermaksud atau yang mempertahankan sifat kejajahan di Indonesia dan oleh karena itu hanya kita akan bekelja bersama dengan mereka yang dalam hakekatnya setuju dengan tujuan kita yang sud dan mulia itu.

Kami bergirang di tahun-tahun yang sudah telah ternyata fractie kami bisa bekelja bersama dengan golongan-golongan lain dalam ini raad. Terutama dengan golongan Indonesia yang lain telah terbukti bisanya bekerja bersama dan kami berharap keadaan ini selanjutnya tidak akan berubah. Juga dengan fraetie I.E.V. telah terbukti dalam beberapa hal kami orang bisa bekelja bersama dan persediaan bekerja bersama bukan saja untuk golongan Indo-Eropa akan tetapi pula dengan golongan Indo-Tionghoa dan Indo-Arab.

Nama anggota yang masuk dalam fractie nasional ada sebagai berikut:

Tuan-tuan: Soeroso, Sukardjo Wirjopranoto, Iskandar Dinata, Muchtar, Lapian dan Thamrin.

Tuan Voorzitter! Dengan surat tertanggal 10 Juli 1939, jadi hari kemarin, tuan Abdul Rasjid telah menyatakan kepada kami hendak minta keluar sebagai anggota fractie. Surat itu tertulis juga atas nama tuan Soeangkoepon.

Sungguh sayang kedua tuan itu keluar dari fractie kami yang ia menjadi anggota setia lamanya lebih dari 10 tahun akan tetapi apa yang mesti terjadi, rupanya tak bisa dicegah. Kami mengucap diperbanyak terima kasih atas kesetiaan dan tunjangan beliau buat waktu yang telah lewat dan berharap bisa bekerja bersama-sama sekalipun mereka tidak menjadi anggota fractie lagi.

Pilihan pimpinan fractie saban tahun dilakukan di permulaan zitting dan buat tahun 1939/1940 tuan-tuan Thamrin dan Muchtar yang dipilih sebagai ketua dan secretaris.

Pembagian pekerjaan dalam fractie sedemikian rupa sehingga dijaga jangan ada dua pembicara tentang sesuatu fasal kepada kami diamanatkan memajukan beberapa soal yang akan nyata sebentar, sedang oleh lain anggota akan dibicarakan Berbagai-

bagai soal seperti economische samen-werking, defenisi, pembagian jajahan herveer-deling van kolonien, interneering, hal ikhwal ambtenaar, dan lain-lain soallagi.

Tuan Voorzitter! Sebagaimana biasa maka pidato kami, akan kami bagi dalam beberapa bagian, yaitu bagian politik, bagian ekonomi dan bagian keuangan.

Untuk mengadakan pemandangan tentang politik maka seharusnya kita mempelajarkan keadaan politik dunia seumumnya dan keadaan politik di Asia dalam khususnya. Dalam abad ini tidak bisa sesuatu negeri mengasingkan dirinya dari perhubungan dengan negeri lain, oleh karena setiap negeri buat sebagian besar nasibnya tergantung daripada lain negeri. Oleh karena itu sedikit dan banyak sikap atau tindakan dari sesuatu negeri berakibat kepada yang lain, begitu juga dengan Indonesia ini.

Sebagian besar dari tindakan dan sikap pemerintah di Indonesia maupun di lapangan keuangan atas sikap terhadap memperkuatkan balatentara berdasarkan atas kejadian-kejadian di lapangan politik dunia dan oleh karena itu sewajibnya kita harus mempelajari keadaan dunia inter-nasional untuk mengukur segala aturan pemerintah di Indonesia.

Terlebih penting lagi hal ini buat Indonesia oleh karena susunan ekonomi kita berdasar atas perdagangan dengan dunia luar. Dengan singkat saja gambarnya ekonomi Indonesia ada sebagai berikut. Kemakmuran tanah dan hawa di Indonesia dan murahnya upah buruh menjadikan Indonesia sesuatu negeri yang mengeluarkan rupa hasil bumi untuk pasar dunia. Sebaliknya segala keperluan hari-hari buat sebagian besar kita harus datangkan dari negeri luaran. Dengan gambar yang amat singkat ini akan nyata pasar dunia luar berakibat di Indonesia.

Jika kaum pembeli di luar negeri tidak sudi membeli hasil bumi kita, maka sudah tentu harganya turun dan mempengaruhi hasil keuangan negeri kita. Akibatnya keadaan yang demikian mengurangkan hasilnya negeri Indonesia dan menaikkan beban-beban pajak sebagaimana nyata dari beberapa usul dari pemerintah.

Ekonomi dunia pada masa ini telah berubah dalam dasar-dasarnya; hampir setiap negeri di seluruh dunia bersikap mengatur ekonominya sedemikian rupa, sehingga segala

keperluannya bisa dicukupkan dengan penghasilan negeri sendiri. Pembelanjaan di luar negeri dikecilkan oleh karena belanja di luar negeri dianggap membuka kemiskinan negerinya.

Dengan keadaan demikian tak usah diherankan jika ekonomi di beberapa bagian dunia terdesak dan masing-masing negeri telah berusaha untuk menjual sebanyak-banyaknya, akan tetapi sebaiknya hendak membeli sedikit-dikitnya. Jika boleh diumpamakan keadaan dunia dengan perdagangan banyak penjual, akan tetapi sedikit pembeli. Oleh karena setiap negeri untuk kehidupannya harus menjual di pasar dunia, masing-masing negeri mendesak kepada yang lain supaya dibeli hasil buminya atau hasil kerajinannya. Mereka yang kuat dan berpengaruh menggunakan kekuatan dan pengaruhnya untuk menjual barangnya. Desakan dan paksaan ini yang menimbulkan percederaan satu antara lain dan inilah antaranya sehingga pada masa ini kita melihat tiap-tiap negeri bersiap dan menguatkan persenjata-annya untuk memaksa kepada yang lain. Sebenarnya permusuhan antara negeri atau antara rakyat dan rakyat timbulnya oleh karena merebut pasar dunia. Untuk mencari keberhasilan laba kelak. Begitu pula persaingan yang terdapat sekarang antara Jerman, Italia dan Yapan sefihak terhadap Inggris dan Perancis di lain pihak.

Masing-masing pihak hendak memaksa satu sama lain buat membeli hasil negerinya atau hendak merebut pasar-pasar yang memberi laba besar padanya. Perdagangan di pasar dunia sebenarnya dalam hakekatnya amat kejam.

Soal perdagangan dibikin soal hidup atau mati buat rakyatnya, sehingga kebanyakan peperangan terbit oleh karena hendak menguasai perdagangan.

Telah lebih 2 tahun lamanya setiap hari kita mem-baca di harian persaingan dan pertentangan antara jago jago dunia ini. Masing-masing memperlengkapkan persenjataannya oleh karena masing-masing hendak mengalahkan lawannya. Siapa yang kalah hidup dalam sengsara atau perhambaan dan yang menang berarti akan hidup dalam kesenangan dan kelonggaran. Melihat keadaan ini kami yakin pertempuran dunia besok lusa mesti kejadian dan pertempuran ini akan membawa akibat buat seluruh dunia.

Dalam kalangan ahli peperangan telah timbul perkataan baru. Peperangan yang akan datang dinamakan "totalitaire oorlog" yang boleh diterjemahkan dengan perkataan "peperangan borongan". yang oleh karena bukan balatentara saja akan berperang akan tetapi sekalian rakyat dan boleh jadi sekalian dunia.

Yang akan turut susah negeri yang keeil atau lemah mengingat pepatah "gajah berkelahi dengan gajah, pelanduk mati di tengah".

Tuan Voorzitter! Di dalam ukuran dunia maka negeri Belanda dan pemerintah Belanda di Indonesia termasuk golongan yang lemah sekali dan tidak mempunyai pengaruh di dunia internasional. Dalam keadaan ini sudah tentu kita tidak akan bisa menolak datangnya bahaya, apalagi melawan kepada serangan dari salah satu jago dunia.

Jalan satu-satunya buat pemerintah di Indonesia yaitu meneari jalan untuk meluputkan diri dari bahaya dan untuk membesarkan ketenteraman dalam rumah tangga sendiri. Terutama ketenteraman dan kerukunan rumah tangga yang agak penting oleh karena hanya jika ada kerukunan yang kuat pemerintah Belanda bisa mempertahankan kedudukannya, terutama dalam waktu udara alam berbahaya.

Marilah sekarang kita periksa lebih jauh betapakah sikapnya pemerintah Indonesia untuk mengadakan atau mempertahankan kerukunan antara sekalian anggota rumah tangga.

Kita sekalian mengetahui rumah tangga Indonesia terdiri dari rupa-rupa bangsa. Yang menjadi kepala rumah tangga bukan sebangsa atau sedarah dari anak buahnya yang terbanyak. Antara anak buah itu terdapat pula segala bangsa yang ada di kolong dunia. Telah umum bahwa suatu wali (voogd) tidak bisa begitu ikhlas atau cinta kepada anaknya seperti bapak yang sejati, apalagi jika wali ini tidak ada pertalian darah dengan anak buahnya, yang lebih ganjil lagi wali memperbedakan kedudukan anak buahnya masing – masing sehingga mana yang bertali darah dengan dirinya mendapat kedudukan yang jauh lebih mulia daripada yang lain.

Pemerintah Indonesia semenjak dahulu kala sehingga sekarang tak pernah memperhatikan kehendaknya atau

mempeliharakan perasaan anak negeri yang asli, malah aturan-aturannya memperkuatkan keganjilan terhadap anak negeri dan mempertahankan kerendahan derajatnya terhadap lain bangsa di negeri ini.

Jika kita lihat undang-undang dan peraturan-peraturannya maka dalam segala hal anak negeri diperbelakangkan dan hanya jika keganjilan terlalu nyata, maka diadakan perubahannya sedemikian rupa sehingga terhadap dunia luar diberi pemandangan bahwa pemerintah Indonesia tidak mengadakan perbedaan kebangsaan antara satu sarna lain.

Untuk membuktikan ini tak perlu sekiranya kami menyebutkan aturan-aturan yang mengandung perbedaan. Setiap orang yang mempunyai akal dan matanya terbuka bisa tunjukkan perbedaan-perbedaan itu dalam segala lapangan, maupun di lapangan politik, ekonomi, di kalangan pelajaran, pangkat, pemeliharaan dan seterusnya.

Dalam waktu yang belakangan ini pula kita !ihat beberapa kejadian-kejadian yang kami akan kemukakan.

Untuk memperkuatkan apa yang kami katakan hendak kami bicarakan tentang Voorzitter dari Volksraad. Sudah tentu bukan maksud kami akan membicarakan kepandaian tuan untuk menjabat pangkat ini, akan tetapi maksud kami menerangkan bahwa dalam hal ini Pemerintah tidak jujur pada perjanjiannya, yang dalam hal keangkatan buat setiap jabatan tidak dipandang kebangsaan dari orang yang diangkat. Bilangnya siapa saja yang cakap akan diangkat. Bagaimana sekarang riwayatnya keangkatan buat Voorzitter Volksraad? Ketika Volksraad didirikan maka keangkatan Voorzitter Volksraad yang pertama dilakukan oleh pemerintah. Ini sudah semestinya oleh karena Volksraad yang pertama harus mempunyai Voorzitter dan Volksraad di itu waktu belum bisa berkumpul untuk memilih Voorzitternya. Akan tetapi untuk Voorzitter yang kedua dan selanjutnya hingga yang ke-5 Volksraad selalu memajukan candidaatnya buat jabatan ini dan selalu candidaat Volksraad diangkat oleh pemerintah ketika dari pihak Pemerintah mengangkat seorang yang tidak dimajukan oleh Volksraad.

Tiba-tiba kebiasaan ini tidak dilakukan lagi ketika Volksraad memajukan candidaat Indonesia. Voorzitter van Helsdingen diangkat oleh Pemerintah ketika dari pihak Volksraad dimajukan

tuan-tuan Kusumo Utoyo dan Wiranata Kusumah sebagai candidaat yang pertama dan kedua dan tuan sendiri sebagai candidaat yang ketiga. Kami mengingatkan sekali lagi bahwa terhadap sekalian Voorzitter yang lebih dahulu selalu candidaat Volksraad yang diangkat. Untuk mengisi lowongan yang tuan sekarang jabat pangkatnya maka dari fihak Volksraad lagi dimajukan dua candidaat Indonesia yaitu tuan Prof. Djajadiningrat dan Mr. Mulia sedang tuan dicandidaatkan sekali lagi sebagai nomor tiga. Angkatan Pemerintah jatuh pada tuan sedang dua Indonesia tadi telah diliwatkan begitu saja. Kalau kita periksa lebih jauh candidaat-candidaat Indonesia yang dimajukan, maka tak boleh tidak kita harus bersangsi dengan kejujuran Pemerintah pada perjanjiannya sendiri akan angkat yang cakap untuk menjabat sesuatu lowongan dengan tidak memperbedakan kebangsaannya? Apakah yang kurang kepada Prof. Djajadiningrat, seorang yang oleh pemerintah sendiri dipilih buat menjabat pangkat yang lebih tinggi dari Voorzitter Volksraad. Seorang yang didikannya dan pengetahuannya lebih dari cukup dan kedudukannya serta kelakuannya pun tak bisa dicela dari sudut mana juga. Seorang sebagai Prof. Djajadiningrat susah dicari bandingannya biarpun di kalangan Eropa. Sungguh keadaan ini maka candidaat Indonesier dari Volksraad antara mana tuan Mr. Mulia seorang yang muda akan tetapi cukup pelajarannya dan banyak pengalamannya di kalangan Volksraad telah diliwatkan dan angkatan Pemerintah telah jatuh pada tuan sedang terlebih dulu tuan telah ditampik oleh pemerintah.

Apakah dengan perbuatan yang demikian tidak seharusnya kami berpendapat bahwa teori yang Pemerintah tidak akan melihat kebangsaan untuk mengangkat seseorang dalam sesuatu jabatan. Hanya tinggal teori saja yang tidak berharga? Haruslah kami orang menaruh kepercayaan lagi kepada perjanjian Pemerintah, jika dalam hal ini dua kali terbukti, bahwa perbuatan yang berlawanan dengan perjanjiannya.

Bukan hal angkatan Voorzitter Volksraad saja yang menjadi soal. Apa yang kami majukan terhadap keangkatan Voorzitter Volksraad boleh dimajukan untuk setiap pangkat.

Manakah orang Indonesier yang berpangkat tinggi dalam susunan Pemerintah di Indonesia jika pangkat itu tidak diwajibkan oleh wet harus ditempati oleh Indonesier?

Di sekeliling Asia, biarpun negeri itu juga negeri jajahan pangkat-pangkat direktur, departemen, gubernur residen, burgemeester, anggota hoogerechtshof, officier bala tentara darat dan laut dan sebagainya ditempati oleh anak negeri dan hanya di Indonesia sebagai koloni Belanda keadaan ini berlainan. Sehingga saat ini hanya satu orang Indonesia yang diangkat menjadi Burgermeester dari gemeente Madiun, satu gemeente yang termasuk di klas tiga dari susunan gemeente di Indonesia.

Apakah keadaan yang demikian ini akan memper-kuatkan kepercayaan kami orang yang pemerintah Belanda jujur pada perjanjian-perjanjian untuk menuntut kepada kita ke arah mengurus rumah tangga sendiri dan akhirnya untuk melepaskan kita sebagai rakyat yang merdeka?

Seseorang yang masih percaya akan perkataan-perkataan dan perjanjian-perjanjian yang lemah lembut ini dan hanya mengenakkan kuping saja, harus dimasukkan dalam golongan orang yang tahyul.

Jika kita periksa sikap Pemerintah lebih jauh maka akan nyata pula bahwa selainnya perjanjian-perjanjian yang diucapkan berkali-kali sehingga bosan kita mendengarnya, perbuatannya dan kelakuannya bersifat tak memperdulikan keinginan masyarakat Indonesia. Tidak ada perhatian dan tidak pula ada kemauan untuk menyukupkan keperluan masyarakat. Biarpun pers, pemuka rakyat dan rakyat sendiri dalam beberapa hal minta dihapuskan peraturan – peraturan yang merugikan masyarakatnya atau meminta keentengan beban rakyat, segala ini percuma saja jika mengganggu kepentingan bangsa atau golongan berkuasa.

Tuan Voorzitter! Pada orang yang sadar sebenarnya jika kita hendak pikir yang tenang kejadian-kejadian ini tidak usah mengherankan. Yang mengeruhkan udara sebenarnya Pemerintah oleh karena mengeluarkan perjanjian-perjanjian yang sedap dan adil masih saja terdapat bangsa Indonesia yang percaya kepada ucapan-ucapan ini.

Pucuk kekuasaan Pemerintah Belanda juga untuk Indonesia terletak di badan Tweede Kamer dan jika kita periksa keadaannya dan susunannya badan ini maka keyakinan akan bertambah bahwa sudah tentu pimpinan dan kebijaksanaan Pemerintah terhadap Indonesia tidak bisa benar dan tidak bisa cocok dengan keinginan masyarakat Indonesia.

Nasib rakyat Indonesia diserahkan di tangan sesuatu badan yang anggotanya dalam kebanyakannya belum pernah melihat rupanya pohon kelapa dan mereka ini yang diwajibkan mengukur keinginannya dan perasaannya rakyat Indonesia seumumnya.

Dengan keadaannya ini, maka buat setiap Minister van Kolonien tak usah untuk mempertahankan kebijaksanaannya terhadap anggota Staten Generaal dan inilah juga yang menjadi sebabnya sehingga tuan Walter tak boleh mengucap perkataan-perkataan yang memuaskan kepada pendengar-nya, akan tetapi tidak berdasar pada kebenaran dan tidak pula cocok dengan keadaan di Indonesia.

Ucapan-ucapan tuan Welter penting sebab kedudukan Mantri Jajahan buat Indonesia amat berpengaruh oleh karena kekuasaannya amat besar dan Gouverneur Generaal harus menurut apa yang dikehendaki olehnya.

Sudah tentu bukan maksud kami akan menunjukkan segala kesalahan Mantri Jajahan ini sebab waktunya buat mengerjakan ini tidak cukup dari sebab banyaknya kesala-hannya. Akan tetapi baik sekiranya kami mengambil beberapa contoh bahwa Mantri Jajahan ini lidahnya tidak bertulang.

Kalau kita periksa pidato-pidatonya tuan Welter seolah-olah rakyat Indonesia tidak ada keinginannya sesuatu apa dan hidup dalam kesenangan dan kelonggaran. Biarpun buktinya menunjukkan keadaan yang lain, tuan Welter berpendapat lain. Tuan Welter dalam pidatonya dalam Tweede Kamer di dalam bulan Maart ini tahun menerangkan bahwa ia tidak mau perubahan susunan pemerintah dan juga ini bukan seorang yang berkehendak ini (dat hij geen hervoor ming wil en geen hervormer is). Pendirian ini dilaksanakan olehnya bahwa menurut pemandangannya rakyat Indonesia tidak mau ada sesuatu perubahan dan keinginan dan keinginan perubahan hanya dikehendaki oleh beberapa orang saja. Pada tuan Welter cukup menjadi bukti buat pendiriannya pemilihan anggota regentschapsraad menurut rapport-rapport yang ia terima tak ada kegembiraan di kalangan rakyat. Kalau kita periksa dengan teliti ucapan tuan Welter ini maka pertama kita harus menyaksikan bahwa Mantri Jajahan ini sebenarnya tidak mengerti kewajibannya. Seharusnya setiap Manteri Jajahan harus mementingkan apa yang menjadi keinginan masyarakat dan bukan apa yang ia kehendaki.

Apakah benar bilangan tuan Welter bahwa masyarakat Indonesia tidak ada keinginan merubah susunan Pemerintah? Ini sudah tentu tidak benar jika kita periksa keadaan yang sebenarnya. Sehari-hari di pers Indonesia telah diterangkan keinginan masyarakat buat merubah dan meluaskan kekuasaan anak negeri dan susunan pemerintah, setiap rapat dari perhimpunan-perhimpunan rakyat Indonesia memajukan dan memper-kuatkan keinginan ini: dalam Volksraad wakil-wakil rakyat bertahun-tahun meminta perubahan; Volksraad seumumnya dengan petisi Sutardjo telah menyatakan kehendaknya untuk mengadakan perubahan.

Selain ini buat tuan Welter tidak menjadi alasan buat menentukan pendiriannya dan ia menyatakan apa keinginan yang sebenarnya sendiri saja yang tidak disandarkan atas perasaan atau kemauan rakyat Indonesia.

Nyata kesalahan Mantri Jajahan ini.

Tentang ucapannya bahwa waktu pemilihan anggota regentschapsraad tidak ada kegembiraan di kalangan rakyat, kita tidak usah heran melihat susunan raad itu. Hak memilih untuk badan ini caranya memilih, susunan anggota dari raad ini, kekuasaannya, pimpinannya sekalian jni bukan bermaksud untuk mengadakan wakil wakyat yang sejati, akan tetapi memperkuatkan stelselnya buat menetapkan kekuasaannya golongan ambtenaar BB. Sebenarnya kalau tuan Welter sedar, ia harus mencela stelselnya dan dasarnya regentschapsraad dan bukan katim pemilih. Akan tetapi apa yang ia kerjakan sebaliknya! Ini kesalahan yang kedua dari Mantri Jajahan.

Ucapan tuan Welter yang bersalahan dengan keadaan di Indonesia oleh karena itu sudah tentu salah pula, yaitu ucapan pada 4 Maret 1938 di ketika mana ia telah membilang bahwa di bawah kibaran bendera Pemerintah Belanda di Indonesia tidak kelaparan (Honger wordt er in Nederlandseh Indie onder Nederlandsehe vlag niet geleden!).

Kalau tuan Welter sedar pula dan membaca berita-berita di pers Indonesia maka akan nyata padanya bahwa di bawah bendera Belanda itu sehari-hari banyak orang kelaparan, umpama di Bojonegoro, Cirebon, Sumatera Barat, Timor, Bogor, Tangerang di bilangan Bandung, Pekalongan, Sumedang dan seterusnya. Malah timbul penyakit baru yang dinamakan hongeroedeem!

Lain bukti lagi.

Ketika tuan Welter menjadi Voorzitter Ondernemersraad di tahun 1935 maka olehnya telah dikeluarkan ueapan berniat membikin patung buat si Kromo oleh karena ia telah membantu pekerjaan pemerintah di waktu krisis dengan mengikat lebih kencang tali perutnya alias dengan menang-gung kelaparan dengan sabar. Tuan Welter berseru tidak akan ada sesuatu kongsi di Indonesia boleh membagi dividend sebelumnya upah buruh diperbaiki (geen devidend zal uitgekeerd worden alvorens behoorlijke loonen uitbetaald). Seruan ini diperkuatkan oleh Dr. Colijn, di itu waktu Mantri Jajahan. Tidak lama lagi Tuan Welter sendiri menjadi Mantri Jajahan, artinya memegang pimpinan dan kekuasaan.

Apa yang jadi sebenarnya?

Semenjak seruan tuan Welter upah buruh terus turun akan tetapi sebaliknya kongsi – kongsi terus menerus membagi devidend yang besar dan upah buruh tetap rendah, malah lebih rendah. Sehingga saat ini hasilnya aksi rakyat Indonesia yang dibenarkan oleh tuan Welter untuk menaikkan upah buruh hanya bentuknya Commisie untuk memeriksa dan membuat standaard budget (perongkosan hidup sehari-hari) dari kaum buruh.

Ini bukti yang ke-4 yang ucapan Mantri Jajahan tidak cocok dengan keadaan di Indonesia.

Kalau kita melihat bukti-bukti yang singkat ini maka haruskah kita menaruh kepercayaan lebih jauh lagi kepada ucapan-ucapan pembesar Belanda untuk mementingkan dan memperhatikan keinginannya rakyat Indonesia?

Apakah kesalahan ini hanya terdapat kepada tuan Welter saja sebagai Mantri Jajahan? Tidak. Kalau kita periksa ucapan Mantri-Mantri Jajahan yang lain, pendapatan akan bersama saja. Olehnya diucapkan apa yang enak untuk diriliya dan golongannya saja dan segala keinginan rakyat Indonesia yang berlawanan dengan kepentingannya dibrantas serupa saja. Sudah tentu ucapannya atau susunan perkataannya berlainan, serta dibungkus dengan perkataan yang lemah lembut dan yang enak didengarnya, akan tetapi hakekatnya sarna saja.

Keadaan yang demikian tidak asing pada pemerintah di Indonesia juga. Tadi kami telah buktikan dengan menceritakan riwayatnya keangkatan Voorzitter Volksraad dengan cara

bagaimana ucapan tinggal ucapan saja dan perbuatan-perbuatan bertentangan dengan ucapan pemerintah.

Di tahun yang lalu Gouverneur Generaal dalam pidato pembukaannya telah menyatakan adanya hak berkumpul dan bersidang ucapan mana diperkuatkan lagi dalam beberapa bagian dari Memorie van Antwoord.

Betul juga dalam peraturan negeri hak bersidang dan berkumpul ini diakui dengan terang dan syah, sekalipun begitu kita harus buktikan bahwa keadaan sebenarnya berlawanan dengan hak yang terang dan yang diakui ini.

Di dalam afdeelingsverslag telah disebut beberapa kejadian yang membuktikan bahwa hak berkumpul dan bersidang ini hanya diakui di atas kertas saja. Pegawai pemerintah yang rendahan sering-sering tidak menjalankan aturan yang sebenarnya. Mereka menjalankan kewajibannya dengan sesukanya sendiri dan melarang ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan yang tidak berdasar wet. Di manakah ada larangan memakai ucapan Indonesia Merdeka, larangan untuk membicarakan beratnya pajak-pajak, larangan adakan perbandingan keadaan di Indonesia dengan negeri lain, larangan mengeritik sesuatu aturan dari pemerintah dan kenapakah hal ini dilarang oleh pegawai rendahan? Dengan hak apa mereka melarang hal-hal ini dibicarakan dan dengan berdasar apa sesuatu pegawai bisa melarang sesuatu pembicaraan melanjutkan pembicaraannya hanya oleh karena ia menyangka bahwa spreker itu boleh jadi akan mengucap perkataan yang tak sudi ia dengar? Dengan hak apa dan apa alasannya sesuatu pegawai melarang orang yang menerima gajih pada tanggal 1 dari tiap-tiap bulan.

Pada beberapa tempat umpama di Semarang dan Bogor tersohor merajalelanya pegawai politie yang mengunjungi rapat-rapat perhimpunan politik. Apakah diboleh saja mereka bertindak demikian yang katanya berdasar atas hak kepolisian untuk mencegah akan kejadian hal-hal yang terlarang! Kebanyakan pegawai polisi ini tidak faham soal-soal yang dibicarakan; ia orang hanya rnenghafal beberapa perkataan yang dikatakannya dan didikkannya dilarang; mereka harus mengingat bahwa kewajibannya yang terutama bahwa hak berbicara itu harus dijaga dan dipelihara oleh karena berdasar atas wet; mereka harus mengingat pula bahwa kewajibannya yang terutama menjaga ketenteraman-nya rapat. Keadaan rnernperlihatkan sebaliknya!

Oleh karena mereka rnengganggu pembicara dan melarang memakai ucapan yang sebenarnya tidak harus terlarang dan juga tidak berbahaya, mereka mengganggu ketenteraman jalannya rapat sehingga ia tidak melakukan kewajibannya yang terutama.

Pegawai rendahan yang harus mengetahui perbedaan antara menganjurkan dan menghasut antara mencela dan menghina; mereka tak boleh lantas kaget mendengar perkataan-perkataan yang biasanya tidak benar di kalangan sobatnya atau rumah tangganya. Jangan kaget pula jika dalam rapat ada sorak riuh atas ucapan pembicara, sebab ini sudah seharusnya jika pembicara memakai ucapan yang jitu. Janganlah mereka berpendirian atau bersikap seolah-olah sesuatu pembicara di rapat umum dengan sengaja hendak menghasut atau menghina. Mereka harus mengetahui bahwa juga di luar kalangan ambtenaar bisa timbul pikiran dan pemandangan yang sehat dan berguna untuk masyarakat. Janganlah pembesar Pemerintah datang di rapat-rapat umum dengan perasaan bahwa jika mereka tidak campur mulut atau tidak campur tangan, seolah-olah mereka tidak menjalankan kewajibannya. Harus pemerintah memperingat-kan kepada pegawainya bahwa hak berbicara hanya boleh dibatas jika akan rnengganggu ketenteraman umum (verstoring van open-bare orde) dan dimanakah bisa kejadian adanya gangguan ketenteraman umum hanya dengan perkataan saja? Belum pernah kejadian di Indonesia biarpun di waktu pergerakan di puncaknya berpropaganda yang dalam sesuatu rapat umum atau rapat tertutup telah ada gangguan ketenteraman umum sebagaimana dimaksud dalam wet.

Dengan cara penilikan yang berlaku demikian ini harus dirubah. Jika pegawai pemerintah memberi contoh tak mengetahui atau tak menghormat aturan negeri, maka akibatnya lambat-laun kehormatan terhadap wet akan lenyap.

Wet yang adil harus dijalankan secara yang adil, ukuran sendiri-sendiri harus dilepaskan. Wet yang adil jika dijalankan salah akan menimbulkan keganjilan dan kecurangan. Pegawai Pemerintah harus menjaga jangan timbul perasaan pada umum bahwa mereka tidak mengetahui aturan dan tidak mengetahui keadilan.

Tuan Voorzitter! Di dalam afdeelingsverslag telah dikemukakan keinginan beberapa angota supaya ada satu badan

dari pemerintah yang memperhatikan keinginan masyarakat Indonesia supaya pemerintah bisa menjalankan kewajibannya yang sejati terhadap masyarakat. Kami mengakui kebenaran ucapan pemerintah yang di kongres atau di rapat juga hadir lain wakil pemerintah selainnya wakil polisi.

Setahukah di mana terletak kesalahannya, akan tetapi yang kami bisa saksikan hanya seolah-olah hanya pemerintah tak mengetahui apa yang telah menjadi umum di seluruh masyarakat Indonesia. Kalau pemerintah cukup mengetahui keinginan umum masyarakat Indonesia maka buat kami satu teka-teki apakah lantarannya ia menolak memakai ucapan-ucapan yang sudah umum di masyarakat Indonesia sebagai perkataan-perkataan Indonesier, Indonesich dan Indonesia.

Alasan pemerintah dalam Memorie van Antwoord bahwa perkataan ini tidak terdapat dalam undang-undang negeri tidak cukup kuat oleh karena sebaiknya ia memakai perkataan Inheemsch yang sebenarnya juga tidak diatur dalam undang-undang yang penting.

Ucapannya lagi yang perkataan Indonesia dan sebagainya bisa digugat bagi kami tidak berharga dan tidak menjadi pendirian yang teguh, oleh karena Pemerintah tidak memajukan alasan untuk pendiriannya. Jika pemerintah hendak berdebat, benar atau tidaknya perkataan Indonesia, maka ia harus berdebat dalam kalangan ilmu yang telah mengesahkan perkataan ini.

Keinginan masyarakat Indonesia terang supaya perkataan Inlander dan Inheemsch diganti dengan Indonesier dan Indonesisch. Perkataan "Inlander" tidak menyatakan sesuatu kebangsaan sedang rakyat Indonesia berbangsa dan juga sebab perkataan "Inlander" tidak sewajarnya dipakai untuk menyatakan penduduk sesuatu negeri. Di Wet negeri Belanda juga tidak dipakai ucapan "Inlanders" untuk penduduk negeri Belanda. Lambat-laun perkataan Inlander di Indonesia sudah mendapat artian yang merendahkan dan mengecilkan.

Perkataan "Inlander" sudah mendapat cap murah dan setiap bangsa yang direndahkan derajatnya sudah tentu berkehendak menghindarkan kerendahan itu.

Tentang soal ini fractie P.P.B.B. telah berjasa oleh karena ditahun 1932 mendesak kepada Pemerintah untuk memakai

ucapan-ucapan ini, akan tetapi rupanya sia-sia saja. Permintaan P.P.B.B. dengan rekes kepada Pemerintah telah ditolak. Kami bermaksud minta persetujuan Volksraad tentang hal ini.

Juga terhadap keinginannya masyarakat Indonesia untuk diakui hak mempunyai bendera dan lagu kebangsaan Pemerintah bersikap menolak, biarpun sekalian keinginan ini bersikap merugikan pemerintah atau meminta suatu hal yang luar biasa. Rakyat Indonesia bagian yang terpelajar dan yang telah sadar merasa perlu mengadakan sendi-sendi untuk memuliakan kedudukannya sebagai bangsa, maupun terhadap bangsa yang lain di negeri ini, maupun terhadap dunia luar.

Apakah alasannya Pemerintah untuk menolak keinginan-keinginan ini sedang ia sendiri bilangnya berpen-dirian hendak muliakan rakyat yang dipimpinnya? Manakah teladan Pemerintah sendiri terhadap bendera dan lagu kebangsaan rakyat Indonesia dan apakah alasannya untuk meminta kehormatan dari rakyat Indonesia terhadap bendera dan lagu kebangsaan Belanda, jika ia sendiri tidak bersikap menghormat?

Betul sikap pemerintah dalam hal ini tidak begitu penting dan rakyat Indonesia terus akan menghormat lagu kebangsaan dan benderanya dan tidak akan memusingkan sikap Pemerintah, akan tetapi jika hal-hal yang kedl ini tidak diperhatikan dari fihak Pemerintah malah ditolak olehnya, bagaimana karni orang harus menaruh kepercayaan bahwa rakyat dan Pemerintah Belanda akan sudi memberi kelonggaran dan tambah kekuasaan kepada rakyat Indonesia dalam hal yang lebih penting dan yang akibatnya lebih besar dari hal yang kami majukan sekarang?

Oleh karena sikap dan pendirian dari Pemerintah Belanda, maupun Indonesia maka anjuran Pemerintah untuk bekerja bersama tak ada artinya. Rupanya maksud Pemerintah untuk bekerja bersama dengan rakyat Indonesia hanya jika kami orang bermufakat saja dengan segala keinginannya. Terutama sekarang dalam waktu yang mengandung kegentingan keadaan internasional maka tak perlu kiranya menerangkan lebih jauh keperluan yang terutama untuk bekerja bersama antara Pemerintah dan rakyat Indonesia dengan harga menghargai dan

hormat menghormati. Tuan Voorzitter! Tentang bagian ekonomi maka buat bermula kata kami hendak memajukan pujian terhadap Memorie van Antwoord yang agak lurus dan terang. Memorie van Antwoord tahun ini bersifat hendak menerangkan sejelas-jelasnya dengan tidak bermaksud mencela atau menyindir apa yang diajukan dari fihak Volksraad, dan tidak pula bersifat seolah-olah Wakil Pemerintah bagian ini yang mengetahui sendiri keadaan ekonomi Indonesia.

Sudah tentu bukan maksud kami membicarakan segala hal yang disebut dalam Memorie van Antwoord dan kami akan pilih hal-hal yang penting saja sedang lain-lain bagian akan dibicarakan oleh sesama anggota fractie kami.

Pemerintah telah menerangkan dengan luas tindakan-tindakannya di bagian perluasan tanaman-tanaman untuk dimakan (voedsel-bouw), pemberantasan penyakit-penyakit tanaman (ziektebestrij-ding), pemindahan rakyat (kolonisatie), cooperatie dan di bagian pelajaran.

Jika kami membaca keterangan-keterangan ini serta memeriksa staat-staat yang dilampirkan maka seolah-olah tak bisa diperbaiki lagi pekerjaan pemerintah dan rakyat Indonesia berada dalam kekuasaan dan kesenangan.

Akan tetapi bila kita melihat angka-angka dan ran-cangan afdeeling VII maka nyata bahwa untuk begrooting tahun 1940 hanya ditambah belanja f. 2.700.000 (gewone dienst) sedang belanja total dari begrooting ini hanya f. 20.000.000 saja, belanja mana untuk mengurus ekonomi seluruh Indonesia. Tak perlu sekiranya melihat angka-angka ini kami harus menjelaskan lebih jauh bahwa dalam pemeliharaan ekonomi Indonesia masih banyak kurangnya.

Yang lebih penting bagi kami pertanyaan apakah pekerjaan pemerintah di lapangan ekonomi membawa tambahan hasil uang untuk rakyat Indonesia, dan jika kami periksa aanslag dari in-komsten belasting buat bagian Indonesia dari tahun-tahun 1935 dan 1936 (Indisch verlag 1938), maka nyata dari tabel 110 turun penghasilan itu dengan sekalian susunannya. Sayang sekali tidak ada angka-angka dari tahun-tahun yang lebih belakang. Betul di halaman 9 dari Memorie van Antwoord terlihat naiknya angka loonbelasting dari tahun-tahun 1934/1938, akan tetapi angka-angka

yang kami sebutkan bertentangan dengan tambah hasilnya masyarakat Indonesia. Maka oleh karena itu sekalipun kami pujikan kerajinannya Departement van Economische Zaken dalam tahun – tahun yang belakang akan tetapi dengan menyesal kami harus menyaksikan kemundurannya penghasilan dari masyarakat Indonesia di lain bagian.

Jika kami periksa angka-angka export dan import maka nyata dari verslag Javasche Bank yang uang kita kebanyakan mengalir ke bagian Eropa.

Menurut verslaf Javasche Bank halaman 46 dan 65 maka export dan import Indonesia di tahun 1938 sebagai berikut:

Europa	Uitvoer (keluar) 37.35 % dari jumlah Sekalian	Inover (masuk) 50.13%
Amerika	15.09%	13.24%
Asia	29.15%	32.24%
Australia	5.52%	2.78%
Afrika	5.68%	0.92%
Lain-lain negari	7.21%	0.45%
	100%	100%

Nyata dari angka-angka ini yang perdagangan kita dengan bagian Eropa membawa sifat kerugian oleh karena kita harus membelanja lebih banyak dari penjualan kita padanya. Ini harus ditambah dan harus diadakan pembatasan masuknya barang dari Eropa sehingga angka-angka barang keluar dan masuk jangan terlalu jauh perbedaannya.

Jika kita periksa angka-angka tentang kemasukan barang katoen en manufacturen yaitu barang yang di pakai oleh rakyat seumumnya, maka akan nyata pula bahwa masuknya barang ini dari Eropa merugikan kepada kita oleh karena harga barangnya

terlalu tinggi. Di halaman 63 dari verslag Javasche Bank, akan nyata pada pembaca yang terutama Nederland pada tahun 1938 mendapat kedudukan luar biasa sebab angka 33.45% dari banyaknya kemasukan barang itu mendapat bagian harga sehingga 42.04%, sedang negeri Japan yang memasukkan 56.45% dari banyaknya barang (menjadi kira-kira 13/4 x banyaknya dari Neder-land) bagian harganya hampir sama saja yaitu 42.80 %. Ini menandakan kepada kita mahalnya harga barang baru Nederland sedang rakyat di sini penghasilannya makin mundur oleh karena liarga hasil buminya telah turun dalam tahun 1938. (Halaman 29/28 verslag Javasche Bank).

Tentang harganya beras dan padi kami hendak mengajukan pemandangan dan pertanyaan sebagai berikut:

Harga padi dan beras dikuasai oleh pemerintah oleh karena dengan peraturan rijstinvoerregeling dan peraturan lisensi banyaknya kemasukan beras serta harganya buat dijual dalam negeri pemerintah bisa menentukan. Jika harga padi dan beras naik, maka pemerintah mendatangkan beras dari luar negeri untuk menurunkan harga beras dan sebaliknya jika terlalu banyak beras sehingga harganya terlalu rendah di sesuatu bagian di Indonesia, ia keluarkan beras yang kebanyakan dari bagian ini.

Untuk menentukan harga yang cukup kepada orang tani, maka kepada penggilingan diperintahkan membeli padi dengan harga yang ditentukan (richtprijzen).

Yang kami hendak kemukakan apakah jaminannya harga yang ditentukan oleh pemerintah akan diturut oleh pembeli padi alias penggilingan beras? Apa hukuman-nya jika ia menyimpang dari harga yang ditentukan? Sepanjang tahu kami tidak ada sanksi (hukuman) atas perbuatan ini dan oleh karena itu kabarnya kaum penggilingan tidak menurut richtprijzen yang ditentukan sehingga kaum tani yang rugi.

Juga tidak ada pemeriksaan yang teliti sehingga harga penjualan beras juga cocok dengan harga yang di tentukan. Siapa yang mengawas-awasi warung – warung sehingga rakyat tidak harus membeli beras diatas harga yang ditentukan dan apakah ada pengawasan buat kwalitetnya beras yang dijual?

Sepanjang kabar yang kami terima maka pemerintah bermaksud membeli padi banyaknya 25.000 ton untuk disimpan sebagai simpanan (reserve) buat balatentara laut dan darat dan

padi itu akan disimpan di Surabaya. Uang yang disediakan banyaknya f.1.000.000 akan digunakan di bulan Juni dan Juli dan pembagian beli diatur f. 500.000 buat bagian Jawa Timur (Lumajang, Jember, Banyuwangi etc) dan f. 500.000 buat bagian residensi Surabaya dan Kediri.

Padi ini akan dibeli dari penggilingan beras dan padanya diwajibkan membeli padi dari kaum tani dengan harga f 3.25 per kwintal.

Akan tetapi menurut kabar yang kami dapat kaum penggilingan tidak menurut harga ini dan mereka membeli dengan harga yang lebih rendah. Tambahan pula pemotongan padi di bagian residensi Surabaya dan Kediri di bulan Juni sudah selesai sehingga padi kebanyakan sudah dalam tangan penggilingan pada itu dengan harga f 2.40 - f 2.60 per kwintal. Kabarnya pemerintah membeli padi dari kaum penggilingan dengan harga f 4.45 per kwintal sehingga kaum penggilingan mendapatkan keuntungan luar biasa besarnya yaitu f 1.85 sampai f 2.85 per kwintal.

Apa sebabnya pemerintah tidak membeli padi dengan langsung dari orang tani sehingga harga yang ditentukan olehnya juga di tangan kaum tani dengan sepenuhnya? Dan jika di salah satu bilangan yang kami sebutkan pemotongan padi telah selesai maka kami harap pemerintah sudi menunggu 3-4 bulan lagi sehingga ada pemotongan baru (tweede snit). Dengan jalan demikian maksud pemerintah akan lebih mudah terkabul daripada cara bekerja yang sekarang diperhatikan. Kami harap keterangan ini akan diperhatikan dan kami meminta keterangan yang jelas tentang pembelian padi di Jawa Timur dan tentang penjagaan harga padi dan beras untuk umum.

Keberatan pemerintah buat membeli padi dengan langsung dari rakyat sebagaimana tersebut dalam halaman 25 dari Memorie van Antwoord kami tak setuju. Dalam halaman ini pemerintah mempertahankan pendiriannya membeli padi dengan perantaraan penggilingan beras oleh karena katanya tak ada pegawai yang cukup dan yang pandai buat mengerjakannya. Dan lagi pemerintah persangsi apakah dengan pembelian langsung ongkos pembelian bisa sama murahnya dengan pembelian dan penggilingan.

Pertama kami hendak majukan bahwa pembelian padi dari rakyat dari tahun-tahun yang lalu telah sering dijalankan maupun dengan perantaraan ambtenaar B.B. atau lain pegawai, dan tidak

kenyataan cara bekerja ini tidak beres atau merugikan pada pemerintah.

Jangan lupakan bahwa dengan pembelian langsung harga yang ditentukan oleh pemerintah buat beli padi jauh dengan sepenuhnya di tangan rakyat sedang dengan cara bekerja sekarang sebagian besar dari harga itu jatuh di tangan penggilingan.

Yang penting bagi kami adanya satu aturan yang memberi tanggungan bahwa harga padi yang ditentukan akan dibelanjakan juga oleh penggilingan dan jika penggilingan tidak menurut perintahnya pemerintah selainnya mereka tak boleh menjual padi kepada pemerintah, supaya ada hukumannya. Tentang hal ini kami minta jawaban yang tentu oleh karena soal richtprijzen penting buat seluruh Indonesia.

Tuan Voorzitter! Sebagaimana nyata dari beg-rooting Departement B.B., maka banyaknya ambtenaar B.B. harus ditambah untuk mengerjakan pekerjaan di lapangan ekonomi harus dikerjakan oleh ambtenaar B.B. dan mereka ini menjadi pusatnya economie di desa dan di district.

Keberatan kami terhadap aturan ini yaitu ambtenaar B.B. yang diberatkan menilik jalannya economienya sedang ia tidak dididik di lapangan ini dan oleh karena itu tak ada jaminan akan beres jalannya ekonomi rakyat Indonesia. Kami menganjurkan supaya diadakan pembagian pekerjaan yang baru sehingga balik pada aturan yang dulu berlaku, dan kekuasaan ekonomi untuk rakyat dipindahkan kepada ajunct landbouwconsulent dan landbourconsulent dan supaya amb-tenaar B.B. dibebaskan dari pekerjaan di lapangan ekonomi.

Kami minta perhatian pemerintah buat keadaan soal pinjaman uang (creditverhoudingen) di lapangan tani kapok. Menurut pemeriksaan Mr. Sunario dalam tijdschrift Volkscredietwezen Maart 1939 diterangkan bahwa di kalangan tani kalangan tani kapok terdapat keadaan pinjaman dengan rente sebesarnya 800% setahunnya. Tindakan apakah pemerintah akan mengambil terhadap keadaan yang ganjil ini?

Terhadap soal kopra kami baca halaman 15 dari Memorie van Antwoord bahwa mundurnya perdagangan ini hanya terjadi oleh karena pasar dunia tentang minyak ada dalam kemunduran dan pemerintah telah berdaya untuk mempertahankan kedudukan kopra Indonesia di pasar dunia.

Kami minta perhatian pemerintah untuk menjaga keadaan minyak kelapa di dalam negeri ini. Menurut jaaroverzicht van Nederlandsch Indie buat di tahun 1937 (mededeeling C.K.S. No.]59) maka di daerah luar Jawa dan Madura da]am tahun 1937 telah dimasukkan minyak kelapa seharga 1.218.386 rupiah dari bilangan Malaya, Penang, Singapura dan Britisch Noord Borneo, masuk minyak dari luar negeri ini tidak bisa dilarang sehingga minyak kelapa Indonesia menggantinya kemasukan ini.

Di halaman 8 dari Memorie van Antwoord kami baca bahwa banyaknya cooperatie di tahun 1930 dari 89 telah naik sehingga 540 di tahun 1938. Sepanjang pengetahuan kami tambahnya cooperatie bukan lantaran kerajinannya pemerintah akan tetapi hanya lantaran cooperatie-cooperatie itu timbul dari kalangan rakyat sendiri.

Kami hendak usulkan supaya pemerintah menunjang hidupnya cooperatie ini dengan berupa uang. Umpamanya buat tiap-tiap cooperatie tunjangan uang sebesar 5 sampai 10 rupiah tiap-tiap bulan buat membayar ongkos administrasi.

Kebanyakan cooperatie rakyat bermodal dari 50 sampai 250 rupiah dan cooperatie yang kecil ini minta banyak ongkos administrasi berhubung dengan peraturan ordonantie untuk cooperatie.

Sudah tentu modal cooperatie yang kecil ini tidak kuat memikul ongkos administrasi yang perlu itu dan lambat-laun modal yang dimakan dan habis untuk administrasi saja.

Sekiranya 600 cooperatie mendapat cuma f 60.000 setahun.

Melihat besar kepentingannya cooperatie ini dilapangan ekonomi rakyat Indonesia maka kami harap usul akan mendapat persetujuannya pemerintah.

Tuan Voorzitter juga terhadap jawaban pemerintah tentang industrialisasi kami hendak ucap pujian oleh karena tegasnya dan luasnya jawaban itu. Terang pula dari jawaban ini bahwa bagian ini mendapat perhatian yang luas dari fihak pemerintah dan dalam beberapa hal bisa kami setujui dengan tindakan pemerintah.

Hanya kami akan menyatakan kekuatiran kami bahwa jika industrialisasi itu akan dijalankan seba-gaimana maksud pemerintah dengan kapital dari negeri Belanda dan negeri asing, maka disampingnya agra-rische drainage (pengaliran uang)

akan timbul pula industrieele drainage dan keadaan ini akan berakibat menimbulkan kesusahan yang lebih besar untuk rakyat Indonesia.

Untuk mencegah mengalirnya uang dari Indonesia maka perlu mengadakan industrie dengan kapital anak negeri dengan pemtrie dengan kapitaal anak negeri dengan pembatuan pemerintah dan jalan-jalannya kami telah terangkan di tahun lalu.

Industrialisasi di Indonesia untuk membikin barang-barang yang perlu dipakai rakyat Indonesia dan yang kita sehingga sekarang membeli dari luar negeri harus diperlekaskan melihat kejadian-kejadian di lain bagian dari Asia.

Pada masa ini negeri Japan tidak begitu mementingkan menjual barangnya di Indonesia oleh karena di negerinya dilakukan ekonomi peperangan sehingga semua tenaga ditujukan untuk balatentaranya. Jika peperangan antara Japan dan Tiongkok telah selesai sebagai dulu rnenang, rnaka industrinya akan bekerja sebagai dulu dan sudah tentu rnereka akan memaksa lebih keras untuk rnasuk barangnya di Indonesia oleh karena kedudukannya di Asia pun akan lebih berkuasa. Jika sehingga sekarang ia menerima beberapa pembatasan buat masuk barang-barangnya, ia di kemudian hari akan bersikap lain sebab jika Japan telah mengalahkan Tiongkok, Japan akan mendapat kedudukan yang berkuasa di Asia sehingga ia bisa memaksa kepada siapa juga menurut kepada kemauannya.

Oleh karena itu seharusnya kita mengadakan industrie untuk rnencukupkan keperluan kita sebab negeri asing tidak bisa memajukan keberatannya jika ada perlindungan industrie anak negerinya sendiri.

Soal yang berhubungan dengan pembangunan indus-trie, yaitu soal upah buruh dan kekuatan belanja rakyat. Tidak ada gunanya mengadakan industrie jika rakyat tidak bisa membeli barang-barang bikinan itu, sebab tak ada uangnya. Oleh karena itu harus dipelajarkan juga cara bagairnana belanja rakyat bisa diperkuatkan dan selainnya meninggikan upah buruh dan membesarkan hasil rakyat harus pemerintah membangunkan kapitaal nasional Indonesia dan menjaga pengaliran uang keluar.

Kami tidak setuju dengan pendapatan Pemerintah sebagaimana tersebut dalam halarnan 23 dalarn mana dinyatakan,

bahwa pengeluaran uang Indonesia untuk rente dan devidend curna sebanyaknya 20% dari harga export dan jumlah ini tidak seberapa oleh karena sama saja dengan keadaan di Ceylon, Zuid Afrika, Australia dan Nieuw Zeeland. Dengan perbandingan negeri-negeri ini dengan Indonesia seolah-olah pemerintah hendak rnengatakan bahwa pengaliran keluar uang dari Indonesia tidak seberapa dan sudah lumrah saja. Harus jangan dilupakan keadaan di negeri-negeri itu tidak sarna dengan di sini.

Di negeri-negeri yang tersebut di samping pengaliran keluar uang untuk membayar rente dan deviden boleh dibilang tidak ada pengeluaran keluar uang dari sumber-sumber yang lain, akan tetapi di Indonesia boleh dibilang hampir segala surnber uang mengalir keluar sebagaimana nyata dari angka-angka yang terdapat di betalings-balans seperti passages-koten, delegaties directiecosten di luar negeri pem-bayaran hutang uang untuk pensiun, assuransi jiwa dan lain-lain sehingga di Indonesia sendiri tidak ada sumbangan uang untuk kapitaalvorming. Oleh karena itu perbandingan negeri-negeri tersebut dengan Indonesia hanya dalam lapangan pembayaran rente dan devidend dapat menimbulkan kekeliruan.

Di halaman 6 dari nota bagian Nijverheid diberitakan bahwa untuk middenbedrijven akan dibangunkan "georganis-seerde distributie". Kami berharap supaya disamping maksud ini akan dibentuk pula creditverstrek-king untuk perusahaan-perusahaan ini supaya menunjang kekuatannya dan menggampangkan mendapat uang untuk bekerja terus dan memperluaskan perusahaan jika perlu.

Tuan Voorzitter! Tentang keuangan (financien) sedikit sekali hasilnya jika kami bertukar fikiran dengan Pemerintah melihat sikapnya terhadap rancangan begrooting tahun-tahun yang sudah. Boleh jadi di bagian Afd. III, kami akan melanjutkan pembicaraan kami.

Menurut pendapatan Pemerintah maka untuk tahun 1940 ada kekurangan belanja sebesarnya 40 mm, buat dienst biasa dan oleh karena itu akan diusulkan beberapa kenaikan belasting sebesar kira-kira f 10 mm, yang sebentar saja akan bicarakan lebih lanjut lagi.

Dalam afdeelingverslag telah dinyatakan kebera-tannya fihak Volksraad untuk menaikkan beberapa rupa pajak oleh karena pikulan rakyat telah terlalu berat dan oleh karena pilihannya

Pemerintah terhadap pajak-pajak yang akan dinaikkan ada salah sebab akan memungut pajak dari fihak yang sudah berat pajaknya, yaitu menaikkan opcenten pajak penghasilan sehingga 75% dan menurunkan tarif buat pajak penghasilan.

Tambahan lagi rancangan Pemerintah untuk jalannya begrooting belum tentu benar. Telah beberapa kali nyata yang taksiran Pemerintah tentang berbagai-bagai penghasilan negeri ada terlalu rendah. Buat tahun 1938 sudah terang taksiran Pemerintah ada salah oleh karena pendapatan negeri ada 34 millioen lebih banyak dari apa ditaksir kedua kalinya (herziende raming).

Apakah mungkin kejadian sehingga di tahun 1940 juga taksiran Pemerintah bisa salah sehingga tak perlu menaikkan pajak sebagaimana diniat olehnya.

Sudah pasti ada terang yang kekurangan belanja untuk tahun 1940 disebabkan belanja untuk balatentara ada luar biasa besarnya.

Jika dibanding dengan tahun 1935 maka untuk balatentara di tahun 1940 belanjanya dinaikkan lebih dari 100% (f 50 mm, dalam 1935 dan f 106 mm dalam tahun 1940) buat begrooting di sampingnya belanja ini sejumlah 87 milliun buat begrooting luar biasa buat tahun-tahun 1936-1940.

Oleh karena itu amat heran kami untuk membelanjai belanja peperangan dipungut dari sumber inkomstenbelasting sedang pajak defensieuitvoerrecht hendak dilepaskan.

Pembelaan negeri dan belanja peperangan terutama penting buat golongan kapital yang mempunyai harta benda yang berharga di negeri ini. Rakyat seumumnya tak mempunyai harta benda dan oleh karena itu, buat mereka tak perlu ada perlindungan luar biasa.

Kaum kapital yang berkepentingan, yang berharta benda harus membayar belanja peperangan dan oleh karena itu bea defensieuitvoerrecht harus dipertahankan dan dinaikkan.

Untuk mencapai maksud ini kami akan usulkan jika ordonantie yang mengenai soal-soal ini akan diperbincangkan.

Juga kenaikan venootschapbelasting sehingga 25% dari keuntungan supaya dinaikkan lagi. Jangan dilupakan, bahwa

venoott-schappen hanya harus membayar pajak ini jika ia mendapat keuntungan. Kalau tidak ada keuntungan mereka tidak membayar apa-apa, biarpun penghasilannya besar. Pendapatan negeri dan pemeliharaan negeri terhadap mereka terus tetap ada sehingga adil juga jika untuk mereka diadakan minimum aanslag biarpun tidak ada keuntungannya. Di negeri-negeri lain pajak untuk venootschappen tidak melulu diambil dari keuntungan, ada hadap mereka terus tetap ada sehingga adil juga jika hanya ada pajak dari keuntungan maka bagian untuk pemerintah negeri jauh lebih tinggi dari 25% malah ada yang sehingga lebih dari 50% seperti di Inggris dan Amerika jika keuntungan itu luar biasa besarnya.

Kami tetap mempertahankan usul untuk mengadakan uitvoerrecht buat teh dan kina dan gula. Mengapa rubber dikenakan uitvoerrecht sedang teh, kina, gula dibebaskan sedang terhadap hasil-hasil ini juga terdapat penjagaan dari fihak pemerintah sebagaimana ada buat rubber?

Tuan Voorzitter! Bea untuk minyak tanah oleh Volksraad telah diminta 5 kali dengan jalan mosi. Pemerintah selalu menolak biarpun keuntungan bersih dari kongsi minyak tanah itu dalam setahunnya ada puluhan juta (1938 f 88 mm; 1939 f 87.6 mm).

Sekarang dalam Memorie van Antwoord halaman 7 Pemerintah memberitahu akan dicari" peraturan baru cara bagaimana penghasilan dari sumber minyak tanah bisa dirubah akan tetapi katanya peraturan yang baru ini bukan bermaksud mencari penghasilan yang lebih besar akan tetapi hanya yang lebih tetap saja.

Kami mendesak pada Pemerintah supaya mencari peraturan yang memberi hasil pada negeri yang lebih besar sebab adil sekiranya bahwa negeri mendapat hasil lebih banyak sebab kekayaan negeri semakin hari semakin kecil oleh karena minyaknya diambil dan sudah tentu semakin menjadi kurang". 3)

Salah satu masalah penting di negeri kita, adalah masalah Indo (Peranakan). Di dalam Kongres Parindra yang pertama hal ini juga telah dibicarakan. Pendapat Parindra dan Muhammad Husni Thamrin ini cukup mendapat tanggapan, terutama dari golongan Indo – Arab. Tokoh Partai Arab Indonesia, AR Baswedan

juga telah memberikan tanggapannya di dalam majalah *Aliran Baru* (No.9 April 1939, hal. 5).

Tentang pendapat Muhammad Husni Thamrin, ikutilah kutipan berikut:

> "Seperti yang sudah disiarkan dan dinanti-nanti dari sekian lama, bahwa di"dalam Kongres Parindra yang dilangsungkan di Bandung pada beberapa minggu yang lalu, adalah soal "Indo" telah menjadi satu-satunya pembicaraan yang sangat menarik.
>
> Indo dalam pengertian sehari-hari, maupun dalam pengertian politik, umumnya orang kenakan melulu cuma golongan peranakan bangsa Belanda yang bukan totok.
>
> Bahkan antara penulis – penulis bangsa Indonesia yang membicarakan soal "Indo" sampai ini hari banyak yang membayangkan golongan "Indo Belanda" semata-mata di hadapannya sewaktu mereka menyusun perundingannya, sehingga kalau onderwerp ini dikupas, maka cuma nama Insulinde atau LE.V. saja yang selalu disebut-sebut orang dan dibuat ukuran!
>
> Tetapi lambat-laun pengertian dari perkataan "Indo" menjadi lebih luas, karena di samping perhimpunan Belanda peranakan, kini sudah timbul pula perhimpunan-perhimpunan Tionghoa peranakan yang berwujudkan P.T.L., Arab peranakan yang melahirkan P.A.I., dan belakangan sekali timbul lagi P.H.I. dari golongan Hindustani peranakan.
>
> Dalam kongres Parindra di Jakarta pada bulan Mei 1937 orang telah memajukan usul buat membuka kesempatan kepada golongan Indo untuk menjadi anggota Parindra. Kongres memutuskan: menunda usul itu sehingga kongres .yang akan datang di Bandung pada penghabisan Desember 1938 yang lalu. Sementara buar berikan keputusan di tentang itu, telah diminta Praedviesnya tuan M.H. Thamrin, di dalam mana tuan M.H. Thamrin telah dibentangkan pendapatnya tentang berbagai golongan Indo yang ada sekarang!
>
> Golongan Indo Belanda: kedudukannya di dalam hukum negeri ada berlainan dengan bangsa Indonesia, lantaran mereka termasuk golongan "onderdanen-Nederlanders" yang kedudukannya bukan saja berlainan, akan tetapi berkelebihan juga jika dibandingkan dengan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, kedudukan mereka dalam arti sosial dan ekonomi berbeda, mengingat kebanyakan mereka mengaku dan merasa menjadi "Nederlander", artinya keperluan kepentingan mereka ditujukan dan dipersatukan dengan apa yang jadi pangkal keinginan bangsa Belanda asli.

Baru pada bulan Agustus 1938 di Semarang berdiri "Insulin-de" yang katanya berkehendak menuju ke arah Indonesia, tetapi apa yang dimaksud dengan tujuan ke arah Indonesia belum terang dengan jelas, biarpun nama promotornya J.J. Teuwen cukup menjadi tanggungan bahwa golongan ini bermaksud mempersamakan kedudukannya dengan kedudukan golongan Indo dalam segala hal, tapi buat sementara baiklah dinantikan sesudah peraturan-peraturannya, dipelajari dan nyata kelakuannya di dalam praktek.

Golongan Indo Tionghoa: kedudukannya dalam hukum negeri sarna dengan bangsa Indonesia, akan tetapi dalam arti sosial dan ekonomi ada berlainan, dan didikannya serta fahamnya juga berlainan.

Mereka yang tergabung dalam Partai Indonesia, dan mereka mengaku dan menerima Indonesia sebagai tanah airnya. Akan tetapi golongan Tionghoa Indo dengan menuju ke arah Indonesia, tetap berkehendak memegang teguh adat dan pendidikan Tionghoa (cultureel idiell).

Tujuan P.T.I. ke arah Indonesia hams diartikan begini: yaitu mereka menerima dan suka dipersamakan haknya dengan bangsa Indonesia dalam lapangan hukum negeri (Staatsrechtelijk) dan mereka berkehendak membela kepentingan Indonesia jika bentrokan dengan negeri lain, umpamanya dengan negeri Belanda atau sekalipun dengan negeri Tiongkok sendiri. Dalam segala hal yang lain PT.I. tetap hendak menjadi bangsa Tionghoa, maupun dalam hal didikan, adat atau agama dan selainnya.

Golongan Indo – Arab: buat sebagian besar apa yang dimajukan terhadap golongan Indo Tionghoa ada berlaku pula terhadap Indo Arab. Tetapi ada sesuatu hal yang membikin sehingga perbedaan golongan Arab ,peranakan dengan golongan Indonesia tidak begitu "accentueeren" (tidak begitu nyata), yaitu persatuan agamanya dengan bangsa ini menggampangkan

perkawinan antara bangsa Arab dan bangsa Indonesia dan asimilasi proses antara kedua bangsa pun lebih mudah.

Perbedaan adat dan faham sudah tentu asa, akan tetapi tidak begitu nyata, oleh karena persatuan agama itu!

Faham Indo Arab dalam arti politik dalam garis-garis besar boleh dikatakan sarna dengan golongan Indo Tionghoa, yaitu mereka bersedia untuk menjadi Indonesier dalam segala hal, oleh karena mereka juga berpendirian bahwa Indonesia tanah tumpah darahnya, dan tempat mereka akan dikubur juga.

Golongan Hindustani Indonesia: Tental\g perhimpunan ini belum diketahui dengan pasti, tapi kira-kira sifatnya dalam banyak hal bisa dipersamakan dengan PT.I., atau P.A.I. yaitu bergantung pada anggotanya memeluk agama Islam atau tidak".[4])

Kemajuan yang dicapai oleh Parindra, sebagai partai di mana Muhammad Husni Thamrin adalah tokoh yang cukup penting, telah memberi harapan baginya. Karena itu, dia pernah rnembuat suatu tulisan untuk menyambut berkembangnya jumlah anggota Parindra, dari 10.000 ke yang ke 20.000.

Tentang hal ini ikutilah kutipan berikut:

"Ketika Parindra berkongres kedua kalinya di Bandung pada tanggal 23/26 Desember 1938, maka banyaknya anggota kira-kira 4.500 orang.

Biarpun angka ini menandakan suatu kemajuan yang pesat jika dibandingkan dengan banyaknya anggota ketika berkongres ke I di Jakarta tahun 1937 oleh karena banyaknya anggota di itu waktu kira-kira 3.000 orang, maka keadaan banyaknya anggota di tahun 1938 belum memuaskan. Oleh karena itu kami telah anjurkan di Kongres Bandung, maupun di Suara Parindra untuk meluaskan organisasi kita dengan jalan menambah anggota dan untuk mencapai maksud ini kami anjurkan semboyan:

"Menuju ke 10.000!"

Semboyan "Menuju ke 10.000" bermaksud supaya di waktu kita berkongres di Banjarmasin dalam tahun 1940 Parindra akan mempunyai anggota 10.000 orang.

Sengaja kami mengambil tempo yang luas karena Parindra tidak mudah menerima anggota. Kebiasaan yang dilakukan hingga sekarang juga setiap orang yang hendak menjadi anggota harus beberapa lama menjadi candidaat anggota terlebih dahulu harus

membuktikan dalam waktu percobaan itu yang ia sudah sedar dan tetap giat untuk menjadi Parindrist yang sejati. Ia harus buktikan dulu yang ia bersedia membayar contribute, menunduk kepada disiplin partai dan lain-lain kewajiban partai, biarpun ia belum diberi hak-hal sebagai anggota. Tambahan pula kami mengingat peraturan kita yang dilakukan di sekalian cabang dengan keras, yaitu perat uran mengeluarkan anggota yang tidak memenuhkan kewajibannya dan tidak membayar contribute 3 bulan lamanya.

Saringan untuk menerima anggota sebagaimana tersebut di atas dan peraturan anggota yang tidak menjalan-kan kewajibannya sudah tentu melambatkan tambahnya anggota dan oleh karena itu kami mengambil tempo yang luas untuk mencapai 10.000 orang anggota.

10.000 anggota berarti 10.000 Parindristen yang terpilih! Berarti 10.000 orang yang telah sedar dan bergiat untuk memajukan partainya!

Dalam angka 10.000 ini tidak termasuk barisan Surya Wiraman yang pula ribuan banyaknya! Tidak termasuk pula anggota Rukun Tani Parindra yang berpuluh ribu banyaknya!

Angka yang ke 10.000 sekarang sudah tercapai. Kami bataskan waktu untuk mencapai angka ini bulan Mei 1940 yaitu waktu Kongres ke III di Banjarmasin. Keadaan berlainan dengan taksiran kami. Tujuh bulan sebelumnya Kongres Banjarmasin Parindra telah mempunyai anggota 10.000. Ini suatu keadaan luar biasa. Menandakan pesatnya kemajuan Parindra dengan hebat. Pengurus Besar tidak meliwatkan keadaan ini dengan begitu saja. Keadaan ini harus diperingatkan. Oleh karena itu kepada Saudara Abdullah anggota Parindra yang ke 10.000 diberi tanda peringatan. Diberi padanya sebuah jam (horloge) perak dubbelkast dengan rantenya. Dalam jam itu tertulis;

"Dari P.B. Parindra kepada Sdr. Abdullah anggota ke 10.000.

Kwalakapuas

Kalimantan"

Kepada Daerah Komisaris Kalimantan dan kepada cabang Kwalakapuas diminta menyerahkan tanda peringatan P.B. kepada Sdr. Abdullah dengan sedikit upacara.

Hidup saudara Abdullah!

Apa tindakan kita sekarang?

Apakah kita sudah puas dengan anggota 10.000 orang? Jauh dari pada itu. Parindra yang dimaksud sebagai organisasi yang meliputi sekalian lapisan rakyat Indonesia harus mempunyai anggota yang berlipat ganda banyaknya.

Banyaknya anggota kita harus berpuluhan ribu, harus ratusan ribu, jika melihat banyaknya jiwa rakyat Indonesia. Saat ini akan datang. Ada masanya yang angan-angan ini akan tercapai. Jangan kecil hati! Kesadaran dan keinsyafan rakyat Indonesia menjadi jaminan kepada kami bahwa maksud kita akan tereapai. Asal saja kita bekerja terus. Kita bergiat dan berpropaganda selanjutnya! Semangat dan kegiatan yang terlihat pada waktu ini, menggembirakan!

Dalam beberapa bulan ini anggota Parindra telah bertambah dengan 500 orang sebulannya! Keadaan ini bukan saja harus tetap, akan tetapi harus bertambah lagi.

Semboyan kita untuk melepaskan organisasi harus kita rubah sekarang. Bukan 10.000 yang kita kehendaki dalam beberapa tempo yang akan datang akan tetapi 20.000 anggota.

Menuju ke 20.000 !!!

Hidup Parindra!

Hidup anggota kita yang ke 20.000".5)

Muhammad Husni Thamrin adalah seorang yang sangat luas perhatiannya, dan hal ini sangat menunjang dirinya menjadi salah seorang pemimpin nasional "kanan" yang terkemuka. Masalah tanah yang merupakan masalah yang bertalian erat dengan kehidupan rakyat juga tidaK luput dari perhatiannya. Dalam salah satu rapat Parindra Muhammad Husni Thamrin telah mengambil masalah tanah sebagai tajuk pembicaraannya, untuk memperoleh gambaran yang lebih "utuh", di bawah ini kami kutipkan uraian yang disam-paikannya di dalam rapat itu, sebagai berikut:

Rapat yang terhormat.

Soal hak tanah bukannya baru.

Satu soal yang tua dan penting.

Hak tanah menjadi soal selama pertemuan Barat dan Timur.

Hak tanah selalu menjadi pengaduan antara rakyat Timur dan Barat oleh karena hak tanah menjadi suatu hak yang terutama.

Siapa yang memegang tanah ialah yang berkuasa.

Mengusahakan tanah berarti mengusahakan penghidupan rakyat oleh karena pokok dasar pencaharian yang terutama dari rakyat, penghasilan dari tanah.

Hak tanah di Indonesia menjadi soal oleh karena dua bangsa (Indonesia dan Belanda) bertemuan dan kepentingan masing-masing bangsa atas hak tanah berlainan

Berlainan oleh karena pendiriannya, berlainan, kepentingannya berlainan dan kemauannya pun berlainan.

Soal hak tanah soal yang tertua.

Di desa di Jawa, di marga Sumatera Selatan di negeri Minangkabau, di Minahasa, di desa di Bali, Lombok, di mana-mana saja di Indonesia kepentingan Barat bertemu dengan kepentingan Indonesia, hak tanah menjadi soal.

Menjadi hak tanah soal lama dan soal yang tetap (permanent).

Siapakah akan heran bahwa sewaktu-waktu ada bentrokan tentang hak tanah?

Terkadang bentrokan hebat oleh karena hebat pula bentrokan kepentingannya masing-masing golongan.

Kebanyakan umum tidak mendengar pertentangan tentang hak tanah, akan tetapi pergaduhan terus ada.

Hak tanah bukannya saja menjadi soal antara Timur dan Barat, akan tetapi juga antara Timur dan Timur.

Dalam urusan kehakiman di Jawa, Sumatera dan lain-lain tempat perkara-perkara yang berhubung dengan hak tanah mengambil bagian yang besar adanya.

Mengapa hak tanah menjadi soal selanjutnya?

Apakah di lain-lain negeri juga hak tanah menjadi peributan dan peributan seperti di Indonesia?

Kami bersangsi.

Apakah tidak bisa diadakan aturan-aturan sehingga hak tanah jangan menjadi pertikaian sehari-hari antara Barat danTimur dan antara Timur dan Timur?

Kami bersangsi bahwa tidak bisa.

Apakah benar bahwa hak-hak anak negeri di Indonesia atas tanahnya tidak tertentu dan oleh karena ini susah diaturnya?

Kami bersangsi pula dengan kebenarannya persang-kaan ini. Untuk menyatakan satu dan lain hendaklah kami menguraikan pemandangan kami dan meminta tuan-tuan maafkan jika pemandangan ini tidak luas, tidak cukup atau tidak terang:

Soal hak tanah bukan soal yang mudah.

Bukan pula soal yang pendek.

Bukan pula soal yang terang oleh karena ahli-ahli dalam agraria pendapatannya tidak sama.

Kewajiban kami di Kongres ini memberi penerangan dengan sekedar saja.

Bukan untuk membongkar soal itu sedalam-dalamnya.

Bukan maunya di Kongres ini.

Pemandangan kami tentang soal hak tanah sekedar tuan-tuan tahu apakah artinya soal tanah dengan umumnya: artinya pendesakan dari sesuatu fihak dengan meminta hak tanah untuk golongannya, dan apakah artinya untuk golongan Indonesia perluasan yang dimaksud oleh Komisi Spit.

Dengan menyebut Komisi Spit kami mulai mengurai soal pembicaraan kami, yaitu pembicaraan hak tanah berhubung dengan permintaan golongan Indo untuk mendapat hak bumiputera di atas tanah.

Jika kami membicarakan soal hak tanah berhubung dengan desakan kaum Indo, harus dijauhkan segala perasaan yang tidak tertentu soal ini harus dipandang dengan tenang; dengan perasaan yang adil, dengan bermaksud mencari keadilan.

Segala perasaan yang membenci, segala nafsu permusuhan kita harus jauhkan.

Soal tanah suatu soal "zakelijk", oleh karena itu pemandangan kita harus zakelijk juga.

Komisi Spit yang didirikan untuk menyelidiki soal hak tanah bagi bangsa Indo, dibentuk oleh Pemerintah pad a 15 Juni 1931.

Komisi ini menyelesaikan pekerjaannya di tahun 1936, menjadi sesudahnya bekelja 5 tahun.

Ini tempo menunjukkan sulitnya ini soal.

Apalagi jika dipikir bahwa segala tenaga, segala ahli dan segala bukti yang ada di tangan Pemerintah boleh dan bisa digunakan.

Hasil pekerjaannya membuktikan bahwa Komisi itu bekerja dengan giat, keras serta dalam dan rapportnya terantar dengan angka-angka, bukti-bukti dan alasan-alasan yang cukup dan luas.

Apakah lantarannya berdiri Komisi Spit dan manakah maksudnya?

Berdirinya Komisi Spit oleh karena di Volksraad tuan de Hoog sebagai pemuka dan pendekar kaum IEV mendesak pada Pemerintah supaya kepada bangsa Indo diperluaskan dan digampangkan penghidupannya. Dengan secara jalan pertanian dan berhubung dengan itu dengan secara memberi dan jalan memperluas hak tanah.

Desakan kaum IEV berhasil sebab Pemerintah membentuk Komisi yang diminta. Komisi Spit diberatkan oleh Pemerintah untuk mencari jalan supaya mengadakan peraturan-peraturan baru berhubung hak tanah kaum IEV, akan tetapi dengan tidak melupakan azas-azas dari politik agraria dari Pemerintah Belanda di Indonesia sehingga sekarang, dan tidak melupakan pula kedudukan kaum Indo Eropa di Indonesia.

Kewajiban yang ditarokan dipundaknya Komisi Spit sangat luas, sungguh kewajiban itu hanya dikatakan dengan ringkas saja.

Komisi Spit harus memperhatikan, dan mempelajari:

1. Pokok-pokok dasar tentang agraria Pemerintah (huidige beginselen van agrarisch beleid).
2. Ia bukan saja hams memperhatikan akan tetapi hams tidak melupakan, menghormatkan (met in achtneming) pokok-pokok dari politik agraris dari Pemerintah.
3. Memperhatikan sociale positie dari kaum Indo (met in achtneming v/d sociale positie der Indo Eur).

4. Supaya diperiksa bisa atau tidak mengadakan peraturan-peraturan bam tentang hak tanah kaum Indo.
5. Kalau bisa supaya mengasih jalan untuk peraturan-peraturan itu.

Sekian tentang kewajiban Komisi Spit.

Pendengar mengertilah bahwa tiap-tiap barisan perkataan mengandung suatu soal sendiri-sendirinya.

Pertanyaan-pertanyaan yang timbul berhubung dengan desakan kaum Indo, umpamanya:

1. Apakah dasar-dasar politik agraria Pemerintah itu?
2. Apakah social positie kaum Indo?
3. Manakah hak-hak yang kaum Indo sudah mempunyai?
4. Apakah hak-hak yang baru untuk LEV. tidak menentang hak-hak golongan lain?

Ini beberapa pertanyaan saja yang sepintas lalu bisa dimajukan.

Kalau dipikir baik-baik sudah tentu banyak pertanyaan lain timbul, akan tetapi baiklah kita ambil pokok-pokok saja dari soal ini.

Oleh karena jika mau dipandang dalam-dalam, sudah tentu tidak habisnya.

Marilah kami mulai gambarkan dengan garis-garis besar tentang pula asal-usulnya aturan itu.

Di permulaan pidato kami telah kami uraikan bahwa soal hak tanah satu soal yang tertua.

Boleh dibilang semenjak pertemuan bangsa Belanda dan Indonesia di abad ke 16, soal hak tanah yang kami maksudkan ini mulai timbul.

Masing-masing fihak berkepentingan dengan tanah.

Penduduk asli hendak memegang teguh hak tanahnya sedang penduduk yang baru hendak mendapat hak tanah.

Mulai di itu waktu boleh dibilang timbul suatu hak yang baru dan mulai itu waktu juga boleh dibilang timbulnya suatu teori yang baru dan boleh jadi yang menjadi pokok dari "domeinleer" yang dilanj utkan dengan officieel di tahun 1870.

Sebagaimana kami sudah kata, sejarah bagaimana berlakunya hak baru di tanah Indonesia boleh dikatakan sama tuanya dengan pertemuan bangsa Indonesia dengan orang Eropa. Sejak dad zaman Kompeni sampai saat sekarang hak itu dilakukan atas beberapa jalan; dan juga alasan-alasan untuk dan mengapa hak domein dapat dilakukan, memang selama-lamanya tidak sama dan tidak tetap.

Dalam zaman Kompeni dasar domein hanya dilakukan pada tanah-tanah yang dipandang oleh Kompeni sebagai suatu kemenangan atau sebagai suatu rampasan dari pihak Indonesia; sebagian dari padanya oleh karena kemenangan atau hadiah dari raja-raja di Indonesia.

Sejak tahun 1627 berulang-ulang "tanah kepada berbagai-bagai bangsa. Di antaranya ada yang diserahkan tidak tanah saja. Melainkan bersama-sama dengan segala hak yang ada dan penduduknya.

Mula-mula luasnya tanah yang diserahkan tidak seberapa, dan hanya untuk pertanian saja, tetapi dalam abad yang ke-18 luasnya makin bertambah-tambah.

Juga selainnya daripada untuk pertanian diberikan tanah untuk mencari keuntungan seperti keadaan tanah Depok 1705 dan penyerahan di Jawa Tengah dan di Jawa Timur dalam permulaan abad ke 19.

Ketika Kompeni berganti Gubernemen, maka ajaran domein tidaklah mati. Domein-leer berjalan terus: hanyalah isi

dan alasannya mendapat perubahan.

Untuk menambah penghasilan negeri, maka Raffles melahirkan landrente, dengan memakai alasan bahwa tanah Indonesia kepunyaan Pemerintah dan anak negeri hanya dapat menyewa saja.

Tetapi domein-leer yang seperti ini tidaklah terus-menerus dituruti Pemerintah sendiri berulang-ulang menge-luarkan fikirannya dan membantu bahwa tak benar negerilah yang mempunyai tanah Indonesia.

Dalam tahun 1849 pemerintah Minister C.L. Baud berpendapatan (Handelingen cultuurwet, I, 237).

Tanah-tanah di pulau Jawa selainnya yang bukan sudah menjadi kepunyaan bumiputera seperti di Sunda-districten dan di

sebagian keresidenan Besuki, menjadi kepunyaan persekutuan atau desa (Gemeentegronden). Tanah itu menjadi tidak bisa dijual, apa juga yang telah, atau yang akan dikata atau ditulis tentang hak eigendom itu. Penjualan itu hanya bisa terjadi dengan merusak kepunyaan orang-orang itu atau desa-desa itu.

Haknya raja atau Governement menjadi tidak bisa lebih luas daripada memungut belasting atau sebanyak-banyaknya atas sebagian tanah itu untuk ditanami buat membayar cukai. Tentang hak yang belakangan ini juga hanya jika dengan desa atau persekutuan ada suatu perjanjian yang mereka bikin dengan tidak dipaksa.

Sekiranya sudah terbukti bahwa raja yang mempunyai sekalian tanah itu; menjadi sekarang, yang punya Gubernemen mempunyai semua hak kepunyaan atas sekalian tanah di Jawa, apakah harus Gubernemen meniru raja-raja itu untuk mengakui sekalian tanah punyanya? Sudah tentu tidak, betul disana-sini terdapat beberapa tanah yang belum dikerjakan atau tanah kosong yang belum bisa dipastikan kepunyaan desa, tetapi janganlah lupa bahwa rakyat di Jawa lekas bertambah, menjadi tanah-tanah itu harus dipersediakan untuknya.

Sekianlah Minister Baud atas nama Pemerintah Belanda. Hanya sekarang menurut Minister Baud Pemerintah Belanda mengaku di tahun 1849 yang Pemerintah Belanda tidak berhak atas tanah-tanah kosong.

Ini hanya berhak menurut pengakuan sendiri untuk memungut belasting atau sebanyak-banyaknya untuk mena-nami tanah-tanah hanya bayar cukai.

Di tahun 1870 oleh Pemerintah Belanda diterima baik agra-rische wet yang dinamai wet de Waal, dalam mana tidak ada suatu perkataan yang mengakui pendirian domein.

Akan tetapi di dalam agrarisch besluit 1870 yang ditetapkan oleh Pemerintah sendiri telah dimasukkan ajaran domein, yang bisa disebut sebagai "domein-leer".

Marilah sekarang kita periksa apakah maksud dari ini domein beginsel itu?

Pemeriksaan ini perlu oleh karena "domein-leer" menjadi sendi yang penting dari politik agraria di Indonesia.

Isi yang pertama yaitu kerajaan Hindia Belanda di Indonesia menjadikan dirinya menjadi yang punya (eigenaar) dari segala tanah yang tidak dimiliki hak eigendom atau tanah particulier menurut burgerlijk wet boek oleh orang lain, atau yang tidak dimiliki sebagai agrarisch eigendom.

Jadi dalam segala perkara memanglah hak domein atas tanah Indonesia sudah tertentu dan mesti diakui. Barang siapa yang memungkirinya, mestilah memberi bukti jelas atas haknya.

Pemerintah Hindia Belanda terlepas dari segala kemestian memberi bukti itu. Ini menyusahkan rakyat oleh karena kewajiban membuktikan bewijslast dibalik.

Sebetulnya Gubernemen yang hams membuktikan yang tanah-tanah kosong itu tidak ada yang punya.

Terlebih lagi susahnya bagi rakyat untuk membuktikan haknnya, karena sampai. sekarang ini untuk tanah rakyat belum ada kadastrale dienst umum yang mencatat dan menetapkan tiap-tiap hak yang ada di atas sepotong tanah.

Oleh karena sebab itu mudah sekalian tanah rakyat termasuk ke dalam domein verklaring, karena tidak pasti bahwa tidak ada yang mempunyai tanah itu.

Rakyat yang menduduki tanah itu dengan jalan yang serupa itu, mudahlah ditetapkan sebagai orang duduk di sana dengan tidak mempunyai sesuatu hak atasnya.

Apakah kesimpulan kita tentang domein-leer itu?

Bahwa pokok dari politik agraria yang berlalu sehingga sekarang, menjadi suatu pokok yang tiada teguh, oleh karena pengakuan segala tanah kepunyaan Gubernemen berlawanan dengan kepentingan rakyat dan berlawanan pula dengan aturan-aturan hak tanah menurut hukum adat, aturan-aturan mana telah diakui syah dan diatur dalam wet yang tertinggi, yaitu Indische Staatsregeling.

Rapat yang terhormat.

Hak-hak tanah di Indonesia menurut hukum adat bukan timbulnya dengan kedatangan bangsa Belanda di Indonesia.

Ia menjadi soal dengan kedatangan bangsa Belanda.

Bangsa Belanda ketika bermula-mula menaruh kakinya di Indonesia bukan bertemu dengan masyarakat ramai yang sarna sekali tidak teratur. Jauh daripada itu.

Masyarakat Indonesia di abad ke 16 sudah tentu berlainan dengan keadaan sekarang.

Sudah tentu juga tidak begitu sempurna seperti sekarang dengan berbagai-bagai aturan dan keadaan yang tertentu.

Akan tetapi, tentang hak tanah aturannya memang sudah tertentu dan berbagai-bagai aturan telah berlaku. Aturan itu sehingga sekarang ada dan masih berjalan terus.

Aturan-aturan itu yang diakui dan dipakai sehingga sekarang biasa disebut aturan-aturan hak tanah yang dijalankan menurut hukum adat, yaitu Adatrecht.

Menjadi aturan dan hukum atas tanah memang sudah ada ketika pertemuan Belanda dan Indonesia terjadi buat pertama kali.

Hak-hak tanah menurut hukum adat bukan sedikit; macamnya berupa-rupa dan namanya pun berupa-rupa.

Prof. Vollenhoven seorang ahli adat yang ternama telah mengumpulkan hak-hak itu dan beliau ini menerangkan dalam ia punya buku Wet adatwet boekje bahwa hak-hak tanah yang bersandar atas hukum adat kurang lebih ada 17 rupa, seperti:

1. Hak lingkungan: Minangkabau; hak ulayat: Jawa: wewengkon (tenrechte: wewenang): Belanda: beschikkingsrecht; hak ini dipunyai hanya oleh suatu persekutuan hukum seperti desa, marga, negeri, suku dan lain-lain.
2. Hak milik (Jawa: hak yasan: Belanda: het Inlandsch atau Indonesisch bezitsrechterfelijk individual bezit). Hak ini terjadi oleh pembukaan tanah oleh orang Indonesia dan oleh suatu persekutuan hukum.
3. Agrarisch eigendom.
4. Hak ladang (Belanda: bewerking atau bouwrecht); het erfpachts recht di tanah partikulir dan het plukrecht.
5. Hak huma (Belanda: genotrecht van wisselvallige kembali sesudah mendapat hasil ladang seperti dinamai juga: huma, tipar, gaga.

6. Hak memakai tanah umum (Belanda: het gebruiksrecht ge-meenschapsgrond).
7. Hak membuka tanah (Minangkabau: hak cancang latih: Jawa: hak yasan: Jawa Barat: hak Ulah, Belanda: Ontiginningsrecht).
8. Hak mengumpulkan hasil hutan, menebang dan berburu (Belanda: recht om te zamelan,jagen en te delven).
9. Hak mengembalakan ternak (Jawa: angon; Belanda: recht om te weiden).
10. Hak orang yang berwatasan untuk mendahului orang yang lain (Minangkabau: hak pasupadan daru urang nan ampek bintalak: Minahasa: hak aparpalus: Sunda: uluran: Belanda: het naastingsrecht en prioriteitsrecht).
11. Hak gadai (Aceh: gala, Gayo: Alas dan Batak; Gorol; Batak: dondon, sindor, gade; Minangkabau: Gadai, sando, sambuik, juga gantuang; Sumatera Selatan; jual akad, jual kurung; Minahasa: galai; Ambon: gande atau gale; Bali: gade, gade gegem, sanda; Jawa: gade, adol, sende, adol, mesi; Sunda; gade, sanda, akad; Belanda: pandrecht).
12. Hak memperdua (Jawa: maro; Minangkabau; hak mampasaduokan; Belanda; recht van deelbouw).
13. Hak sewa (Belanda; recht van huur).
14. Hak pinjam (Belanda; recht van leen: Minangkabau: salang).
15. Hak air (Belanda; waterrecht).
16. Hak menangkap ikan (Belanda: vischrecht).
17. Dan segala hak yang lain-lain, yang dilazimkan atau yang sudah menjadi biasa menurut hukum adat).

Banyaknya rupa-rupa hak ini suatu petunjuk pada kita bahwa di dahulu kala bukan saja mengerti kepentingannya hak tanah akan tetapi mereka telah mengatur susunan masyarakat demikian rupa sehingga segala hak dan kewajiban dari sesuatu penduduk dihubungkan dengan hak tanah itu. Meskipun dari banyak aturan-aturan itu tidak tertulis dalam buku wet.

Hak tanah dari bangsa Indonesia dari dulu kala jadi sumber dari segala hak-hak lain, maupun berhubung dengan kepentingan

negeri, maupun berhubung dengan kehidupan sosial, maupun berhubung dengan ekonomi.

Bukan saja segala hak timbul dari perhubungan sesuatu orang dengan hak tanahnya, akan tetapi hak tanah pula menjadi sumber dari segala kewajiban terhadap negeri dan masyarakat.

Kewajiban-kewajiban yang terpikul oleh orang-orang yang diberi hak tanah, berdasar atas kepentingan masyarakat pula, seperti:

1. Memelihara jalan dan jembatan.
2. Memelihara jalan air.
3. Memelihara gardu dan kuburan.
4. Berjaga malam.
5. Mengerjakan rodi dan pancen.
6. Mengerjakan atau membayar gundal soyo, sambatan, ngahiras (Jawa) dan serayo) Minangkabau).
7. Bekerja untuk kepentingan sekolah, kesehatan, mesjid, surau, balai desa dan ternak.

Keadaan yang demikian menjadi penunjuk bagi kita bahwa dari dahulu kala rakyat Indonesia berpokok di pertanian.

Terlihat kepada kita bahwa sumber dari segala hak dan kewajiban dari masyarakat Indonesia dari dulu sampai sekarang berpokok di atas tanahnya.

Keadaan di zaman sekarang sebetulnya tidak berlainan.

Sehingga sekarang pun rakyat Indonesia menjadi rakyat pertanian dan sumber penghidupan terdapat dad mengerjakan tanahnya.

Dari dulu sampai sekarang rakyat Indonesia rakyat pertanian. Ini penting dan harus kita ingat sebagai patokan dalam pembicaraan kita. Marilah kita sekarang melanjutkan pemandangan kita atas hak-hak tanah menurut hukum adat.

Dengan menuturkan 17 rupa hak tanah menurut hukum adat, bukan bermaksud kami akan membicarakan artinya hak-hak itu satu per satu.

Yang perlu dikemukakan sifat-sifat dari hak atau kewajiban berhubung dengan tanah, menjadi bukti kepada kita bahwa

sendi-sendi hukum adat itu berdasar atas persekutuan (gemeenschap).

Dalam persekutuan ini hak tanah yang paling terutama ialah hak lingkungan.

Persekutuan yang memberi hak tanah persekutuan juga menaruh kewajiban kepada orang-orang yang tinggal dan berdiam di dalam watas-watasnya.

Susunan masyarakat di Indonesia memang sebenarnya dari dulu sampai sekarang bersandi, bersandar dan berakar atas persekutuan itu.

Sungguh persekutuan ini namanya berlainan di berbagai-bagai tempat dan perbedaannya memang ada dalam garis-garis yang kecil, kita boleh memastikan bahwa di seluruh Indonesia dasar-dasarnya ada sama.

Apakah sendi-sendinya persekutuan Indonesia yang telah diakui dengan wet adanya, dan peraturan?

Menurut aturan adat dan aturan agraria, maka lain daripada bangsa Indonesia asli di antaranya termasuk juga orang Belanda Indo tidak boleh memiliki tanah Indonesia.

Adat tidak mempunyai aturan untuk mengizinkan orang lain selainnya bangsa Indonesia, masuk ke dalam persekutuan Indonesia supaya mendapat izin untuk membuka tanah, mengambil hasil hutan dan lain-lain.

Terlarang oleh adat dan undang-undang mempunyai hak milik; tidak ada aturan untuk mengisi adat; mereka tidak dikenai pengaruh hak lingkungan, baik untuk mendapat hak di atas tanah pertanian, perusahaan atau di tanah kosong, mereka tidak akan menanggung jawab sebagai yang dimestikan oleh hak lingkungan.

Orang lain, jadi yang tidak termasuk ke dalam golongan rakyat Indonesia, adalah berdiri di luar persekutuan-persekutuan dan oleh karena itu tidak bisa mempunyai hak lingkungan.

Dan juga tidak ada aturan untuk membukakan pintu untuk orang lain masuk ke dalam persekutuan yang memegang sesuatu hak lingkungan.

Jadi pengakuan persekutuan dan hak lingkungan berisi arti yang sangat dalam bagai penyerahan tanah kepada orang asing. Hak itu hanya ada perhubungan dengan sesuatu persekutuan yang

anggotanya orang Indonesia; dan tidak ada aturan adat yang menghubungkan orang Belanda Indo atau bangsa lain dengan hak itu.

Larangan itu mengenai tanah kosong, hutan, tanah pertanian, sawah ladang, sungai dan lain-lain.

Oleh karena hak lingkungan itu memperlindungi segala hak tanah Indonesia, maka juga tertuju kepada hak-hak ini tidak adalah sesuatu kesempatan atau hak untuk orang asing.

Kesimpulan kita terhadap pemandangan ini tidak lain bahwa terang yang hak-hak hukum adat Indonesia hanya untuk orang Indonesia.

Ketetapan yang dibatasi adat Indonesia itu adalah dilindungi wet dan kemauan wet sendiri, sepeiti tersebut di atas. (Indische Staat sregeling artikelen 51 en 13 1).

Itulah sebabnya maka pemberian tanah (hak tanah) Indonesia kepada orang yang masuk golongan bangsa lain, jikalau pemberian itu melanggar aturan adat dan wet, berarti meruntuhkan aturan adat, melanggar wet agraria, menempuh jalan yang berlawanan dengan maksud undang-undang dan menghilangkan ketetapan tentang hak dan milik.

Perubahan yang seperti itu tidak saja akan menghilangkan segala perlindungan wet, melainkan rakyat Indonesia terpaksa pulalah menderita aturan yang meruntuhkan hak dan merugikan harta bendanya.

Tidaklah ada satu saat yang kita mengira bahwa ada timbul sesuatu maksud, maupun di Belanda atau di negeri ini (Hindia), akan mungkir haknya orang Indonesia di atas tanahnya.

Pemerintah sendiri telah sering mengalami sendiri bagaimana rakyat tentang hal ini gampang dilukai perasa-annya.

Akan tetapi sebaliknya memang sudah menurut nafsu untuk melanggar hak-hak dari rakyat ini, sungguhpun hak-hak ini terbukti kuat dan tetap.

Dengan ringkas dapat kita berpendapatan: bahwa hak lingkungan yang menjadi hak terutama dalam persekutuan Indonesia memang memperlindungi segala tanah-tanah Indonesia, tetapi mencegah atau membatasi orang lain masuk ke dalamnya untuk mendapat sesuatu hak tanah.

Rapat yang terhormat.

Dari pemandangan kami sampai di sini kita telah bisa mendapat beberapa kesimpulan.

Politik agraria di Indonesia yang sekarang berlaku menunjukkan kepada kita bahwa:

a. sumber pencaharian dari bangsa Indonesia adalah pertanian.

b. "domein-leer" yang menjadi pokok dari segala pengambilan tanah dari Gubernemen berlawanan dengan kepentingan rakyat dan berlawanan dengan hukum adat yang telah diakui syah dan yang sekarang berlaku.

c. bahwa domeinleer itu tidak ada artinya, oleh karena tiap-tiap sebidang tanah di seluruh Indonesia dikuasai oleh hak lingkungan dari sesuatu persekutuan

d. bahwa menurut hukum adat selainnya bangsa Indonesia tidak boleh lain bangsa masuk dalam persekutuan dan oleh karena itu tidak boleh mempunyai hak tanah sarna dengan orang Indonesia.

Kami kira cukuplah kiranya pemandangan kami yang berhubung dengan asal-usulnya hak tanah di Indonesia yang berhubung dengan politik agraria dari pemerintah di Indonesia.

Kita mulai sekarang dengan menjawab soal yang kedua dari Komisi Spit dan yang berhubung dengan sociale positie dari Indo yaitu kedudukan Indo di masyarakat Indonesia dengan seluruhnya.

Soal yang kedua yang harus dipentingkan oleh Komisi Spit ialah sociale positie dari Indo di Indonesia.

Sebab sociale positie dari I.E.V. menjadi pokok dan alasan untuk mendorong mereka minta hak tanahnya diperluaskan. Komisi Spit telah perlukan menguraikan keinginan kaum LE.V. satu per satu sebagai alasan kenapa hak Indo di atas tanah di Indonesia harus diperluas.

Komisi Spit telah majukan 12 punten (alasan), dari kaum Indo. Kami tidak akan uraikan satu per satu punten itu, tetapi kami akan ambil sarinya saja dari alasan-alasan itu.

Alasan-alasan itu kita bisa bagi dalam 3 rombongan yaitu:

1. Kaum I.E.Y. minta diperluaskan hak di sini oleh karena mereka pandang bahwa Indonesia tanah tumpah darahnya, tanah tempat mereka dilahirkan dan akan dikubur dan tanah yang mereka akan membela dengan darahnya.
2. Ia ingin memperluaskan hak atas tanah oleh karena katanya hak-hak yang ada kurang kuat dan kurang luas.
3. Mereka bilangnya terdesak dari tempat – tempat pekerjaan yang tadi menjadi monopolinya kaum Indo.

Inilah sarinya dari 12 punten dari kaum I.E.V.

12 punten ini hampir sarna banyaknya dengan 14 punten dari Pres Wilson ketika mengadakan perdamaian di dunia sesudahnya perang besar di tahun 1918.

Marilah kita periksa lebih jauh besar tidaknya apa yang dimajukan oleh kaum I.E.Y. sebagai alasan.

"Punten" yang termasuk di rombongan yang pertama yaitu: tanah Indonesia tempat tumpah darahnya dan tempat kuburan kaum LE.V. dan bahwa mereka hendak membela Indonesia dengan darahnya.

Dalam rombongan ini ada 3 rupa alasan yang dimajukan untuk mendapat hak tanah yaitu:

1. Indonesia tempat tumpah darahnya kaum I.E.V.
2. Indonesia tempat kuburannya kaum I.E.V.
3. Indonesia akan dibela oleh kaum I.E.V. dengan darahnya.

Dengan memajukan alasan-alasan bahwa Indonesia tempat tumpah darah dan tempat kuburannya kaum I.E.V. dan akan membela Indonesia dengan darahnya, mereka hendak mempersamakan dirinya dengan anak Indonesia yang asli.

Ini alasan-alasan ada pintar dan cerdik, oleh karena mereka mengetahui hahwa tiap-tiap bangsa yang asli mempunyai hak yang sud (heilig recht) atas tanahnya.

Akan tetapi dengan sengaja dilupakan, bahwa bukan saja tempat tumpah darah atau tempat penguburan, yang memberi hak suci di atas tanahnya.

Untuk menetapkan bangsanya sesuatu golongan ada beberapa faktor-faktor yang harus menjadi ukuran, antara mana keyakinan dan pengakuannya golongan itu.

Marilah sekarang kita periksa lebih jauh alasan-alasan kaum I.E.V. satu persatu.

Kaum I.EV. hendak mempersamakan haknya dengan pribumi Indonesia, katanya oleh karena ia terlahir di sini. Ini alasannya yang pertama.

Akan tetapi bagi kami tempat kelahiran bukan satu ukuran yang penting, tempat lahirnya sesuatu orang, tidak bisa menjadikan ukuran kebangsaannya dan hak-haknya sesuatu orang atau sesuatu golongan.

Bangsa Belanda yang terlahir di Indonesia belum jadi orang Indonesia; Belanda yang terlahir di London belum menjadi orang Inggeris dan orang Indonesia yang terlahir di 'Berlin, belum pula boleh disebut sebagai anak buahnya Hitler.

Begitulah juga dengan kaum I.EV.

Lahirnya di Indonesia belum membikin ia menjadi orang Indonesia, menjadi tempat kelahiran bukan satu patokan untuk mempersamakan haknya dengan orang Indonesia.

Tadi kami bilang yang menjadi patokan kebangsaan, bukan saja tempat kelahiran, akan tetapi juga keyakinan perasaan, dan pengakuan 'sesuatu golongan.

Keyakinan, perasaan dan pengakuan kaum I.EV. ia bukan orang Indonesia.

Sebaliknya!

Di tiap-tiap kongres dan tiap-tiap rapat, kaum I.EV. membanggakan bahwa ia bukan saja termasuk rakyat Belanda, akan tetapi rakyat Belanda yang setia dan tulus (trouw en loyaal).

Pengakuan yang demikian dan yang begitu sering diucapnya bisa menimbulkan kesangsian kepada banyak orang.

Bukankah sesuatu pengakuan yang sering-sering diulangi menimbulkan prasangka bahwa ucapan-ucapan yang demikian hanya untuk menguatkan keyakinan yang belum tetap.

Tapi baiklah kita percaya saja apa yang dikata oleh mereka, yaitu bahwa kaum I.E.V. bukan saja kaum Nederlanders yang setia dan loyaal.

Jika benar ini, maka sebetulnya tidak harus ada perselisihan paham lagi tentang hak tanah.

Hak tanahnya kaum Nederlanders sudah tentu dan Negerinya kaum Nederlanders pun ada dan letaknya di mana pun terang pula.

Akan tetapi sebetulnya ini bukan maksudnya kaum I.E.V.

Dalam hal-hal yang menguntungkan padanya ia hendak menjadi Nederlanders, akan tetapi sebaliknya ia hendak pula mendapat kelezatannya dari hak-hak anak Indonesia.

Dalam hal hak tanah terang ia hendak mempersamakan dirinya dengan orang Indonesia.

Akan tetapi sebaliknya kalau memikul kewajiban (landrente, rodi) dan tentang hal gajih kaum LEV. hendak disamakan dengan bangsa Belanda totok.

Untuk mempersamakan dirinya dengan orang Indonesia, ia memajukan alasan yang juga terdapat pada orang Indonesia.

Formule (Doahnya) I.E.V. begini:

Orang Indonesia diberanakkan di Indonesia, dia men-jadi anak Indonesia dan oleh karena itu dapat hak anak Indonesia.

Kaum I.EV. juga diberanakan di Indonesia en dus juga menjadi anak Indonesia dan dus juga harus mendapat hak-hak Indonesia.

Ini formule hampir-hampir logisch, cuma saja dasarnya ada salah! Marilah kita lihat lebih jauh di Statuten kaum I.E.V.

Jika sesuatu golongan membanggakan ia punya tempat kelahiran sebagai satu patok untuk menentukan kebangsa-annya, sudah tentu hal ini harus menjadi pokok dasar dari perhimpunannya.

Setiap bangsa atau golongan yang hendak mengemu-kakan kebangsaannya selalu memajukan patok itu dan memuliakan tanah kelahirannya.

Mari kita periksa apa kaum I.E.V. consequent dengan pendiriannya itu. Kalau ia consequent tentu kita harus menemui patil kelahiran sebagai pokok dasar dari perhimpunannya.

Tetapi keadaannya bukan begitu.

Menurut statuten yang termasuk kaum I.EV. antara mana: Orang-orang Belanda yang darahnya tercampur (tempat lahir tidak disebut).

1. Orang-orang Belanda yang menjadi turunan oleh karena perkawinan antara Belanda totok dengan Belanda yang darahnya tercampur (tempat lahir tidak disebut).
2. Orang-orang Belanda yang mempunyai salah satu anak yang terlahir di Indonesia (menjadi bapaknya sendiri terlahir di mana tidak diperdulikan).
3. Orang-orang Belanda yang telah kawin dengan nona yang terlahir di sini (menjadi tuanya terlahir di mana juga tidak diperdulikan). (Lihat art. 3 lid 1 dan 2 dari Statuten I.E.V.).

Teranglah sekarang bahwa "alasan tempat kelahiran yang dimajukan oleh I.EV. untuk mendapat hak tanah, tidak bisa dipegang. Alasannya bahwa tempat kelahiran akan memberi hak atas tanah kepadanya dibunuh oleh mereka sendiri dengan azas-azasnya perhimpunannya sendiri dalam mana tempat kelahiran tidak begitu dipegang teguh

Oleh karena Statuten LE.V. tidak diterangkan dengan jelas siapa-siapa yang dipandang sebagai Indo, maka besar bahayanya jika hak kaum Indo di atas tanah kita diperluas.

Boleh dipastikan bahwa meluas hak tanah bagi kaum I.E.V. berarti meluas hak tanahnya s.ekalian orang Belanda.

Ini consequentie yang tidak dimajukan oleh kaum LE.V. telah dimengerti oleh Komisi Spit.

Komisi Spit menarik conclusie dari Komisi Spit kesempatan buat dapat hak tanah baru bukan saja hendak diadakan untuk orang Indo akan tetapi untuk sekalian orang Belanda, yang dinamakan "blijver"

Komisi Spit ada lebih cerdik dari kaum I.E.V.

Ia mengerti bahwa formulenya I.E.V. tidak terang dan tidak tentu. Maka oleh karena itu ia ganti "criterium" Indo. Bukan "Indo" yang akan dapat hak tanah baru, akan tetapi "blijver".

Namanya diganti akan tetapi soalnya tetap saja dan tidak dirubah, yaitu memberikan hak tanah kepada orang yang bukan bangsa Indonesia.

Mari sekarang kita periksa lebih jauh alasan membilang bahwa Indonesia tempat kuburannya I.E.V.

Tentang alasan ini kami hendak peringatkan apa yang Zentgraaffmajukan tentang I.E.V.

Zentgraaff berkata bahwa perhimpunan I.E.V. terdiri daribung, bung, yang besar.

Bung, bung yang kecil tidak masuk I.E.V. katanya.

Bung, bung yang besar itu, menjadi tulang belakangnya perhimpunan I.EV. jika sudah pensiun, lekas-lekas ke Den Haag dan menurut Zentgraaff tidak ada satu golongan yang begitu giat pulang ke negeri Belanda sebagai kaum Indo.

Menjadi alasan kuburan dari kaum I.E.V. bukan satu alasan yang kuat dan nyatajuga tidak benar.

Kami kira kaum LEV. tentang hal ini ada salah ucapan. Ia bermaksud berkata: Bukan Indonesia tempat kuburnya, akan tetapi sebenarnya Hollandia!

Kita maklum kesalahan ini.

Juga Dr. Mansfelt berpendapatan sarna sebagai Zentgraaff. Dalam notanya tentang orang Indo, kaca 2 ia berkata:

"dat een groot en misschien wel Europeanen nu een succesvol le carriere in het mabtelijke of in het particuliere Indie verlaat en zich vestigt in Den Haag, de Riviera, Montreux of elders in Europa.

Menjadi alasan yang dimajukan oleh I.E.V. bahwa Indonesia akan menjadi tempat kuburnya kaum LEV., bukan saja tidak bisa dipegang, akan tetapi tidak benar pula.

Sekarang tentang alasan kaum LEV. hendak membela tanah Indonesia.

Kita tahu bahwa kaum Indo masuk golongan tukang pikul senapan (militie).

Kaum I.E.V. masuk militie bukan karena ia minta, akan tetapi sebab dipaksa.

Sering mereka majukan keberatan terhadap militie; sering juga dimajukan tidak sukanya. Terlebih sering lagi militie dimajukan sebagai alasan untuk mendapat salah satu ganjaran (concessie).

Jadi kewajiban militie dipandang sebagai barang dagangan!

Suatu bangsa yang mempunyai perasaan terhadap tanah airnya sudah tentu gembira dan bersedia untuk menjadi tukang pikul senapan!

Sebagai kita!

Kita sudah 10 tahun lebih minta militie, minta dengan ikhlas, dengan sangat, minta dengan karena Allah saja, jadi tidak minta ganjaran!

Akan tetapi apa lacur!

Pemerintah Belanda belum izinkan!

Jadi keadaan sekarang:

yang tidak minta sebagai I.E.V. dapat militie dan yang sangat kepingin sebagai kita, tidak dapat.

Juga "alasan" ini dari kaum I.E.V. untuk mendapat hak tanah ternyata tidak boleh dipegang.

Menjadi persediaan untuk membela tanah ini dengan darahnya, persediaan yang terpaksa belaka

Menjadi alasan-alasan kaum I.E.V. yang termasuk di rombongan yang pertama untuk mendapat hak tanah sudah kelihatan alasan-alasan lemah, sebab:

1. Teori tempat kelahiran dibunuh oleh I.E.V. sendiri dengan pengukiran mereka dalam statuten.
2. Teori Indonesia tempat kuburan orang I. E. V. nyata salah ucapan.
3. Teori membela Indonesia dengan darahnya kelihatan juga tidak kuat, oleh karena pembelaan itu dipaksa.

Rapat yang terhormat.

Rombongan dari alasan yang kedua. Kenapa I.E.V. minta perluasan hak tanah, katanya oleh karena hak yang sekarang ada sudah didapat dan tidak lekas.

Tentang katanya susah akan mendapat hak tanah, itu memang benar. Oleh karena segala permintaan tanah harus diperiksa oleh beberapa pembesar dari B.B. Boschwezen, Irrigatie dan lain-lain pembesar sehingga makan tempo.

Akan tetapi kesusahan yang demikian juga terhadap segala permintaan tanah, juga oleh orang Indonesia.

Apakah maunya kaum I.E.V. bahwa tanah yang diingin diberi kepadanya zander diperiksa lagi dan jika diperiksa supaya lekas-lekas saja?

Jika sikap demikian boleh dan bisa dijalankan, harus juga akan dijalankan terhadap lain golongan dan bukan kepada kaum I.E.V. saja.

Oleh karena itu permintaan I.E.V., tentang hal ini, boleh kita tunjang.

Marilah sekarang kita periksa benar atau tidaknya bahwa hak tanah yang ada tidak luas.

Kaum I.E.V. bukan tidak mempunyai hak tanah.

Mereka boleh mendapat: eigendom, erfpacht, opstel, huur, recht van gebruik, dan hak klein landbouw.

Eigendom dan erfpacht katanya terlalu mahal, padahal mahainya sarna saja buat sekalian orang yang hendak mempunyai eigendom.

Hak opstel, recht van gebruik dan recht van huur katanya tidak duurzaarn, artinya tidak selama-lamanya.

Hak klein landbouw yang sedikitnya 25 tahun dan yang sudah dipertanggungkan lamanya bisa dan akan ditambahkan lagi dengan 10 tahun dan lebih, juga katanya kurang duurzaam.

Duurzaam rupanya hak-hak yang turun temurun tidak bisa diganggu.

Hak itu memang ada, ialah eigendom, tetapi katanya mahal.

Yang dimaksudkan yaitu hak yang tetap dan kuat akan tetapi yang murah dan yang gampang.

Jadi cara kita: mau ketan, mau kelapa, sama kulainya lagi!

Atau cara Belanda ia mau: een schaap met zes niet met vijf pooten!

Memang baik kalau bisa dapat!

Akan tetapi semua orang juga mau!

Kalau mau hak tanah yang kuat, harus mahal.

Yang murah haknya tidak lengkap.

Sebenarnya yang dimaukan oleh I.E.V. hak yang ia belum mempunyai, biarpun hak itu tidak tetap, tidak murah dan tidak luas.

Banyak orang di dunia selalu kepingin kepunyaan orang lain, selalu cari-cari barang yang ia belum mempunyai, dengan tidak memperdulikan hak orang lain akan terdesak atau tidak.

Keinginan I.E.V. seolah-olah begitu juga!

Sekarang alasan-alasan yang termasuk di rombongan yang ketiga!

Katanya kaum I.EV. terdesak, oleh orang – orang Indonesia dari tempat-tempat dan pekerjaan yang tadinya kepunyaan I.E.V.

Tempat-tempat dan pekerjaan yang dipandang kepunyaan I.E.V. ialah administratieve betrekkingen.

Teori bahwa sesuatu rupa pekerjaan menjadi monopoli sesuatu bangsa, tidak asing lagi bagi dunia sekarang.

I.E.V. sebetulnya dalam permintaan ini: "Zeer gematigd" (lunak sekali)

Di DuitscWand umpamanya teori kebangsaan ada lebih luas. Dalam negerinya Hitler semua pekerjaan dan semua pangkat hanya boleh dikerjakan oleh satu bangsa, yaitu bangsa Arier.

I.E.V. hanya pandang bahwa hanya pangkat-pangkat administratief di Departement harus dipersediakan untuk I.E.V.

Oleh karena itu kami bilang permintaan kaum LE.Y. tentang hal ini ada: "zeer gematigd", jika dibanding dengan Hitler di Duitschland.

Akan tetapi di Indonesia belum berlaku ras teori. Untuk menjalankan ini harus pergi di DuitscWand.

Dulu katanya di kantor-kantor hanya dipakai Indo. Sekarang Sastro, Karta dan Ali juga boleh jadi klerk, Comrnis-comrnis dan sebagainya.

Betul sekarang selainnya Piet dan Jan, Karta, Sastro dan Ali juga bekerja di kantor-kantor akan tetapi apakah artinya itu mendesak?

Yang kita lihat di praktek Piet dan Jan didesak ke atas, sehingga mereka menempati kursi-kursi lebih tinggi yang dulu diduduki oleh Klas van Holland.

Kaum Indo seumumnya peilnya naik, jarang kita lihat orang-orang Indo sebagai dulu, pendek kata sinyo-sinyo Indo

sekarang hampir semua telah menjadi tuan. Ini juga pendapatannya Dr. Mansfelt.

Pekerjaan-pekerjaan yang dulu-dulu ditempati oleh orang-orang Belanda totok, sekarang menjadi bagiannya kaum Indo.

Directeur Departement, Gouverneur, Resident, Burgermeester, Administrateur, Secretaris di kantor-kantor yang dulu haknya orang Belanda tulen, sekarang dikerjakan oleh Indo.

Apakah ini artinya kedesak!

Malah ia mendesak.

Pekerjaan-pekerjaan yang dulu hanya dikerjakan oleh "in-lajer", sekarang juga dikerjakan oleh Indo.

Sekarang ada Mantri Indo, mandor Indo, tukang tempel Indo, schrijver Indo, chauffeur taxi Indo dan lain-lain.

Menjadi Indo mendesak ke atas dan ke bawah!

Sungguh begitu ia bilang ia yang kedesak!

Ada-ada saja!

Marilah kita lihat angka – angka sekarang untuk menyaksikan betul atau tidak kaum Indo terdesak oleh "inlajer".

Angka-angka ini terdapat dari Dr. Mansfelt dalam notanya tentang Indo.

Sayang sekali yang angka-angka Dr. Mansfelt tidak dipisahkan lebih jauh. Ia memakai groepeering Eur, Indonesier dan Vr. Oosterlingen saja.

Jadi tentang kaum Indo tidak ada angan-angan sendirinya.

Akan tetapi ada sebaiknya jika kita lihat angka Dr. Mansfelt sebab bisa membuktikan apakah benar kaum inlajer mendesak kaum Europa di kantor-kantor.

Jika kita periksa angka-angka Dr. Mansfelt kita jangan lupa, temponya ketika Dr. Mansfelt memungut angka-angka itu. Tahun-tahun perbandingan ialah 1928 dan 1932. Tahun 1928 termasuk tahun hoogconjunctuur, yaitu waktu pandangan maju dan memakai banyak tenaga.

Di itu waktu segala tenaga mendapat tempat bekerja di berbagai-bagai tempat pekerjaan.

Tahun 1929 mulai crisis.

Dalam tahun ini, dan terutama tahun-tahun 1930, 1931 dan 1932 banyak tenaga yang dipecat.

Yang dipecat tenaga-tenaga yang mahal.

Terutama tenaga-tenaga Belanda totok yang terdesak oleh dan di itu waktu begitu banyak tenaga Belanda totok yang dipulangkan ke negerinya, sehingga timbul kekuatiran bahwa di Indonesia ada "proces van ontblanking".

Apa kesimpulan kita terhadap kejadian-kejadian itu?

Bahwa "verschuiving" (pangguruan) di golongan kaum Belanda ada besar sekali di tahun-tahun sesudahnya tahun crisis 1929.

Dr. Mansfelt mengambil angkanya di tahun 1928 dan 1932. Menjadi dalam tahun-tahun 1929, 1930, 1931 dan 1932 "verschui-vingsproces" telah terjadi

"Verschuivingsproces" dalam kalangan Belanda berarti keuntungan buat I.E.V., sebab ia yang menggantikan pekerjaan yang tadinya dikerjakan oleh kaum totok.

Oleh karena itu angka-angka Dr. Mansfelt tentang groep Europeanen kita mesti pandang dengan kaca mata lain.

Benar banyaknya groepstotaal Europeanen mundur akan tetapi kemunduran itu bukan berarti groep Indo yang mundur. Malah sebaliknya.

Juga angka-angka kemunduran tidak seberapa. Mari sekarang kita lihat angka-angka itu lebih jauh.

PROCENTUEELE BEZETTING VAN DE A – B EN C – SCHALEN NAAR LANDAARD

Schalen	Europanen		Inheemschen		Vr. Oosterlingen		Totaal	
	1928	1932	1928	1932	1928	1932	1928	1932
A	0.1	0.7	99.6	98.5	0.3	0.8	100	100

B	66.9	62.1	30.1	36.6	1.1	1.2	100	100
C	97.3	96.3	3.2	3.2	0.4	0.5	100	100
Totaal	17.6	16.5	82.6	82.6	0.4	0.4	100	100

Achteruitgang B schaal beteekent nog geenszin achteruitgang Indo (zie hierover).

Achteruitgang ook gevolg bezuiniging omdat enkele B schalen over gebracht naar Indonesische groep.

Achteruitgang niet neemenswaard, want meerderheid nog altijd Europeanen in dit geval Europ. beteekent Ind. Europ. Laten wij thans zich over geheele linie. Als er van achteruitgang sprake is en vooral t.a.z. administra-tieve betrekkingen moet zulks spreken uit ondervol-gende cijfers.

PERCENTAGE EUROPEANEN

	Departementen	1928	1937
1.	Reg. en H. Coll	72.6	68.2
2.	J ustitie	78.8	65.9
3.	Financien	63.4	57.8
4.	B.B.	48.5	43.6
5.	Oen E	71.3	62.1
6.	L.N.H.	70.4	64.4
7.	B.OW.	64.3	62.9
8.	G.B.	74.3	67.2
9.	DV.O.	57.5	51.9
10.	Marine	82.1	82.5
	Totaal	68.9	62.1

Achteruitgang minimaal ook hier versohuivings proces aan-wezig, meerderheid nog altijd Europeanen.

Kita lihat sekarang bahwa alasannya kaum LEV. yang ia terdesak oleh orang-orang Indonesia dalam hal menempati pekerjaan tidak dibenarkan oleh angka-angka.

Terutama dalam tahun-tahun crisis kemajuan golongan LEV. ada hebat. Jaman krisis dipergunakan sebaik-baiknya untuk mendesak ke atas dan ke bawah.

Sungguh ia mendesak ia berteriak sekeras-kerasnya yang ia terdesak.

Taktik yang digunakan oleh kaum I.EV. berhasil rupanya.

Banyak golongan yang dipengaruhi oleh teriakan yang ribut itu sehingga berikhtiar dan beraksi akan menulung dan menempatkan golongan I.E.V.

Komisi Spit juga dipengaruhi oleh teriakan golongan I.E.V. Ia percaya bahwa kaum I.E.V. terdesak dan oleh karena itu ia berikhtiar akan meluaskan hak-hak tanahnya.

Kita yang berkepala dingin heran yang sekalian orang bisa dipengaruhi oleh teriakan-teriakan yang tak ada dasarnya.

Rapat, yang terhormat,

Alasan-alasan yang dimajukan oleh I.E.V. untuk mendapat hak tanah baru dan yang kami kumpulkan dalarn 3 rombongan, satu per satu kami sudah bicarakan dan dalam pembicaraan itu nyata alasan-alasannya lemah.

Alasan-alasan yang karni bagikan dalarn 3 rombongan sekaliannya ternyata alasan-alasan yang tidak kuat seperti:

1. Indonesia sebagai tempat kelahiran dan tempat kuburan I.E.V. kelihatan tidak benar.
2. Bahwa hak-hak tanah yang ada kurang luas juga tidak benar.
3. Hak golongan Indo terdesak oleh kaum Indonesia di tempat-tempat pekerjaan terbukti tidak benar juga.

Marilah sekarang kita ambil pemandangan lain berhubung dengan permintaan perluasan hak tanah.

Kita mengetahui kaum I.E.V. selainnya boleh dapat berbagai-bagai hak tanah seperti eigendom, opstal, erfpacht dan lain-lain juga tidak bisa dapat klein landbouw.

Klein landbouw boleh dapat buat sedikitnya 25 tahun dan besarnya bisa sampai 25 bouw.

Selainnya tempo 25 tahun tempo mana biasanya disambung lagi, yang mengerjakan klein landbouw bisa mendapat voorschot untuk mengerjakannya sebab untuk klein lendbouw ini diadakan aturan sehingga ia bisa dapat credit dari Negeri dengan perjanjian-perjanjian yang enteng sekali.

Jangan dilupakan bahwa klein landbouw adalah kesempatan buat klein landbouwers, artinya tani-tani kecil.

Yang bisa mendapat klein landbouw orang-orang yang tidak mampu, boleh karena masuk golongan minvermogend.

Untuk pertanian ini disediakan 25 bouw tanah dan dinamakan tani kecil.

Di kalangan Indonesia orang-orang yang mempunyai 10 bouw termasuk orang senang, dan yang 25 bouw orang kaya.

Terlebih lagi 25 bouw itu boleh dibilang "buiten-verhouding" jika kita lihat gemiddeld grondbezit (kepunyaan tanah rata-rata) dari orang-orang Indonesia.

Indisch Verslag tahun 1932 menyatakan di tabelnya bahwa rata-rata kepunyaan tanah orang-orang Indonesia hanya 0,26 bouw di tahun 19340.19 bouw di tahun 1936.

Turunnya angka-angka ini berhubung dengan tambithnya penduduk tiap-tiap tahun.

Kita jangan lupakan bahwa rakyat Indonesia saban tahun bertambah dengan 800.000 jiwa mana mesti dikasih makan sehari-hari dan makanan mana terutama harus datang dari tanah oleh karena rakyat kita rakyat tani dan hasilnya yang terbesar dapat dari pertanian.

Kalau dibandingkan kepunyaan tanah dari anak Indonesia rata-rata dan kesempatan untuk dapat 25 bouw buat orang Indo, alangkah besar perbedaan itu.

Yang menambah keganjilan tentang klein landbouw lagi, kebanyakan permintaan tanah-tanah untuk klien landbouw itu, ada bagian-bagian tanah yang terletaknya di pulau Jawa.

Oleh kaum I.E.V. diminta tanah klein landbouw yang letaknya seboleh – boleh dekat kota – kota besar, dekat onderneming, dekat Mij-Mij besar, dekat hotel-hotel, agar supaya hasil pertaniannya gampang dijualnya dan mendapat harga yang bagus.

Mintanya pula tanah-tanah itu di pulau Jawa berhubung dengan gampangnya mendapat kuli dan murah bayarannya.

Oleh karena itu kita lihat bahwa klein landbouw diusahakan di pulau Jawa saja, yaitu berhubung dengan gampang menjualnya hasil pertanian dan berhubung dengan perkuliahan.

Di pulau-pulau lain umpama di Borneo, Timoer, Sumatera tidak ada klein landbouw, selainnya di Larnpung yaitu pertanian percobaan dari kaum I.E.V. di Glesting.

Keinginan untuk mendapat perluasan hak tanah sebetulnya terutama buat pulau Jawa.

Marilah kita lihat sebentar soal banyaknya penduduk di pulau Jawa.

Menurut Encyclopedie Britannie ada 3 negeri yang terbanyak penduduknya di keliling dunia yaitu:

Barbades banyaknya jiwa925 per mijl

Jawa banyaknya jiwa 689 per mijl

Belgie 635 per mijl

Belgie di Eropa tersohor paling padat penduduknya dengan kira-kira 256 K.M.

Akan tetapi kalau kita lihat angka-angka di Jawa angka itu tidak seberapa.

In 1930

West Java 243)

Midden Java 396)

Oost Java 314)

Jogjakarta 592)

Solo 425)

Java dan Madura 316 per K.M.2, sedang Belgie 257.

Cobalah pendengar insyaf arti-artinya angka-angka ini.

Negeri Jawa padat penduduknya.

Sungguh padat saban tahun tambah 800.000 jiwa.

Kepunyaan tanah anak negeri rata-rata di tahun 1934 hanya 0.19 bouw.

Untuk meringankan kepadatan penduduk saban tahun Pemerintah belanja puluhan ribu buat memindahkan rakyat (emigratie).

Di negeri yang penuh itu, yang jiwanya bertambah saja dan rakyatnya miskin, diadakan kesempatan buat mendapat tanah dan puluhan bouw.

Di negeri yang penuh itu, hak tanah salah satu golongan yang bukan anak pribumi akan diperluaskan lagi sehingga lebih gampang mendesak anak negeri.

Apa ini keadaan ada sehat, ada normal, atau ada logisch?

Dengan keterangan dan angka-angka di atas, sudahlah kami menjawab pertanyaan yang keempat yaitu:

Apakah yang baru dari kaum I.E.V. tidak menentang dengan hal-hal golongan lain. Kita sudah lihat bukan saja hal yang baru akan tetapi yang sudah ada pun menentang dengan keadaan rakyat Indonesia dan oleh karena itu sebenarnya harus Pemerintah mengadakan Comisie buat mengecilkan hak tanah kaum I.E.V. dan bukan satu Commisie untuk memperluaskan.

Pertanyaan kami ke 5 dan penghabisan berhubung dengan permintaan kaum I.E.V. ialah begini:

Apakah hak-hak baru itu akan berfaedah untuk masyarakat seumumnya?

Berhubung dengan apa yang telah dimajukan tadi, sudah tentu pertanyaan ini harus dijawab dengan "tidak ada faedahnya"!

Bagaimanakah akan jalannya jika hal I.E.V. diperluas-kan?

Sudah tentu yang akan terdesak orang Indonesia sebab yang diminta buat diperluaskan: hak untuk membeli tanah orang Indonesia yang sekarang masih dibatasi oleh Stbl No. 179 (Verordenings-verbond).

Oleh karena masyarakat Indonesia seumumnya butuh dengan keuangan dan oleh karena miskinnya ia selalu kekurangan uang, dan gampang mereka akan menjual hak tanahnya jika tidak ada larangan lagi.

Yang akan mengambil kedudukannya kaum I.E.V.

Apakah mereka ini akan mengerjakan tanah yang akan didapatnya?

Sudah tentu tidak. Sebaik-baiknya mereka akan marah atau suruh kuli mengerjakannya.

Menjadi orang-orang biasa mengerjakan pertanian diganti oleh orang yang belum atau yang tidak biasa menjadi tani.

Produksi tanah dengan jalan begitu tentu akan mundur, menjadi merugikan masyarakat.

Tambahan lagi akan bertambah kaum grondbe-zitsloozen, oleh karena tanahnya itu dibeli oleh kaum I.E.V.

Untuk mencukupi keinginan kaum I.E.V. buat mendapat bouw, harus mengusir kira-kira 25 orang Indonesia dari pertaniannya, melihat gemiddeld grondbezit ada 0.19 bouw.

Yang diusir ini belum tentu dapat pekerjaan lain dan jika bekerja sebagai deelbouwer, sudah tentu keadaannya akan mundur oleh karena derajatnya juga sudah mundur.

Pemandangan kami yang telah diuraikan mengha-ruskan kita berpendirian bahwa dengan jalan apa juga permintaan perluasan hak tanah dari kaum I.E.V. tidak ada jalannya buat dikabulkan.

Marilah sekarang kita periksa pendapatan – pendapatan (conclusies) dari Komisi Spit tentang soal ini.

Sebagaimana kami sudah kemukakan. Komisi ini mempelajari soal ini dengan dalam dan luas.

Pendapatan-pendapatan Komisi Spit ada banyak antara mana bahwa:

I. Berhubung dengan kedudukannya kaum Indo, harus diadakan kesempatan untuk mereka tinggal dan bertani.

II. Hak-hak yang baru bukan saja akan dikasih kepada orang Indo yang akan tinggal tetap di Indonesia, akan tetapi juga lain bangsa Belanda yang akan tinggal tetap di sini; (Yang

dipandang tetap orang-orang yang sudah tinggal 10 tahun di Indonesia dan kira-kiranya akan tinggal terus di sini).

III. Yang harus mendapat hak baru, bukannya orang-orang yang minvennogend (miskin), akan tetapi orang yang mindervermogend (tidak begitu kaya tapi bukan miskin).

IV. Kewajiban-kewajiban anak Indonesia yang berhubung dengan tanahnya juga akan berlaku buat orang-orang Belanda; akan tetapi kewajiban-kewajiban itu tidak usah dikerjakan boleh dibeli dengan uang. Ini berarti kebebasan dari kewajiban badan.

V. Untuk mendirikan dan pekarangan rumah, orang Belanda itu boleh mendapat tanah sebesarnya ½ bouw (3.500 M2).

VI. Untuk pertanian boleh mendapat sedikitnya 5 bouw. VII. Hak klein landbouw yang sekarang 25 tahun, akan ditetapkan buat 75 tahun.

VIII. Orang asing yang bukannya Belanda, akan diberi kesempatan mendapat hak tanah Indonesia buat mendirikan rumah sebesarnya 3.500 M2. Untuk pertanian tidak dapat.

Inilah pendapatan-pendapatan yang penting-penting saja. Pendapatan Komisi Spit sebetulnya lebih banyak lagi akan tetapi kami ambil yang perlu-perlu saja.

Rapat yang terhormat.

Jika kita menilik pendapatan-pendapatan Komisi Spit ini, maka nyata pada kita. Komisi itu memberi jalan untuk memperluas hak-hak bangsa Belanda atas tanah Indonesia dan mengecilkan hak tanah anak Indonesia seumumnya.

Hak-hak anak Indonesia yang memangnya sudah kecil akan dikecilkan pula.

Kami tidak akan mengupas pendapatan Komisi Spit di ini waktu satu per satu oleh karena bukan tempatnya.

Di kota Jakarta ketika rapport Spit diumumkan telah didirikan suatu Komisi dari orang Indonesia untuk mempelajari rapport Komisi Spit.

Komisi itu sedang bekerja dan belum rampung.

Komisi Spit mengambil tempo 5 tahun untuk membikin rapportnya.

Komisi kita tidak akan mengambll tempo 5 tahun untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Akan tetapi meminta tempo juga.

Keadilan meminta supaya komisi ini diberi tempo yang cukup luas untuk bekerja supaya rapportnya bisa selesai.

Kami harap dengan perbantuan tuan-tuan yang diminta, rapport itu segera rampung dan janganlah sesuatu voorstel dari Komisi Spit dijalankan sebelumnya rapport kita diumumkan.

Rapat yang terhormat.

Pendirian kami terhadap desakan kaum I.E.V. sudah nyata dari uraian kami tadi, biarpun kami tidak akan membicarakan pendapatan-pendapatan Komisi Spit sekarang.

Apa consessienya (ganjarannya) terhadap rakyat Indonesia berhubung dengan pengecilan hak tanahnya?

Apakah keadaan rakyat akan diperbaiki?

Apakah hak-haknya yang lain akan diperluas?

Apakah kaum I.E.V. akan mendekati rakyat Indonesia dan menyokong cita-citanya?

Kami belum melihat niatan-niatan kejurusan ini.

Jika kaum I.E.V. sekiranya nyata hendak memper-satukan dirinya dengan anak-anak Indonesia dan jika mereka membuktikan persatuan itu dengan kelakuan serta menyo-kong cita-cita kita, sudah tentu rakyat Indonesia akan berpendirian lain terhadap soal ini.

Untuk kaum Indo kami kira tidak usah memilih fihak hika ia sadar dengan asal dan kedudukannya.

Darah Indonesia memang sudah termasuk padanya sedang dalam hal adat lembaganya tidak berbeda banyak dengan kebiasaan anak Indonesia.

Dalam pidatonya tentang kaum Indo Ketua kita Dr. Soetomo telah membuktikan bahwa kaum indo itu memang sudah banyak miripnya dengan anak Indonesia.

Dalam sejarah pergerakan di lain negeri, umpama di Filipijnen dan di Mexico, kita melihat yang kaum Indo mengambil bagian besar dalam pergaulan kebangsaan mendapat kedudukan dalam masyarakatnya.

Akan tetapi mereka tidak pisahkan dirinya dari anak negeri di kedua negeri itu dan cita-citanya anak negeri menjadi cita-citanya kaum Indo juga.

Juga di Indonesia bisa ke adian apa yang terdapat di negeri-negeri lain. Asal saja kaum Ind. merubah sikapnya dan mempersatukan dirinya dan kepentingannya dengan anak Indonesia.

Selamanya keadaan ini belum terdapat susah kiranya rakyat Indonesia mengizinkan bahwa hak-haknya dikurangkan untuk menguatkan kedudukannya sesuatu golongan yang mengasingkan dirinya dari rakyat Indonesia umumnya.

Rapat yang terhormat

Dalam uraian kami sudah diterangkan bahwa alasan-alasan yang dimajukan oleh I.E.V. untuk mendapat hak tanah baru, tidak bisa dipegang dan lemah.

Alasan-alasan itu, juga dipakai oleh Komisi Spit.

Kalau alasan I.E.V. tidak bisa dipegang, alasan Komisi Spit sudah tentu sarna saja.

Kami kuatir dalam urusan soal Hak Tanah bukan alasan yang akan menjadi dasar, akan tetapi kekuasaan belaka.

Dalam uraian permulaan kami telah tuturkan apakah artinya hak tanah buat tiap-tiap rakyat.

Terlebih lagi buat rakyat yang dasarnya memang pertanian.

Memperluaskan hak tanah golongan-golongan yang bukan termasuk golongan anak pribumi asli berarti mengusir anak pribumi dari tanahnya yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya.

Mengecilkan hak tanah anak pribumi asli berarti pula menutup sumber pencaharian anak pribumi itu.

Untuk meneruskan sumber kehidupan rakyat- kehidupan yang serendah-rendahnya di kolong dunia hak-hak tanah anak Indonesia seharusnya diteguhkan dan bukan dikecilkan.

Rapat yang terhormat.

Pemandangan kami tentang soal hak tanah bersama ini sudah selesai.

Kami tidak akan menganjurkan sesuatu sikap kepada Kongres dan umum.

Kami penuh kepercayaan bahwa dalam hal ini soal Rakyat Indonesia akan dapat menentukan sikapnya sendiri dengan terang dan dengan jitu."[6])

Di dalam suatu perdebatan di *Volksraad,* Muhammad Husni Thamrin telah menjadikan masalah *Landrente* sebagai topik perdebatannya dengan pemerintah. Di dalam perdebatan itu nampak sekali ketangkasannya membela pendapatnya.

Dengan data-data yang konkrit diajukannya persoalan tersebut untuk mendapat perhatian dari pemerintah.

Untuk jelasnya ikutilah kutipan berikut:

"Marilah kita periksa pembicaraan Saudara Thamrin itu mulai dengan permulaannya.

Oleh pemerintah telah dimajukan satu ontwerpordonnantie untuk mengadakan perubahan dalam Landrente ordonnantie 1927 (Staatsblaad 163). Bersama-sama itu dimajukan juga Bali-landrente ordonnantie, Celebes-landrente-ordon-nantie dan Borneo-landrente-ordonnantie.

Di dalam pembicaraan Saudara Thamrin. itu adalah terutama yang menarik perhatiannya soal penetapan procentase aanslag Landrente yaitu 8 hingga 20% dari penghasilan bersih dari pak tani, yang rata-rata ada menjadi 14%.

Dalam pembicaraan termijn pertama, terjadi pada tanggal 6 Maret yang lalu, maka Saudara Thamrin kemukakan pikirannya seperti berikut, yang kita dapat baca dari handelingen Volksraad.

Lebih dulu saudara Thamrin menyatakan bahwa ia melihat beberapa perbaikan dalam rencana ordonnantie baru itu, yang ia terima dengan senang hati. Antaranya ialah penetapan harga padi tiap tahun, penurunan landrente atas tanah kering, tempat pemeliharaan ikan dan lain-lainnya, serta pula pembebasan tanah-tanah yang digunakan buat percobaan.

Akan tetapi, demikianlah kata saudara Thamrin, saya sesalkan sekali, bahwa heffingsprocentage, atau procentege aanslag tetap dipertahankan, yaitu 8 hingga 20% dari penghasilan, yang rata-ratanya menjadi 14% dari penghasilan bersih itu.

Meskipun dalam Memorie van Antwoord pemerintah telah menerangkan bhwa dalam landrente itu. termasuk bermacam elemen-ten lain, tetapi saya tokh berperidapatan bahwa penarikan

hingga 20% itu terasa amat berat. Meskipun dalam M.v.A, itu disalahkan, bahwa perbandingan antara landrente-belasting dan inkomsten-belasting atau loon-belasting, tidak pada tempatnya, tapi tokh penyalahan itu, bagaimanapun diperiksa bolak-balik, tidak akan dapat meruntuhkan pjkiran kami, bahwasanya procentace buat landrente tadi amat tinggi.

(Tuan Gotzen, wakil pemerintah menegor: Itu tidak betul).

Dalam landrente – ordonnaities telah dituliskan tentang procentase 8 hingga 20 % itu kata saudara Thamrin.

(Tuan Gotzen, wakil pemerintah: Tetapi ditetapkan sebagaimana termasuk dalam landrente ordonnantie itu).

Tentu, jawab saudara Thamrin, akan tetapi tokh tetap, bahwa penarikan itu sehingga 20% tingginya.

Sedang kaum buruh biasa cuma harus dikenakan 4% loon-belasting daripada penghasilannya, maka si tani di-kenakan 20%, meskipun ia bukan saja harus menggunakan tenaganya, tetapi pula harus mengeluarkan bermacam bea buat mengerjakan tanahnya itu, dan pula buat membeli alat pertanian. Dilihat sepintas lalu, maka si tani kelihatan memang enak, sebab ia mempunyai tanah, tapi hakekatnya tokh ia termasuk dalam golongan yang berat tanggungannya.

Oleh karena itu, maka dapat dimengerti, bahwa beban bagi pak tani amat berat pikulannya terutama oleh karena penghasilannya tidak tertentu.

Maka selayaknya bila di mana-mana dan sering-sering terdengar keluh kesah pak tani atas pajak yang terlalu berat baginya itu.

Cuma dalam teori 20%, tetapi praktis dapat naik pula sehingga 30%, apabila harga padi rendah dan bermacam sebab mengharuskari pak tani keluarkan ongkos lebih banyak, sehingga menyebabkan penghasilannya kurang. Dalam pada itu, buat pak tani pajak tanah bukan satu-satunya pajak baginya. Di samping pajak tanah, pak tani masih harus pikul beberapa pajak desa, kewajiban pada desa, yang dalam rupa uang, sejumlah 30 @ 50% daripada jumlah pajak land-rente itu. Saya tidak begitu tahu, apakah betul, bahwa di beberapa desa, malah orang harus pikul tanggungan desa itu sehingga 100%. Oleh karena alasan-alasan tadi, maka kami katakan, kalau rancangan pemerintah ini tidak

memuaskan kami, karena lebih memberatkan kepada pikulan pak tani.

Keterangan pemerintah, kalau aftrek buat padi kira-kira maxi-mum 9 quintaal satu hektare dianggap tidak rendah, tidak saja dapat disetujui. Sukar buat kami membuktikan pendirian kami itu dengan angka-angka, selama pemerintah tidak kemukakan angka-angka perhitungannya itu, bagaimana pemerintah dapat tetapkan afrek quitalen tadi, terutama juga karena aftrek atau pengurangan ini dihitungkan berdasar pada taksiran daripada bekal yang dibutuhkan, misalnya benih padi, kejelekan alat.alat (slijtage) atau pula kejelekan hewan buat membajak.

Penanaman padi, bukan satu soal yang hasilnya menguntungkan. Apabila orang hitungkan, betapa tenaga yang ia buangkan buat penanarnan padi itu, maka tenaga tadi dirupakan dalam angka, tentulah orang akan ketahui; betapa kerugian yang ia dapatkan dari pada penanaman padi tadi. Oleh karena itu, kami ingin pemerintah tidak terlalu memberatkan pikulan pak tani dalarn pajak tanahnya terutama.

Soal yang kedua, yang kami ingin bicarakan adalah apa yang disebut dalarn pasal 17 rencana ordonnantie landrerite itu. Dalam artikel itu dikemukakan supaya pembayaran landrente dalarn termijn diharuskan. Maksud daripada artikel itu, adalah buat menjalankan aturan ini bagi mereka, yang sebetulnya dapat membayar pajaknya, tetapi selalu tidak sukadengan bermacarn alasan.

Akan tetapi kami kuatir kalau dalarn prakteknya, orang nanti tidak berbatas sekian saja. Sebab, segera setelah padi diketam, panen, maka orang dapat ditarik pajaknya dan dapat pula membayarnya, meskipun harga padi amat rendah. Maka dari itu, tujuan Rukun Tani Parindra adalah betul sekali; penundaan bayaran pajak, menunggu tempo baik, pada waktu harga padi naik lagi. Oleh karena itu, adanya peraturan baru ini, tidak sama sekali kita inginkan. Sebab peraturan itu nanti memberi kemungkinan pembayaran pajak segera, setelah padi dipanen, meskipun harga rendah, tapi asal dapat memenuhi pajaknya. Saya ingin kemukakan satu contoh:

Dalam artikel 17 lid 2 ada tertulis seperti berikut:

Residen-afdeelingshoofd dapat memberikan putusan terhadap pada mereka yang harus memenuhi pajaknya, supaya

dibayar dalarn termijn satu atau dua kali. Jika tidak dipenuhi putusan ini, maka penarikan pajak harus dilakukan satu kali. (maksudnya ialah bahwa pak tani tidak lagi oleh tawar-tawar melainkan harus bayar sekaligus pajaknya red).

Dalam gedelegeerden-verslag, tentang hal ini telah dimintakan perubahan seperti berikut;

Resident-afdeelingshoofd dapat memutuskan, kalau penarikan landrente dari pak tani yang berkumpul cooperatie dan bersama-sarna mengumpulkan padinya buat pembayaran landrente kelak, tidak akan ditarik pajak dalam tempo tiga bulan setelah panen berlaku.

Saya hendak menunggu bagaimana jawab pemerintah tentang ini, dan jika perlu nanti kami jika perlu kemukakan lagi beberapa permintaan buat perubahan soal yang kami bicarakan ini.

Pertama kali tuan Thamrin memajukan penghargaannya atas jawab pemerintah yang begitu baik dan panjang lebar daripada pemandangannya dalam termijn pertama tentang perubahan ordon-nantie landrente itu. Juga tentang kelonggaran yang diberikan oleh wakil Pemerintah dalam membicarakan cara penarikan pajak landrente ini.

Di dalam jawabnya terhadap pada bermacam pembicara, maka wakil pemerintah telah begitu menegaskan dan kemukakan, yang di sini kami kutip, "Tuan Voorzitter:

Bahwa perubahan yang dimaksud oleh pemerintah tidaklah hendak mengubah prinsip dari landrente itu, melainkan cuma perbaikan-perbaikan yang praktis yang pada galibnya mengenal soal belasting technischen aard dan di samping itu dicocokan kepada susunan bestuur baru berhubung dengan terjadinya desentralisasi yang menyebabkan perubahan dalam perimbangan-bestuur masing-masing.

Dengan alasan ini, maka wakil pemerintah ingin supaya keberatan-keberatan saya, untuk menurunkan procentase aanslag 8 sehingga 20% itu, tidak diperdulikan. Kami anggap sikap yang demikian, yaitu daripada wakil pemerintah, untuk melalui saja pikiran saya dalam perdebatan ini, meskipun kami hargakan, tidak pada tempatnya. Rupanya juga oleh karena alasan wakil

pemerintah itu ditutup dengan apa yang dikemukakan dalam Memorie Van Antwoord, yaitu tentang belasting technischen aard.

(Tuan Gotzen Directur Dep. Financien wakil pemerintah menegor) :

Disamping itu, perubahan-perubahan yang dimintakan itu dimajukan dengan mengingat pada adanya bestuur-shervorming. Dengan ini maka soal belastingtechnischen aard merupakan 100% alasan buat memajukan perubahan ordonantie tadi).

Oleh karena itu, kata tuan Thamrin, alasan yang dikemukakan oleh pemerintah jadi bukan cuma karena sebab belastingtechnischen aard melulu.

Tuan Voorzitter, tidak benar keterangan wakil pemerintah, kalau ia hendak melalui saja pikiran kami untuk menurunkan pro-centages daripada aanslag landrente itu. Di dalam bagian *umum* dari-pada M.v. Toelichting pemerintah tokh sudah memberi keterangan, bahwa pemerintah anggap sedia mengadakan perlakuan baik atau kelonggaran lebih banyak terhadap pada orang-orang yang dikenakan pajak itu, yang termaktub dalam katagori atau bagian art 8 lid 3 dari berbagai macam rancangan itu. Keberatan-keberatan saya memang tidak mengenakan pada orang yang dikenakan pajak termaktub dalam artikel itu, tetapi ialah yang termaktub dalam artikel 7 lid 1.

Tuan Voorzitter. Keberatan-keberatan saya terhadap pada artikel 7 lid I itu, adalah karena prosentages aanslag yang tersebut dalamnya tidak diturunkan, melainkan dipertahankan, yaitu dari 8 hingga 20%, daripada penghasilan yang dijadikan dasar aanslag itu.

Kecuali, bahwa saya anggap prosentages ini amat tinggi terhadap pada orang-orang yang cuma mempunyai penghasilan sedikit yaitu mengenai orang-orang yang cuma mendapat penghasilan kira-kira f 100,- tiap tahunnya, jadi bagian atau katagori penghabisan daripada penghasilan belastingplichtige, maka saya telah kemukakan, bahwa dalam prakteknya prosentages yang tinggi ini, yaitu 8 hingga 20% dapat naik luar biasa sehingga 30% melihat kepada harga padi yang rendah, pemberian upah kepada deelbouwer atau lain sebab yang menurunkan penghasilan si tani tadi.

Jika orang sudah menghitungkan juga, kerja desa dan lain-lainnya di desa itu atau pula penarikan uang buat sesuatu keperluan desa, yang harus diberikan oleh pak tani itu, maka procentages yang tadi kami kemukakan, dipertahankan oleh pemerintah ada absurd atau tidak benar, sehingga menyebabkan adanya kekurangan pertimbangan antara penarikan pajak dan penghasilan dari pak tani. Saya kemukakan juga untuk menyangkal kebenarannya angkanya pemerintim itu dengan menunjukkan tentang penarikan loon belasting 4% adanya demikian pun inkomstenbelasting yang mengenai itu.

Manakah alasan-alasan wakil pemerintah untuk menyangkal kepada kebenaran pikiran kami ini?

Pertama kalinya, bahwa maximum procentages ada 20% itu cuma suatu angka teoretis saja, oleh karena sehingga itu tidaklah 20% penarikan landrente itu, melainkan cuma 18%, jadi 2% lebih sedikit daripada apa yang diperkenankan oleh ordonnantie tadi.

Pada waktu krisis merajalela, demikianlah kata wool pemerintah, maka dalam bermacam perubahan penarikan landrente itu, cuma dikenakan penarikan pajak landrente 16%.

Jadi 2% kurang lagi daripada penarikan yang tertinggi.

Dan seterusnya, bahwa procentages tadi cuma mengenakan atau berlaku buat 103 desa daripada 17500 desa yang dikenakali pajak landrente dari tanah Java dan Madura.

Tuan Voorzitter. Tuan tahu sekarang bahwa prosentage yang kami debat ini, yaitu 20% dalam perjalanan debat telah turun menjadi 16%, kemenangan mana saya terima dengan senang hati. Tetapi kami sayangkan, bahwa wakil pemerintah cuma terhenti pada angka 16% itu, dan tidak suka lebih turun lagi. Jadi wool pemerintah cuma terhenti di situ dan ia kemukakan aasan kebenaran dari angka itu seperti berikut:

Bahwa dalam landrente terdapat elementen inkomstenbelsting dan grondbelasting, dan tidak benar kalau belasting itu dengan loonbelasting atau inkomstenbelasting dan grondbelasting. Semuanya itu bukan hal-hal yang sama dan tidak dapat persamakan satu dengan lain, adalah tidak benar. Landrenteprosentages harus dilihat pada umumnya dalam peraturan-peraturan itu. Jika begitu demikianlah wakil pemerintah,

barulah orang mengerti kalau penarikan landrente dengan prosentage sebegitu besar ada pada tempatnya.

Apabila saya tanyakan bagaimana pemerintah mendapatkan angka ukuran 9 kwintal itu yang ditarikkan pada tiap hektare sawah, maka wakil pemerintah jawab, bahwa penarikan ini adalah penerusan atau perlanjutan daripada praktek, yang terdapat daripada Preangar nota tahun 1895, yang dulu memang menetapkan penarikan 10 pikul buat tiap bau but bea penghasilan (productie-kosten). Tetapi bagaimana angka ini dihitungkan, wakil pemerintah tidak dapat kemukakannya. Keterangan-keterangan wakil peme-rintah dalam hal ini tidak terang cuma sayup-sayup saja, dan kemudiannya menetapkan dengan begitu saja, bahwa ia harus tarik 9 kwitansi dari hasil tiap hektare itu. Dalam bahasa yang biasa, maka wakil pemerintah itu akan katakan: Saya tidak tahu bagaimana perhitungan penarikan 9 kwitansi itu buat tiap hektare itu, akan tetapi itu sudah saya pandang patuh.

Saya dalam pembicaraan kami lebih jauh, tuan Voorzitter, akan kembali lagi pada soal itu, tetapi sekarang bahwa penarikan 9 kwintal tiap hektare itu, apabila dihubungkan dengan Preangemota tersebut di atas, adalah menunjukkan, sebab menurut perhitungan kami 10 pikul buat satu bahu sawah, adalah jika dihitung dalam kwintal tidak lain daripada sepuluh kwintal buat satu hektare. Jadi satu kwintal lebih banyak daripada apa yang dikemukakan oleh wakil pemerintah tadi, (tuan Gotzen, wakil pemerintah: Anggota yang terhormat itu salah juga. Sebetulnya 8,6 kwintal).

Buat perhitungan ini, yang memang bukan soal yang penting, saya nanti akan kembali lagi, kata saudara Thamrin.

Jika dalam perhitungan tadi juga diperhatikan, kalau dalam tahun-tahun berikutnya pengeluaran si tani bukan saja dalam produksi, tetapi juga dibanding daripada tahun 1895 itu, adae bertambah banyak, maka saya lihat pertahanan jumlah beberapa pikul harus ditarik itu, menurut penetapan tahun 1895. Adalah tidak lain daripada pemberatan, pemberatan mana lebih diberatkan lagi karena perhitungan penarikan ditambah menjadi 9 kwintal daripada 10 kwintal.

Sekarang saya mau membantah alasan pemerintah menolak pikiran kami dengan mengadakan kesimpulan daripada

pidato wakil pemerintah itu lebih dulu. Pidato wakil pemerintah dapat kami bagi dalam dua bagian; pertama, bahwa dalam landrente itu terdapat elemen ten inkomsten dan grondbelasting, bahwa itupun juga tidak boleh dipersamakan dengan loonbelasting dan inkomstenbelsting. Landrente itu harus diperiksa dalam hubungannya sendiri, dan nanti orang akan berpendapat, bahwa procentage tadi sudah patuh. Seterusnya hubungan yang dibuat oleh college antara pajak desa (dessa-lasten) dan landrente, dalam memeriksa berat tidaknya pajak land-rente itu harus dilepaskan.

Kedua kalinya, bahwa bea yang dikeluarkan buat produksi dan penghasilan lainnya, yang menyebabkan hams ditarik 9 kwintal itu tiap hektarenya, hakekatnya tidak boleh dihitungkan atas dasar faktor-faktor yang telah dikemukakan oleh wakil pemerintah tadi.

Tuan Voorzitter! Tentang alasan-alasan yang tidak disetujui oleh wakil pemerintah. dalam mempersamakan pajak landrente dan loon serta inkomstenbelasting itu, cuma sebagian yang kami setujuinya. Cuma sebagian dari sebab menurut keterangan pemerintah, dalam landrente itu terdapat juga element inkomstenbelasting. Sedang element lainnya adalah dirupakan suatu sifat grondbelasting dalam landrente itu. Saya telah mencari suatu pokok buat persamaan dengan grondbelasting itu, dan saya dapat juga mempengiraan, bahwa persamaan itu dapat kita ketemukan dalam verpondingsbelasting.

Jumlah yang harus dibayar buat inkomsten dan verpondings-belasting dapat dijadikan ukuran buat menim-bang betul tidaknya aanslag landrente itu. Buat mengetahui tentang sedikit banyaknya verpondingsbelasting, maka haruslah diketahui dulu berapa jumlah yang dikenakan belasting itu, jadi verpondongswaardenya. Dalam hal ini lalu saya menghadapi kesukaran, karena tiada catatan bagi kami berapa harga persewaan sawah itu, yaitu sebagai mana dimaksud dalam vervondinge-ordonnantie. Hal ini kami cuma dapat perhitungan daripada kejadian-kejadian dalam prakteknya.

Persewaan sawah dalam kalangan bumiputera sering terdapat dalam bermacam rupa. Dalam suatu hal, maka deelbouwer atau orang yang mengerjakan sawah itu, mendapat sepertiga dari panen, sedang pemberian benih dan lain – lain bea misalnya buat pajak dan lainnya, harus dipikul oleh orang yang punya sawah itu sendiri. Adapun, yang biasa diketemukan, adalah

bahwa yang mengerjakan sawah itu mendapat setengah bagian dari panen seluruhnya, diambil bawon ditambah dengan hasil tanaman palawijo dan sebagainya, sedang yang punya tanah cuma mendapatkan setengah dari panen itu. Dalam hal ini dapat dikemukakan jumlah harga persewaan sebagaimana dimaksud dalam art 6 lid 2 dari verpondings-ordonnantie. Dan oleh karena itu, yang menurut verpondings-ordonnantie art 6 lid 1, sepuluh kali lipat daripada harga persewaan tiap tahunnya.

Datang pada hal ini, maka dapatlah kami kemukakan perbandingan pajak-pajak yang terdapat karena ordonnantie landrente dengan apa yang kami kemukakan tadi dalam satu hal yang sama yang mengenai verpondingsordonnantie dan inkomstenbelastingordon-nantie.

Untuk menjaga supaya saya tidak dituduh oleh wakil pemerintah, bahwa angka yang saya ajukan tidak boleh dipercaya, maka saja akan kemukakan angka-angka saya sebagai pokok perbandingan, dan saya akan ajukan angka-angka yang dikemukakan oleh wakil pemerintah tentang penghasilan bruto dari 23 kwintal padi ditarik yang 9 kwintal, sebagai bea yang dikeluarkan buat penghasilan itu.

Lebih dulu saya ingin kemukakan, bahwa jumlah penghasilan yang dimajukan oleh wakil pemerintah tadi tidak cocok dengan apa yang telah dicatat oleh Centraal Kantor voor de Statistek. Daripada pemandangan tentang keadaan pertanian bumiputera, buat tahun 1937, yang diumumkan dalam Economisch Weekblad 2 September 1938 no. 53 maka dalam tabel 13 kami dapat baca, bahwa penghasilan panen dad tanah Jawa dan Madura, rata-rata dalam waktu 11 tahunan, cuma ada 21.09 kwintal padi kering tiap hektare, apabila orang cuma memperhatikan panen yang tidak gagal, jadi dengan tidak menghitung panen yang telah gagal, dan 20 kwintal, apabila orang ambil luasnya tanah yang ditanami sebagai dasar perhitungan.

(Tuan Gotzen: Dalam tabel ini tidak dituliskan, bahwa tiap sawah ditanami dua kali setahun).

Saya Cuma maksudkan angka-angka dalam tabel tadi, dari angka-angka mana pemerintah telah mengambil perhitungan sehingga mendapatkan jumlah 23 kwintal itu.

(Tuan Gotzen: Jika orang hitungkan tiap sawah ditanami dua-kali setahun dan dipanen juga dua kali setahun, dan sawah tadi dihitung dua kali, maka tidak bisa orang dapatkan jumlah dari penghasilan panen tadi dengan betul).

Saya menanya kepada wakil pemerintah supaya suka memberi keterangan, dad manakah pemerintah dapatkan angka 23 kwintal itu.

Saya ambilkan angka-angka saya dari Centraal Kantor v. de Statistiek dalam mana sebagai penghasilan rata-rata dalam waktu 11 tahun (elfjarige periode) 21.09 kwintal padi kedng. Tapi biarlah saya teruskan dengan angka yang salah itu.

(Tuan Gotzen: Angka-angka itu betul).

Baik, jika begitu masih harus dibuktikan. Jika tuan katakan betul, angka-angka yang tuan majukan tadi, kata tuan Thamrin, maka kesimpulannya adalah bahwa angka-angka dari Centraal Kantor v.d. Stateistiek tidak betul?

(Tuan Gotzen: Tuan barangkali tidak sungguh-sungguh membacanya).

Saya kira, jawab tuan Thamrin, bahwa tuan mendapatkan angka 23 itu, karena jumlah total dibagi oleh angka 10 yang sebetulnya 11.

Voorzitter: Wakil pemerintah tentang itu nanti akan berikan keterangan dalam termijn kedua.

Tuan Thamrin: Saya juga berpendapat demikian. Meskipun demikian kami dapatkan angka-angka seperti berikut:

Angka-angka landrenteordonnantie dijalankan.

Pendapatan bruto	23 quintalen
Bea pengeluaran	9 quintalen
Hasil padi yang dikenakan pajak	14 quintalen
a f 5.72 (rata-rata harga pasar dalam 13 tahun tabel 254 Ind. Verslag 1938)	f. 80.08
Hasil palawija, manis a rata-rata 9.72	
quintalen (tabel16 1937 elfjarig tijdvak)	
a f 5.86 overzicht Inl Landb tahun	
(zie tabel 254 LV. 1938)	f 56.95

¾ x f 56.95 f 18.98

37.97

hasil yang dikenakan pajak semua f 118.05

Landrente 14% f 16.52

Waktu dilakukan verpondingsbelasting dan inkomsten-belasting.

Verpondingswaarde 10 x

f 118.05 ..... f 1180,-

verpondingsbelsating ¾ % dari f 1180 8.85

inkomstenbelasting tidak dikurangi 11 menurut a. klasse I. art 27 ordonnantie

inkomstenbelasting ..... f 1,-

semua ..... f 9.85

Daripada contoh yang kami kemukakan itu, maka teranglah betapa beratnya bagi Pak Tani apabila pajak landrente dibandingkan dengan verpondings dan inkomsten-belastingnya. Jadi melihat kepada angka-angka tadi, nyatalah sudah bahwa pak tani harus membayar lebih banyak pajak daripada penduduknya yang cuma dikenakan verpondings dan inkomstenbelasting, sehingga nyata sekali tidak adil.

Setelah itu lalu tuan Thamrin kemukakan angka-angka yang ia dapatkan daripada. praktek, yaitu yang mengenai panen dari empat ressort seperti Purbolinggo (Banyumas), Brebes, Cimahi dan Lumajang. Dari semua kejadian ini, maka sawah-sawah yang tersangkut berharga f 450,- (kira-kiraan tuan Thamrin), per hektare, sehingga tiap setahunnya sawah tadi sudah untung kalau laku f 300,-.

Saya telah coba, kata tuan Thamrin, untuk mendapatkan harga-harga sawah itu dari C.K.S. tetapi kantor ini tidak mempunyainya.

Oleh karena itu, maka angka-angka saya ini, berdasar kepada pengiraan saya sendiri diambil rata-ratanya, yaitu tiap bahu sawah seharga f 300,- suatu angka yang amat tinggi, apabila diingatkan, bahwa di Jawa Timur terutama, harga sawah itu amat rendah. Jadi bila jumlah f 300 itu kami jadikan pokok perhitungan

buat tiap bahu sawah, maka lalu kami dapatkan angka-angka seperti berikut:

Purbolinggo.

Waktu dijalankan landrente-ordonnantie:

Bea pengeluaran buat mengeringkan padi 1 tahun tiap bahu

@ 15 quintalen 30 q.a' f 3,-	f	90,-
polowijo 1 x 1 tahun	f	10,-

Bea pengeluaran buat mengerjakan sawah

buat padi 2 x f 12.50	f	25,-
buat polowijo	f	5,-
bawon 1/8 x 30q	f	11.25
	f	41.25
Panen yang dikenakan pajak tiap bau	f	58.75

Jumlah landrente per ha f 16.50 atau tiap bahu f 1,- atau kira-kira 19% dari panen.

Kerja desa per tahun:

ronda afkoop f 2 dan krigan afkoop f 2,- (krigan, kelja desa buat memelihara jalan, kuburan dan lain-lain) tiap kuli dari 300 a' 400 ru, tiap bouw 5/3 x f 4 = f 6.65.

Jadi pajaknya ada f 11 + f 6.65 = 17.65 at au 30% dari penghasilan.

Waktu di jalankan verpondings dan inkomstenbelasting-gordonnanties:

verponding %% dari f 300,-	f	2.25
inkomstenbelasting A klasse I	f	1,

Belasting tidak kerja desa f 3.25,-

Brebes

Waktu dijalankan landrente-ordonnantie:

Hasil 40 pikul kering a' f. 1.70	f	68,-
hasil bersih polowija (kedele)	f	10,-

		f	78,-
kerja tanah d.l.	f 15,- bawon		
5 pikul a f. 170	f 8.50	f	23.50,-
Panen yang dikenakan pajak		f	52.50,-

Jumlah landrente f 14.73 dengan 30% crisisontheffing atau f 9.57 (18%)

Lain-lain kerja desa

pembelaian pancendiensten	f	1.70,-
ulu-ulufonds	f	1,-
sokongan buat schoolfonds 4% dari landrente	f	0.38,-
landrente	f	9.57,-
semua	f	12.65,-

atau 24% dari hasil yang dikenakan pajak

Waktu dijalankan verpondings dan inkomstenbelasting ordonanties :

verponding 3/4% dari f 300	f	2.25,-
inkomstenbelasting A klasse I	f	1,-
	f	3.25,-

Demikianlah antara angka-angka yang kami dapatkan, yang dapat diketahui dari dalam prakteknya dan dapat pula diselidiki betul tidaknya.

Setelah itu lalu saudara Thamrin tunjukkan betapa besar sekali prosentage yang ditarikkan daripada belastbare opbrengst pak tani atau penghasilan yang dikenakan pajak tadi, yang lebih besar daripada angka-angka atau penarikan daripada verpondings dan inkomsten-belasting. Dari sebab itu kami merasa janggal, kalau pemerintah cuma suka turun hingga 16% saja, yang dalam prakteknya dapat juga menjadi 20% malah ditarik daripada hasil panen yang belum dihitung bersih."[7])

Bumi Indonesia mengandung minyak yang merupakan salah satu potensi penting di dalam kelangsungan hidupnya. Masalah potensi ini tidak luput pula dari perhatiannya. Dalam beberapa

kesempatan hal ini telah disinggungnya. Untuk jelasnya di bawah ini akan kami kutipkan sebuah tulisannya yang menyangkut hal tersebut:

"Minyak yang dikeluarkan dari dalam tanah dan dibuat jadi rupa-rupa jenis (bensin, stookolie, minyak tanah dan lain-lain) adalah suatu bahan yang sangat penting untuk peperangan. Sebenarnya lebih dari penting! Untuk berperang harus ada minyak tanah, oleh karena jika tidak mempunyai minyak perang tidak bisa dilanjutkan.

Sesudah perang dunia yang lalu (1914-1918) Llyod George sebagai minister-president Inggris telah mengeluarkan ucapan yang kami pasang di kepala karangan ini.

Ketika perang dunia tersebut Clemenceau, minister-president Perancis telah berseru dengan sangat kepada Presiden Wilson dari Amerka, supaya dengan segera mengirimkan minyak tanah ke Perancis sebanyak mungkin, oleh karena:

"Bagi Perancis setiap tetes minyak sama harganya dengan setetes darah .....".

Bukan saja ucapan kedua pahlawan besar ini yang menandakan pentingnya minyak sebagai alat peperangan. Mereka yang mementingkan literatur tentang minyak pasti mengetahui juga bahwa oleh karena memperebutkan minyaklah, maka beberapa negeri tidak segan berperang. Ucapan yang telah umum tentang minyak dan yang membuktikan, bahwa riwayat mendapat atau merebut minyak tanah, banyak kisahnya, adalah sebagai berikut:

Aan de geschiedenis der petroleum is een (lijken) luchtje verbonden ..... (Sejarahnya minyak tanah berbau mayit orang).

Ketika perang dunia 1914-1918 minyak tanah menjadi bahan yang amat penting sekali, sehingga Lloyd George menerangkan, kemenangan Inggris dalam peperangan hanya tercapai di atas gelombang minyak, artinya Inggris dan serikatnya hanya menang, oleh karena memperoleh kirirnan minyak dengan secukupnya.

Kalau di tahun 1914-1918 bahan minyak telah begitu penting untuk mendapatkan kemenangan, apalagi pepe-rangan sekarang;

Sebabnya?

Dalam peperangan tahun 1914-1918 kapal perang kebanyakan memakai arang batu (steenkool) sebagai bahan pembakar, oleh karena ketika itu baru dimulai mengubah mesin-mesin untuk memakai minyak.

Pada waktu sekarang sekalian memakai minyak.

Pada waktu sekarang sekalian kapal perang modern memakai minyak (stookolie), oleh karena, baik tempat untuk mesin maupun tempat untuk menyimpan bahan pembakar, ada jauh lebih ringkas, sehingga kelebihan tempat ini dapat digunakan untuk membesarkan persenjataan.

Pasal yang kedua untuk membuktikan kepentingannya dipeperangan ini, ialah balatentara darat sekarang menggunakan banyak kendaraan mesin yang memakai minyak daripada di dalam peperangan yang lalu. Balatentara modern menggunakan segala rupa kendaraan mesin seperti tank, pantser auto, tractor, auto, motorfiets dan lain-lainnya, sehingga boleh dibilang sebagian besar dari bala tentara darat berkendaraan mesin (gemechaniseerd).

Sekalian ini memakai minyak!

Di peperangan 1914-1918 kendaraan mesin tidak ada sepersepuluh daripada yang digunakan sekarang.

Marilah kita tilik pula senjata yang terutama dalam peperangan ini, yakni mesin terbang!

Tiap-tiap hari kita baca dalam harian bagaimana pentingnya dan hebatnya senjata ini. Masing-masing negeri menggunakan senjata ini sehari-hari dengan ratusan banyaknya. Menurut kabaran pembikinan mesin terbang dinegeri-negeri yang berperang itu Jerman dan Inggris sangat diperluas, sehingga tiap-tiap negeri itu membikin kira-kira 60 @ 70 mesin terbang setiap hari.

Mesin terbang hanya berjalan dengan minyak dan oleh karena itu menggunakan apa yang telah dikatakan di atas tadi, tentang kepentingannya minyak sebagai bahan perang.

Sekiranya dengan keterangan kami ini, pembaca telah turut yakin betapa pentingnya minyak untuk setiap negeri, maka datanglah saatnya kami mengajak tuan mengetahui betapa pentingnya Indonesia. sebagai negeri yang mempunyai dan mengeluarkan minyak dan berhubung dengan itu, betapa

pentingnya Indonesia dalam gelombang politik di bagian Lautan Teduh alias Pacific.

Indonesia bukan saja tentang kina, lada, kopra, karet, teh, timah, dan lain-lainnya mempunyai kedudukan yang tinggi dan penting dalam perdagangan dunia.

Juga tentang minyak, Indonesia memperoleh kedudukan yang utama. Hanya empat negeri yang mengeluarkan minyak lebih tinggi kedudukannya dari Indonesia, yaitu Amerika, Ruslan, Venezuela dan Iran (Persia). Negeri yang kelima yaitu Indonesia; menurut tabel Economisch weekblad 9 Agustus 1940 bldz 1463 dalam tahun 1938 Indonesia telah mengeluar-kan minyak 7.3 97 .774 metrieke tonnen. banyaknya, yaitu:

Sumatera	4.662.836
Borneo	1.719.783
Jawa	933.595
Ceram	81.560
metrieke tonnen	7.397.774

Banyak minyak yang dikeluarkan dari Indonesia setiap tahun makin baik.

Menurut verslag Mijnwezen dari mulai tahun 1925 t/m 1936 yang terdapat dalam artikel Dr. Mautner ditahun 1937 (Economisch Weekblad No. 51). Maka banyaknya pengeluaran minyak dad 3.066. 161 ton ditahun 1925 naik menjadi 6.436.882 ton ditahun 1936.

Kita lihat di atas tadi, bahwa di tahun 1938 sudah lebih banyak lagi.

Buat mengetahui bagaimana pentingnya Indonesia dalam dunia minyak hendak kami bicarakan di sini perbandingannya dengan negeri-negeri lain.

Minyak yang dikeluarkan dari pulau Jawa di tahun 1936 lebih banyak dari yang dikeluarkan dad seluruh Deutschland dan sama banyaknya dengan yang dikeluarkan negeri Polen (Jawa 1936-498.99 kg. ton).

Minyak yang keluar dari Palembang lebih banyak dari yang dikeluarkan negeri Columbia yang mempunyai kedudukan penting dalam dunia minyak (palembang 1936 - 2.761.711 kg. ton).

Minyak Jambi sama banyaknya dengan minyak Britsch Noord Borneo atau dengan pusat minyak yang baru di Bahrein - Persische Golf (Jambi 1936-663.054 kg. ton).

Minyak Borneo hampir sarna banyaknya dengan keluaran Trinidat, yang dalam lingkungan kerajaan Inggris mengeluarkan minyak yang terbanyak (Borneo 1936 - 1.773.545 kg. ton).

Tempat lain yang mengeluarkan minyak di Indonesia adalah Sumatra Timur, Aceh dan pulau Ceram (Molukken) sedang di Niew Guinea sedang dicari dan menurut kabar sudah didapati pula.

Boleh dibilang di seluruh Indonesia didapati minyak, di sini banyak dan di sana kurang, akan tetapi sekaliannya menjadi banyak.

Sebagaimana umum mengetahui, maka minyak yang keluar dari dalam tanah tidak bisa digunakan begitu saja dan harus dikerjakan dulu. Sepanjang. pengetahuan kami, maka hanya minyak yang keluar dari Tarakan tidak perlu dikerjakan lagi, akan tetapi bisa lalu dipakai sebagai minyak pembakar untuk kapal (stookolie). Selain minyak Takaran yang lain harus dibersihkan dan dikerjakan lagi untuk dijadikan minyak tanah, bensin untuk rupa – rupa keperluan (ada puluhan rupa bensin) smeerolie, paraffine (lilin), asfalt dan rupa-rupa keperluan lain.

Untuk mengerjakan ini, maka didirikan pabrik di berbagai-bagai tempat seperti: (urutan menurut besarnya).

Sungai Gerong (palembang).

Balikpapan (Borneo Timur).

Plaju (palembang).

Pangkalan Brandan dan Suban Jerigi (Sumatra Timur) 30-40% bensin, suatu keadaan luar biasa dan yang tertinggi di seluruh dunia, sedang minyak Amerika setinggi-tingginya hanya 20% banyak bensinnya. Akan tetapi banyaknya prosen bensin tidak menandakan bahwa" Sumatra mengeluarkan bensin yang terbanyak di dunia, sebab menurut ilmu kimia sekarang, bensin itu bisa dibikin dengan jalan ilmu itu dari minyak biasa yang keluar dari dalam tanah.

Kepentingan minyak dalam economi Indonesia akan ternyata dari yang berikut ini;

Mulai dari tahun 1933 banyak minyak yang dikeluarkan dari Indonesia lebih dari separuh sekalian barang yang dikeluarkan (meer dan 50% van de totaal export) dan menurut harganya kira-kira seperlima dari sekalian pengeluaran (export) Indonesia.

Nanti akan kami terangkan siapa dan negeri mana yang mempunyai kapital dalam perusahaan minyak di Indonesia, sehingga akan terang pada pembaca kemestian adanya bentrokan kepentingan an tara beberapa negeri, oleh karena kepentingannya memaksanya.

Juga akan kami uraikan desas-desus sekitar conferensi Belanda - Japan di Jakarta, berhubung dengan soal minyak itu.

Minyak Indonesia dikuasai oleh dua kongsi raksasa! Datang saatnya sekarang untuk menceritakan siapa yang menguasai minyak di Indonesia. Sebelum tahun 1912 maka sekalian sumber minyak dipegang oleh Koninklijk Maatschappij tot exploitatie van petroleum bronnen in Nederlandsch Indie (terkenal di Indonesia sebagai B.P.M.) dap Shell Union Oil Corperation (dengan nama pendek Shell). Kedua kongsi ini telah dijadikan satu dengan gelaran : Koninklijke/Shell groep. Sebagaimana telah umum, kedua kongsi minyak ini mempunyai perusahaan di sekeliling dunia, maupun di Asia, Afrika, Eropa ataupun Amerika. Masing-masing kongsi menguasai berpuluh-puluh kongsi minyak di seluruh dunia yang namanya berupa-rupa, akan tetapi yang kendalinya dipegang oleh Koninklijke/Shell groep.

Kapitaal dari kedua kongsi ini menurut Zischka ada lebih dari 1000 million rupiah besarnya dan yang menguasai kongsi kedua ini yakni bangsa Belanda (BPM) dan bangsa Inggris (Shell).

Di pihak bangsa Belanda menurut majalah "Politiek en Cultuur" hanya 3 famili saja yang menguasai kapital minyak, yakni famili Kessler dan Stoop yang menguasai kurang lebih kapital sebesar 900 million rupiah dan famili van Leeuwen yang menguasai kapital besarnya 700 million rupiah.

Uang dari ketiga famili ini semua dimasukkan di perusahaan minyak, akan tetapi juga di perusahaan waja, semen industri dan bank-bank.

Di tahun 1912 maka negeri Belanda didirikan sebuah kongsi baru yang diberi nama Nederlandsch Koloniale Petroleum Mij. Biarpun namanya kongsi ini serupa kongsi Belanda dan Direksinya

juga di tangan orang Belanda, sebenarnya yang menguasai kongsi ini Standaard Oil Company of New Yersey yang berpusat di Arnerika dan yang terkenal sebagai kongsi Rockafeller.

Kongsi minyak Standard Oil Co. New Yersey juga mempengaruhi puluhan kongsi minyak di seluruh dunia, yang juga diberi rupa-rupa gelaran dan kapitalnya terutama di tangan orang Arnerika dan besarnya kapital ada berlipat ganda dari kapital kongsi Koninklijke-Shell.

Dengan mendirikan kongsi Nederlandsche Koloniale Petroleum Mij, di negeri Belanda, maka kongsi minyak Arnerika menyatakan keinginannya untuk mendapat bagian dari kekayaan minyak di Indonesia. Yang menjadi perebutan di waktu itu minyak Jambi yang tersohor banyaknya biarpun minyak itu belum dikeluarkan dari dalarn tanah. Keinginan kongsi Amerika untuk mendapat bagian dari kekayaan minyak di Indonesia menimbulkan pertentangan yang hebat antara Pemerintah Amerika dengan Pemerintah Belanda di tahun-tahun sesudahnya 1912. Pertentangan itu barulah lenyap di tahun 1927, sesudah Nederlandsche Koloniale Petroleum Mij mendapat consesie di Palembang; consessie itu sekarang menjadi pusat perusahaannya di Sungai Gerong.

Consessie untuk mengambil minyak di Jambi tidak diberikan kepada salah satu pihak, oleh karena pemerintah Belanda mengusahakan sendiri minyak ini dengan mendirikan satu kongsi baru yang dipunyai oleh Pemerintah Belanda bersarna dengan BPM dan kongsi ini diberi nama Niarn (Neder-landsche Indische Aard Oil Mij).

Dengan jalan begini maka kapital kongsi minyak di Indonesia yang sehingga tahun 1912 hanya ada dalam tangannya bangsa Belanda dan Inggris, sesudah tahun 1912 ditambah dengan kapital bangsa Amerika.

Di permulaan karangan ini kami telah terangkan dengan singkat pentingnya bahan minyak buat keperluan perang. Oleh karena itu kita tidak usah heran, bahwa sekalian kepentingan minyak di Indonesia yang dipegang oleh beberapa kongsi, juga menjadi kepentingan Pemerintahnya.

Umpamanya ada yang hendak meringati kongsi minyak Amerika atau mengganggu kepentingannya, maka perbuatan demikian, akan campur tangan dalam urusan itu. Begitu pula

dengan kongsi minyak Inggris. Sejarah minyak tanah tidak sunyi dari pertempuran Pemerintah antara Pemerintah, untuk merebut sumber minyak yang telah ada.

Sebagaimana telah kami terangkan di atas tadi, inaka di Indonesia pada masa ini, ada tiga golongan yang berkepen-tingan dengan minyak di Indonesia, yaitu golongan Belanda, golongan Inggris dan golongan Amerika.

Perusahaan minyak menjadi perusahaan yang memakai kapital puluhan million. Kami boleh pastikan, bahwa setiap dari ketiga golongan yang berkepentingan dengan minyak di Indonesia, paling sedikit telah memakai kapital 100 million rupiah buat satu-satunya. Kita bisa mengerti yang segala gangguan atau bahaya atas kapital sebegitu besarnya tidak akan didiamkan dengan begitu saja.

Masing – masing pihak akan mempertahankan kepentingannya. Jika bisa dengan jalan lembut, jika perlu dengan jalan keras. Ini sudah semestinya.

Apakah ada angin-anginnya, kepentingan minyak dari bangsa Belanda, Inggeris atau Amerika bisa terganggu pada masa ini?

Desas-desus sekelilingnya Conferentie Belanda - Jepang. Karangan ini kami kunci dengan pertanyaan, apakah pasa masa ini ada angin-anginnya kepentingan minyak dari bangsa Belanda, Inggeris dan Amerika di Indonesia bisa terganggu?

Untuk menjawab pertanyaan ini maka harus kami ingatkan pada pembaca, pentingnya minyak sebagai bahan buat menjalankan rupa-rupa mesin, terutama mesin untuk berperang. Oleh karena itu setiap negeri berusaha untuk mendapat minyak sebanyak mungkin.

Pertalian apakah yang ada antara minyak di Indonesia dengan conferentie antara Belanda dan Jepang yang pada masa ini sedang berjalan, akan tetapi tidak ada kabarnya keluar sedikit jua pun?

Marilah kita periksa.

"Nationale Commentaren" No. 37, majalah yang dikeluarkan oleh Dr. Ratulangi, menyatakan herannya adanya pertentangan kabaran, ada atau tidak adanya conferentie tentang minyak antara utusan Jepang dan Belanda.

Duduknya perkara begini:

Pada tanggal 4 September dalam "Java Bode" termuat satu kabaran, bahwa di Jakarta telah mulai conferentie tentang urusan minyak antara utusan Jepang yang dikepalai oleh tuan Mukai, Presiden dariMitsua Bussa Kaisha dan tuan-tuan Pan-thaleon van Eck, Directur dari Koninklijke Petroleum (BPM) dan Fred dari Standard Vacuum (kongsi minyak Amerika). Conferentie ini katanya diadakan di bawah penilikan utusan dari Pemerintah Belanda di Indonesia.

Kabar ini diberikan dengan pasti dan tidak ragu-ragu lagi oleh Jawa Bode.

Akan tetapi pada tanggal 7 September surat mingguan "Toh-Indo-Nippo" menyatakan herannya tentang kabaran "Java Bode" oleh karena menurut majalah ini sarna sekali tidak ada conferentie sebagaimana yang dikabarkan.

Pertentangan kabaran sebenarnya mengherankan. Pihak "Java Bode" mengabarkan dengan pasti adanya conferentie akan tetapi Toh-Indo-Nippo memungkirinya, dan dengan pastinya pula. Pihak mana yang benar?

Yang perlu dikemukakan ialah pertanyaan mungkin atau tidaknya atau akan adanya pembicaraan tentang minyak antara pihak Japan dan Belanda?

Menurut pikiran kami mungkin adanya, melihat beberapa tanda-tanda.

Tanda yang pertama ialah kedatangan dua pahlawan dari dunia minyak dengan berbareng dengan adanya urusan Japan di Indonesia.

Tuan-tuan baron Panthaleon van Eck, Directur Koninklijke dan Fred Kay (Standard) dengim sekonyong-konyong mengunjungi Indonesia dengan memakai kapal terbang dari Amerika via Manila. Kita boleh pastikan kedua beliau datang di sini bukan untuk pesiar akan tetapi berhubung dengan kepentingannya sebagai jago minyak.

Tanda yang kedua: Japan sebenarnya butuh dengan minyak. Menurut perhitungan Zischka maka Japan bisa mencukupi hanya 1/5 dari keperluan minyak dari sumber minyak di negeri sendiri, yaitu dari Sachain dan Manchuko. Ini dalam waktu yang biasa. Ahli-ahli ilmu peperangan menghitung dalam

waktu perang keperluan minyak ditambah 2 atau 3 kali banyak dari waktu keadaan biasa. Melihat dari kebetulan ini maka sudah selayaknya jika dari pihak Japan dicoba untuk mendapat minyak dari Indonesia, yang mempunyai banyak kelebihannya, sehingga kelebihan minyak itu harus dijual ke luar negeri.

Tanda yang ketiga bahwa soal minyak sudah atau akan menjadi pembicaraan dalam conferentie, ialah bahaya yang mengancam Japan dari pihak Amerika.

Bukanlah Amerika telah sering mengancam, dengan mengadakan embargo (larangan) buat mengirim minyak dari Amerika ke Japan, jika Japan berkehendak merubah status quo Oost Azie?

Jika Amerika wujudkan ancaman terhadap Japan maka sudah tentu negeri itu harus berdaya untuk keperluannya di negeri lain dan negeri lain itu, tidak lain daripada Indonesia. Letaknya dekat, sehingga mudah dan cepat bisa diambil dan tidak perlu memakai banyak kapal tank. Minyak Indonesia pun baik dan kelebihannya banyak pula.

Melihat tanda-tanda yang tersebut di atas, maka menurut pikiran kami, soal minyak mengambil bagian yang penting di dalam conferentie antara Belanda dan Japan.

Jika benar begitu, apakah salahnya jika Japan membeli kelebihan minyak dari Indonesia sebab kongsi-kongsi minyak memang hendak menjual minyaknya kepada siapa saja yang suka beli, bukan?

Pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan gampang saja, oleh sebab di kalangan perdagangan dunia minyak, yang penting bukan tentang jual atau membeli minyak saja, akan tetapi penting pula; siapa yang membelikan siapa yang menjual. Juga penting, beberapa minyak yang hendak dibeli atau dijual, oleh karena banyaknya ini berpengaruh pula pada politik dagangan si penjual.

Pendek kata di sekeliling menjual dan. membeli minyak, banyak akibatnya dan banyak rupa warnanya usul yang berhubungan dengan kepentingan masing-masing negeri. Minyak itu bukan saja rupa-rupa jenisnya akan tetapi juga rupa-rupa sifatnya, antara mana sifat politik.

Oleh karena itu bagi kami menjadi, suatu kepastian, bahwa dalam conferentie antara Belanda dan Japan, soal minyak mendapat perhatian yang besar dari kedua pihak.

Masing-masing pihak akan membela dan mempertahankan kepentingannya dengan giat dan sungguh-sungguh, oleh karena besar akibatnya.

Bagaimana kesudahannya, pembicaraan tentang soal minyak tidak bisa kami ramalkan, oleh karena bukan ahli nujum. Sebaliknya kita menunggu saja kesudahannya dan berharap akan dapat persetujuan antara dua pihak.

Kedua pihak sudah tentu hendak melindungi dan mempertahankan haknya dengan sekuatnya".[8])

Pada tahun 1938, Fraksi Nasional di dalam *Volksraad* telah memutuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Tidak sedikit tantangan yang dihadapi karena keputusan ini, misalnya dari anggota *Volksraad* yang bernama Kersten. Alasannya dikemukakan oleh Muhammad Husni Thamrin dengan keputusan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di dalam persidangan *Volksraad,* adalah sebagai berikut:

Tuan Voorzitter! Pada pertama kali fractie kami memakai bahasa Indonesia maka sudah sepantasnya kami mengumumkan pertimbangannya berhubung dengan sikap ini.

Antara beberapa pertimbangan maka kami kemukakan yang penting-penting saja seperti maksud menghargakan bahasa sendiri dengan bahasa Indonesia jangan terdesak dalam pemakaian sehari-hari. Terdesaknya bahasa itu ternyata dari sikap beberapa badan Pemerintah sendiri yang lambat laun memakai bahasa Belanda sedemikian rupa sehingga boleh dibilang kebanyakan pengumuman dikeluarkan dalam bahasa Belanda, maupun pengumuman dari fihak Pemerintah Tinggi sendiri atau bagian-bagiannya. Juga segala peraturan yang termuat dalam ordonnantie, maupun dalam verordening dari Provincie dan Gemeente telah umum ditetapkan dalam bahasa Belanda saja.

Beberapa badan Regentschapsraad pula telah mengikut sikap ini.

Terdapatlah sekarang keadaan yang gaib yaitu peraturan untuk umum dan untuk rakyat yang dalam kebanyakannya tidak mengerti bahasa Belanda, ditetapkan dalam bahasa itu juga.

Akibatnya sikap yang demikian rakyat yang menjadi korbannya oleh karena ia ini tidak mengerti dan tidak bisa membaca peraturan itu.

Lain pertimbangan lagi ada sebagai berikut.

Dalam setiap pergaulan, orang terpelajar yang meme-gang kemudi kemajuan, dan justru putera Indonesia yang terpelajar sedemikian pendidikannya sehingga mereka lebih faham bahasa Belanda daripada bahasa Indonesia sendiri. Keadaan ini sudah tentu membawa perenggangan antara kaum terpelajar dan rakyat jelata oleh karena dua-dua fihak bahasanya dan dasar pikirannya lain, menjadi masing-masing kurang mengerti pula.

Akibatnya lain lagi kaum yang terpelajar itu, tidak suka membaca surat kabar bahasa Indonesia dan sebaliknya mereka ini tidak cukup lengkap persediaannya untuk menjalin pikiran yang baik dari kaum terpelajar dalam bahasa Indonesia. Teranglah sekiranya keadaan itu merugikan masyarakat Indonesia.

(De heer Soeroso: Hal itu asalnya dari koloniale politik). Memuliakan dan memajukan bahasa Belanda dengan mengasingkan bahasa sendiri lambat-laun membawa kerugian yang banyak pula, biarpun pada masa ini belum terlihat. Dalam perdebatan an tara orang Indonesia dan orang Belanda dalam bahasa Belanda sudah lumrahnya pihak Indonesia harus kalah oleh karena mereka ini tidak menguasai bahasa Belanda sedemikian rupa sehingga bisa melebihi orang yang membicara dan mendengar suatu bahasa dari mulai kandungan ibunya.

Lagi pula pihak yang berkuasa tidak merasa keharusan lagi untuk memaksa pegawainya mempelajari bahasa Indonesia supaya mereka mudah berhubung dengan langsung kepada rakyat jelata untuk mengetahui keinginannya.

Oleh karena rakyat Indonesia dengan seumumnya berbahasa Indonesia, maka keadaan yang kami gambarkan tadi menjadi kerugian buat rakyat Indonesia yang berjuta-juta. Inilah sebabnya maka fractie Nasional telah mengambil keputusan tentang soal yang sebenarnya telah lama dikandung. Kongres bahasa Indonesia memudahkan putusan tentang soal yang

terkandung itu, dan kongres itu menguatkan keyakinan kita bahwa dalam hal ini bahasa fractie kami harus mengambil sikap lain pada yang biasa.

Biarpun pemakaian bahasa Indonesia pada masa ini belum sempurna, juga oleh karena banyak perkataan Barat belum ada gantinya dalam bahasa Indonesia, lambat-laun dengan dipakai bahasa ini sehari-hari akan tambah kayanya bahasa kita.

Bukankah bangsa yang hilang bahasanya mudah akan hilang pula kebangsaannya?

Oleh karena itu, sebagai langkah yang pertama fractie kami akan memakai bahasa Indonesia untuk pemandangan umum dan kami berharap teladan kita akan diikut oleh lain-lain fractie dalam setiap badan perwakilan. Masih dalam pertimbangan fractie kami apakah tidak seharusnya kami orang selanjutnya berbicara dalam bahasa Indonesia juga untuk membicarakan lain-lain bagian dari rancangan begrooting negeri.

Sekian, tuan Voorzitter, sebagian dari pertimbangan fractie kami tentang memakai bahasa Indonesia sebagaimana ternyata dari suratnya kepada tuan Voorzitter, oleh karena memakai bahasa Indonesia diperkenankan oleh peraturan Volksraad yang telah dibenarkan oleh Pemerintah. Juga terhadap ucapan tuan Voorzitter kemarin kami hanya sayangkan saja yang tuan telah memakai ucapan "de-monstrasi" terhadap tindakan kami.

Sekarang tuan Voorzitter, saya hendak meladeni tuan Kerstens terhadap keputusan kita untuk berbicara bahasa Indonesia sebagaimana ia telah nyatakan kemarin dalam pidatonya. Pendapatan tuan Kerstens yang tidak bersifat keadilan dan yang tergesa-gesa itu terutama dikeluarkan oleh hawa nafsunya oleh karena perasaannya seolah-olah terganggu sebab putera Indonesia hendak memuliakan bahasanya. Dalam hal ini tuan Kerstens telah memper-samakan perasaannya dengan suara pers putih yang dengan seumumnya telah mengeroyok keputusan Nasionale fractie untuk berbahasa Indonesia. Segala persangkaan dan tuduhan yang keji-keji telah dimajukan dan tidaklah ternyata kehor-matan sedikit juga pun terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintahnya sendiri yang mengizinkan memakai bahasa Indonesia. Hanya oleh karena putusan itu kurang enak dirasakan olehnya saja. Pendapatan tuan Kerstens dan pers putih suatu contoh yang nyata berapa besarnya anggapan mereka

terhadap "haknya" putera Indonesia jika mengganggu sedikit juga pun perasaannya. Lupa mereka "hak" itu yang katanya diakui dalam wetnya; lupa pula kehormatannya terhadap wetnya sendiri sedang kepada orang Indonesia selalu diajarkan untuk menghormati segala aturan wet.

Bagaimana hak yang lain dari putera Indonesia yang tidak begitu tertentu kedudukannya dalam wet Negeri, kita tidak usah sangsikan lagi jika kita melihat pendiriannya tuan Kerstens terhadap hak berbahasa Indonesia yang bunyinya sudah amat tertentu.

Jika kami mempelajarkan ucapannya dan alasannya tuan Kerstens tambah terperanjat kami.

(De heer Soeroso: Tuan Kerstens tertawa, tetapi tidak mengerti!).

Sudah kami asingkan perasaan kami, bahwa tuan Kerstens seolah-olah orang yang "kolok" (verwend), suatu orang yang kebiasaannya boleh saja berbuat apa yang disukai olehnya sendiri dan jika ada tetangga yang memperingatkan kekurangannya ia lantas mencaci dan mengeluarkan tuduhan yang bukan-bukan.

Apakah perkataannya atau lebih justru, apa sangkaannya tuan Kerstens terhadap putusan tuan Kerstens terhadap putusan Nasional fractie? Dengan ringkas saja begini.

Nasionale fractiedengan putusannya berkehendak mengganggu, berkehendak merusak, berkehendak menyusahkan malah katanya boleh jadi hendak menggoda terutama kepada Wali Negeri.

Tuan Voorzitter! Alasan-alasan fractie kami tadi telah majukan dan teranglah untuk orang yang berkepala dingin dan yang mempunyai pertimbangan tenang, bahwa persang-kaan tuan Kerstens jauh dari kebenarannya.

Yang aneh lagi alasannya begini: Kamu nasionalis sekarang berbahasa Indonesia di badan Volksraad sebentar kamu orang minta supaya pengajaran bahasa Belanda diper-luaskan.

Ini benar, akan tetapi apakah maksudnya dengan memajukan alasan yang serupa ini?

Mengharapkan bahasa ada berlainan dengan mencari pelajaran. Tuan Kerstens sedang mempelajarkan juga lain-lain

bahasa, akan tetapi ia sebagai seorang Belanda sudah tentu lebih suka dan lebih senang berbahasa Belanda sebanyak-banyaknya.

Persangkaan Tuan Kerstens seolah-olah putusan kami mengandung maksud untuk menggoda dan mengganggu Wali Negeri sendiri ada satu persangkaan yang sangat mengherankan, oleh karena ucapan ini bersifat mengadukan Wall Negeri terhadap kami orang. Kami percaya yang Wali Negeri cukup bersifat ketenangan untuk menolak pengaduan tuan Kerstens biarpun susunan perkataannya tentang ini ada lemah lembut dan bisa mengenakkan urat yang halus.

(De heer Soeroso: Betul!).

Inilah sikapnya seorang sebagai tuan Kerstens, seorang yang terpelajar, seorang yang terkemuka, seorang yang dalam partijnya berpengaruh dan yang partijnya berpengaruh pula dalam susunan pemerintahan. Seorang yang katanya mempelajarkan keinginan masyarakat Indonesia, malah mempunyai cabang untuk orang-orang Indonesia dari partijnya. Bam saja menemui sesuatu hal yang hanya kurang sedap saja, maka hilanglah timbangannya, hilang pula kecerdasannya. Golongan Katholik Indonesia harus awas siapa yang dibuat kawan dan siapa lawan.

(De heer Soetardjo: Awas!)

De heer Kasimo: Sudah awas betul-betul).

"Alasan" yang penghabisan dari tuan Kerstens oleh karena baru sekarang fractie kami menggunakan bahasa Indonesia dan oleh karena itu ia anggap tindakan kami bersifat politik, bersifat mengganggu enz. enz.

(De heer Jahya: Dia kira momok). Ini hal tohk usah diherankan?

Kami orang baru insyaf sekarang kesalahan kami terhadap bahasa sendiri dan oleh karena itu hendak lantas membenarkan kesalahan dan hendak membantu mening-galkan dan memuliakan bahasa kita.

Kalau tuan Kerstens tidak tergesa-gesa dan lepaskan hawa nafsunya serta menunggu dan membaca alasan-alasan kami yang di permulaan kami telah majukan, maka boleh jadi hawa nafsunya serta menunggu dan membaca alasan-alasan kami yang di permulaan kami telah majukan, maka boleh jadi anggapannya lain. Asal saja ia berkehendak mengerti!

Sekian saja terhadap tuan Kerstens dan kami menung-gu jawabnya pada termijn yang kedua.[9])

Terakhir di bawah ini kami kutipkan wawancara Muhammad Husni Thamrin ketika mengunjungi Sumatera Utara pada tahun 1939. Dari wawancara ini kita dapat melihat pandangannya terhadap pelbagai hal yang menyangkut daerah Sumatera Utara, khususnya Aceh.

"Olehkan tuan ceritakan apa maksud tuan ke Aceh, selain dari orientatiereis itu? Dan apakah indruk tuan tentang Aceh?" demikian pertanyaan Seruan Kita yang pertama tatkala kita dan beberapa wartawan yang lain di Medan mengadakan pertemuan yang dianjurkan oleh Warmusi dengan beliau tuan M.H. Tharnrin, leider Parindra dan plv Voorzitter Volksraad yang terkenal itu.

Ketika itu hari Rabu siang kemarin dulu menjelang ke Vergadering openbaar Parindra. Kita bertemu di rumah tuan Ellias Ketua Parindra. Yang hadir waktu itu ialah tuan-tuan dari dagblad M. Ihoe-tan, Hasanul Arifin, Adinegoro, A. Wahid, Kasoema, Yahya Yakub dan dari majalah-majalah pimpinan majalah ini, tuan-tuan Hamka, M. Yunan Nst, Z.A. Achmad, Urn Kie Chie Ar, A.R. Hadjat tuan-tuan dari Sinar, Medan Islam dan lain-lain. Tuah Thamrin berpengawakan badan yang besar dan tinggi formaat Eropa, sedikit gemuk dibanding dengan tampannya diperkunjungannya kemari 10 tahun dulu, ketika itu duduk dengan muka yang tenang selamanya, dan berhubung dengan pertanyaan kita di atas, beliau menjawab:

Ya, tentu untuk orientasi, untuk peninjauan akan mengetahui apa yang belum pernah dilihat. Saya belum pernah ke Aceh, sebagian dari daerah Indonesia yang belum saya kunjungi!

Indruk saya tentang Aceh, ialah: Negerinya kaya rakyatnya miskin!

Seketika berbicara tentang ini, tuan Thamrin menyatakan pendapatnya, bahasa di Sumatera Utara ini banyak sekali hal-hal yang perlu dibicarakan betul-betul oleh wartawan-wartawan Indonesia.

Menurut pandangan tuan Thamrin soal-soal itu ialah heerendienst, lain daripada heerendienst yang diuntukkan bagi umum ada pula heerendienst untuk zelfbestuurder.

Tatkala kita nyatakan bahwa menurut keterangan pemerintah sendiri soal heerendienst di daerah zelfbestuur istirnewa

untuk zelf-bestuurder tidak berhubung dengan soal heerendienst yang dirnaksud oleh art. 46 1.S., maka Tuan Thamrin menjawab, bahwa bagi beliau:

Hal itu sama saja!

Heerendienst mana juga kita selamanya menuntut penghapusannya.

Soal Conversie.

Yang tuan-tuan harus perhatikan lagi sekarang ialah tentang Conversie, Hendaklah tuan-tuan ikhtiarkan rnernasuki soal itu, hingga dalarn rnengadakan aturan Conversie itu kelak, tidak terganggu hak rakyat.

Seterusnya tentang ondernemers, tuan Thamrin ber-kata:

Adapun tanah-tanah yang diarnbil jadi Concessie oleh ondernerners di Sumatera Timur ini (dimaksud tanah-tanah kebon tembakau red S.K.) adalah enam kali lipat dari tanah yang perlu. Sebabnya ialah karena tanah itu, seperti kebon tembakau, perlu digemukkan. Setelah lima atau enarn tahun pula, baru dapat dipakai kernbali. Itu sebabnya mereka memakai tanah 5 atau 6 kali lebihnya dari seperlunya.

Umpamanya tuan tanah perlu dengan 1000 bau per-kebunan tembakau, maka ia lalu rnengambil Consessie 6 atau 7 bau.

Hal itu sebabnya adalah karena tuan tanah rneng-gemukkan tanahnya menurut tenaga natuur (berpegang kepada iklim).

Padahal sebetulnya tuan tanah bisa menggemukkan tanahnya dengan mest (semacam gemuk).

Kalau mereka pergunakan ini, maka Consessie untuk mereka tidak perlu seluas yang sekarang lagi.

Lebih jauh tentang: Hal ikhwal Aceh (peristiwa Aceh).

Tatkala kita bertanya, apakah tuan Thamrin rasanya sudah bisa menceritakan apa-apa tentang keinginan rakyat di sana buat mengadakan sultanat kernbali?, beliau menjawab: Belum!

Pertanyaan ini rasanya bukan tidak ternpatnya dimajukan kepada beliau. Sebagaimana tuan-tuan maklum soal sultanaat Aceh sudah pernah ditanya-tanyakan di Dewan Rakyat, dan sejumlah besar penduduk di negeri-negeri, seperti Calang, Meulaboh, Tapaktuan, Kutaraja dan lain-lain telah memasukkan

rekest guna itu. (Lebih jauh lihatlah handelingen Volksraad zittingsjaar 1939-1940) masuk bundel verzoekschriften. Jadinya soal ini rnenjadi bicara juga di Volksraad. Lain daripada itu, melihat kedatangan tuan Thamrin dengan sarnbutan yang bagus dari Tuanku Machmud, sungguhpun sama-sama collega, tetapi ke hoofd arnbtenaaran Tuanku Machmud tidak pula boleh dikesarnpingkan. Untuk berkata tegasnya, dengan kepergian tuan Thamrin bersarna-sama dengan Tuanku Machmudke Aceh, telah mengingatkan kita hendak bertanya sikit-sikit tentang soal Sultanaat kepada beliau. Rupanya jawab beliau: Belum!

Akan tetapi berkenaan dengan soal pergerakan, di mana kita menanyakan adakah beliau itu sudah mengira bahasa satu pergerakan politik sebagai Parindra sudah bisa berdiri di Aceh, maka beliau memastikan kemungkinannya. Kata beliau, asalkan ada saja pemimpin yang akan memimpinnya di sana, pergerakan politik sebagai Parindra, dapatlah didirikan di sana!

Menurut ujar tuan Thamrin waktu ini di Sabang sendiri sudah ada anggota Parindra banyaknya 20 orang, maka tidak akan lama lagi tentu terdengar berdirinya cabang pergerakan politik rakyat di ujung pulau Sumatera itu.

Kemudian pertanyaan kita sampai kepada peristiwa hak rakyat di Daerah zelfbesturen.

Tentang soal hak berkumpul dan bersidang, bunyi pernyataan kita demikian:

Barangkali tuan sesuai pendapat dengan redaksi Seruan Kita bahwa hak – hak bersidang dan berkumpul jauh lebih sempit di daerah dan bagi rakyat ini. Zelf besturen daripada rakyat dan di daerah Gouvernment. Sebahagian besar daerah Indonesia terdiri dari daerah zelfbesturen, maka tidaklah tuan kira bahwa kesempatan itu menyebabkan terhalangnya propaganda buat kemajuannya pergerakan rakyat, dan oleh sebab itu tidaklah Volksraad atau anggotanya (terutama fractie nasional) dapat mengikhtiarkan suatu initiatief voorstel, supaya hak-hak berkumpul menurut undang-undang saja yang berlaku di seluruh Indonesia dan tidak ada lagi hak-hak ada? Atau kalau ada disesuaikan saja?

Atas ini tuan Thamrin menjawab:

Saya sependapat dengan redaksi Seruan Kita!

Sememangnya hak itu lebih sempit di daerah Adatgebieden, dan untuk ini kita (Parindra) juga sudah mengadakan aksinya.

Pada kongres Parindra yang akan datang soal ini akan masuk agenda yang terpenting.

Berhubung dengan soal inheemsche Rechtspraak kita bertanya:

Terdengar, bahwa satu antara putusan kongres Parindra yang lalu, ialah mengusahakan perbaikan inheem-sche Rechtspraak (menurut prae advies Mr .Dr. Soepomo). Sampai bagaimana jauhkah tindakan tentang ini dan adakah diusahakan via Volksraad suatu initiatief voorstel. Kalau jalan ini mungkin, mengapa tidak diusahakan dari sekarang? Dan, kalau tidak mungkin, cukuplah suatu putusan dengan main seruan ke seruan saja?

Terhadap soal ini Tuan Thamrin kurang memuaskan kita, sebab itu kita jelaskan lagi:

Bahwa hal itu sudah perlu benar dapat perbaikan, dan kita pastikan bahwa kita tahu betul betapa pengalaman rakyat tentang itu.

Akan tetapi tuan Thamrin nampaknya agak memandang enteng, sebab kata beliau:

Pekerjaan kita di Raad-Raad itu cuma memperde-ngarkan suara-suara kita saja, kalau orang tidak mau dengar, apa kita mau bikin?

Jawab itu juga tidak memuaskan, lalu kita sambung:

Dan cukupkah dengan sekian saja? Tuan Thamrin bertanya pada kita:

Ada jalan lain tuan tau?

Sambil tertawa kita jawab bahwa kita pers bukan tukang cari jalan. Itu menjadi kewajiban leider-leider kita.

Dan bicara dihabisi sampai di sini saja.[10])

DAFTAR CATATAN BAB V

1) H.G.S. Tjokroaminoto, *Sedjarah Pergerakan Indonesia 1929-1930 Pembitjaraan-Pembitjaraan Di Volksraad,* (Djilid 1), Fonds National, Jakarta, 1930, hal. 1-2.

2) Pidato M.H. Thamrin pada tanggal 13 Juli 1934.

3) M.H. Thamrin, Nationale Fractie Volksraad", *Soeara Parindra* Thn. ke IV No. 7-8 Juli-Agustus, 1939, hal. 197-198 dan 198-212.

4) *"Golongan* Indo dan Parindra!", di dalam: *Aliran Baroe,* No.6, Januari, Surabaya, 1939, halaman 6.

5) M.H. Thamrin, "Parindrist, yang ke 10.000 menuju ke 20.000", di dalam *Soeara Parindra,* Thn. ke IV, Nopember, 1939, hal. 311-312.

6) M.H. Thamrin, "Soal hak tanah" di dalam: *Suara Parindra,* 1937, hal. 237.

7) "Pembelaan toean M.H. Thamrin, di dalam: *Soeara Parindra.* 1937 halaman 126-133.

8) M.H. Thamrin, "Minyak", di dalam: *Soeara Parindra.* No. 11 , Nopember 1940, halaman 172-1 77.

9) *Pidato Toean M.B. Thamrin dalam sidang Volksraad tanggal* 12 *Juli* 1938. *halo* 2-5.

10) "Beberapa masalah yang Pelik-Pelik di Indonesia", di dalam *Seroean Kita,* 8 Desember, 1939, hal. 445-446.

BAB VI PENUTUP

Pada bab-bab terdahulu kita telah mengikuti berbagai hal tentang Muhammad Husni Thamrin dari tingkah-lakunya ketika dia masih kecil/remaja sampai kepada kegiatan-kegiatannya sebagai seorang politikus, pemimpin pergerakan nasional, demikian pula kutipan-kutipan dari beberapa pendapatnya tentang pelbagai persoalan.

Jika kita memperhatikan secara seksama, maka nampak kepada kita bahwa kedudukan Muhammad Husni Thamrin di dalam Pergerakan Nasional Indonesia adalah cukup unik. Dia adalah seorang pemimpin koperator sepanjang karier politiknya, artinya ia bersedia bekerja di dalam institusi-institusi pemerintahan penjajah Belanda, dan menggunakan kedudukan yang diperolehnya di dalam institusi-institusi sebagai "alat perjuangannya". Hal semacam ini nampak dengan jelas jika mengikuti pandangan-pandangan yang dikemukakannya di dalam sidang-sidang *Volksraad* sejak ia menjadi anggota di dalam lembaga tersebut.

Sikap politiknya telah melahirkan rasa segan baik dari lawan-lawannya maupun dari kawan-kawannya, demikian pula baik dari pemerintah penjajahan Belanda maupun dari kaum pergerakan yang non-koperator. Saling menghargai di kalangan kaum pergerakan, antara golongan koperator dengan golongan non-koperator, nampak juga ketika itu. Untuk memperoleh gambaran tentang sikap saling menghargai itu, di bawah ini kami kutipkan keterangan dari Mr. Ali Sastroamijoyo[1]), sebagai berikut.

"Setelah menunggu kurang lebih setengah jam di muka penjara Sukamiskin, akhirnya tibalah waktunya Bung Kamo keluar dari pintu gerbang penjara. Dengan spontan beliau disambut dengan sorak gembira oleh para penjemput yang dengan serentak berlari-lari mendekati untuk berjabatan tangan dengan beliau.

Lalu dengan segera Bung Karno masuk di mobil Thamrin dan berangkatlah iring-iringan mobil-mobil penjemput itu menuju ke Bandung. Tetapi dekat di kota tiba-tiba iring-iringan kendaraan itu dihentikan oleh sepasukan polisi yang dipimpin sendiri oleh Komisaris polisi Belanda yang terkenal sekali di kalangan kaum pergerakan di Bandung karena bengisnya terhadap P.N.I. Namanya Albrechts. Segera pegawai polisi Belanda ini mendekati mobil taxi dengan bendera Partindo itu dan tanpa menegur sopir atau penumpangnya merobek bendera itu sampai rusak sama sekali. Rupanya perbuatan Albrechts itu dilihat pula oleh Thamrin, karena dengan segera ia turun dari mobilnya dan menegur polisi Belanda itu, dengan perkataan-perkataan agak keras:

"Tuan tidak berhak merusak bendera itu" kata Thamrin, "karena itu milik orang lain! Tetapi Albrechts menjawab bahwa memasang bendera di atas taxi itu berarti "demonstrasi" dan itu adalah dilarang. "Baiklah", sahut Thamrin, "perbuatan tuan, yang sewenang-wenang ini tentulah akan saya bawa ke Volk-sraad, supaya pemerintah mempertanggung-jawabkannya!"

Muhammad Husni Thamrin bukanlah anggota PNI atau Partindo, akan tetapi sebagai seorang pemimpin pergerakan la menghargai rekan-rekannya, juga yang berasal dari Partindo, karena itu ia memprotes tindakan komisaris polisi Belanda yang terlalu sewenang-wenang dengan merusak bendera Partindo tersebut.

Demikianlah, pada tanggal 11 Januari 1941 Muhammad Husni Thamrin telah wafat, setelah sakit beberapa waktu lamanya. Akan tetapi beberapa saat sebelum beliau wafat, pemerintah kolonial telah melakukan tindakan "sangat kasar" terhadap dirinya. Dalam keadaan sakit, ia harus menghadapi perlakuan kasar itu, yaitu rumahnya 'digeledah oleh polisi-polisi rahasia Belanda (PID). la memprotesnya, akan tetapi tidak diindahkan. Sejak itu rumahnya dijaga ketat oleh PID dan tak seorangpun dari rumahnya yang diperbolehkan meninggalkan rumah tanpa seizin polisi, juga

termasuk anak perem-puannya yang masih anak-anak. Deece, demikian nama anaknya, juga tidak diperkenankan meninggalkan rumahnya, sekalipun untuk pergi ke sekolah.

Tindakan polisi Belanda itu tentulah sangat menekan perasaannya, dan menambah parah sakitnya.

Wafatnya Muhammad Husni Thamrin tentulah sangat besar artinya bagi bangsa Indonesia waktu itu, dalam arti kata bahwa bangsa Indonesia telah kehilangan salah seorang pemimpinnya yang cerdas, dan berwibawa.

Karena itu dapat dimengerti jika berita wafatnya itu sangat mengagetkan para pemimpin pergerakan, baik yang se-aliran dengannya maupun yang tidak sehaluan dengannya. Hal ini terbukti dari ucapan belasungkawa yang diterima oleh istri dan keluarganya.

Akan tetapi walaupun ia telah wafat, jasa-jasanya tetap akan dikenang oleh bangsa Indonesia, sekarang dan yang akan datang.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. DAFTAR BUKU

Abdurrahman Surjomihardjo, *Pembinaan Bangsa Dan Masalah Historiografi Kumpulan Esei Dan Artikel,* Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LEKNAS-LIPI), Jakarta 1978.

Adam Malik, *Mengandi Republik,* Jilid I, Gunung Agung, Jakarta, 1978.

Ali Sastroamidjojo, *Tonggak-Tonggak Di Perjalananku,* PT Kinta, Jakarta, 1974.

Bernard H.M. Vlekke, *Nusantara (Sejarah Indonesia),* Dewan Bahasa Dan Pustaka Kementrian Pelajaran Malaysia, Kuala Lumpur, 1967.

HOS. Tjokroaminoto, *Sejarah Pergerakan Indonesia 1929-1930,* Jilid I, Fonds Nasional, Jakarta, 1930.

I Nyoman Dekker, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia,*Lembaga Penerbitan Almamater YPTP-IKIP Malang, Malang, 1975.

Koch D.M.G., *Menuju Kemerdekaan Sejarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia Sampai* 1942, Terjemahan Abdul Muis, Yayasan Pembangunan Jakarta, 1951.

Matu Mona, *Riwayat Penghidupan Dan Perjuangan Mohammad Husni Thamrin,* Pustaka Timur, Medan, 1950.

Mohammad Hatta, *Indonesia Merdeka,* Terjemahan Drs.Hazil, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.

Panikar K.M., *Asia And Western Dominance,* George Allen & Unwin LTD, London, 1959.

Pipit Seputro, *Beberapa Aspek Dari Sejarah Indonesia,* Nusa Indah, Ende-Flores, 1973.

Pringgodigdo A.K., *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia,* Dian Rakyat, Jakarta 19.

Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Nasional Indonesia,* Jilid V, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1976.

Sukamto S.A., *Matahari Jakarta Lukisan Kehidupan* M. *Husni Thamrin,* Pustaka Jaya, Jakarta, 1974.

Sukanto Sastrodihardjo, *Indonesia Raya Ialah Indonesia Berparlemen, Pembela Rakyat,* Nomor 41 – 42, Tahun ke 1, Februari, 1940.

van der Wall S.L., *Pendidikan Di Indonesia 1900 – 1940, Kebijaksanaan Pendidikan Di Hindia Belanda 1900 – 1940,* Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1970.

B. MAJALAH / SURAT KABAR

Aliran Baru, Nomor 6, Januari, Surabaya, 1936.

Harian Pemandangan, Tahun ke I, Nomor 17, 29 Juli, Jakarta, 1933.

Pembela Rakyat, Nomor 41 – 42, Tahun ke I, Februari, Jakarta, 1940.

————, Nomor 43 – 44 , Tahun ke I, 6 Maret, Jakarta, 1940. *Pidato Moh. Husni Thamrin,* pada 13 Juli 1934.

Seroean Kita, 8 Desember, Jakarta, 1939.

Soara Oemoem, Extra-Blad, Sabtu 28 Desember, Jakarta, 1935.

Soeara Parindra, Tahun ke II, Mei – Juni, 1937.

————, Tahun ke II, September, 1937.

————, Nomor 7 – 8 , Tahun ke IV, Juli – Agustus, 1939.

————, Tahun ke IV, November, 1939.

————, Nomor 9 – 10 – 11 , Tahun ke V, September –ktober, 1940.

————, Soeara PSII. Nomor 9, Tahun ke II, Desember, Jakarta, 1938.

————, Nomor 2, Tahun ke III, Mei, 1939.

DAFTAR CATATAN BAB VI

1) Ali Sastroamidjojo, *Tonggak-Tonggak di Perjalananku.* P.T. Kinta, Jakarta, 1974, hal. 109.



M. H. Thamrin



M. H. Thamrin



M. H. Thamrin



M. H. Thamrin dan istri, beberapa hari setelah perkawinannya



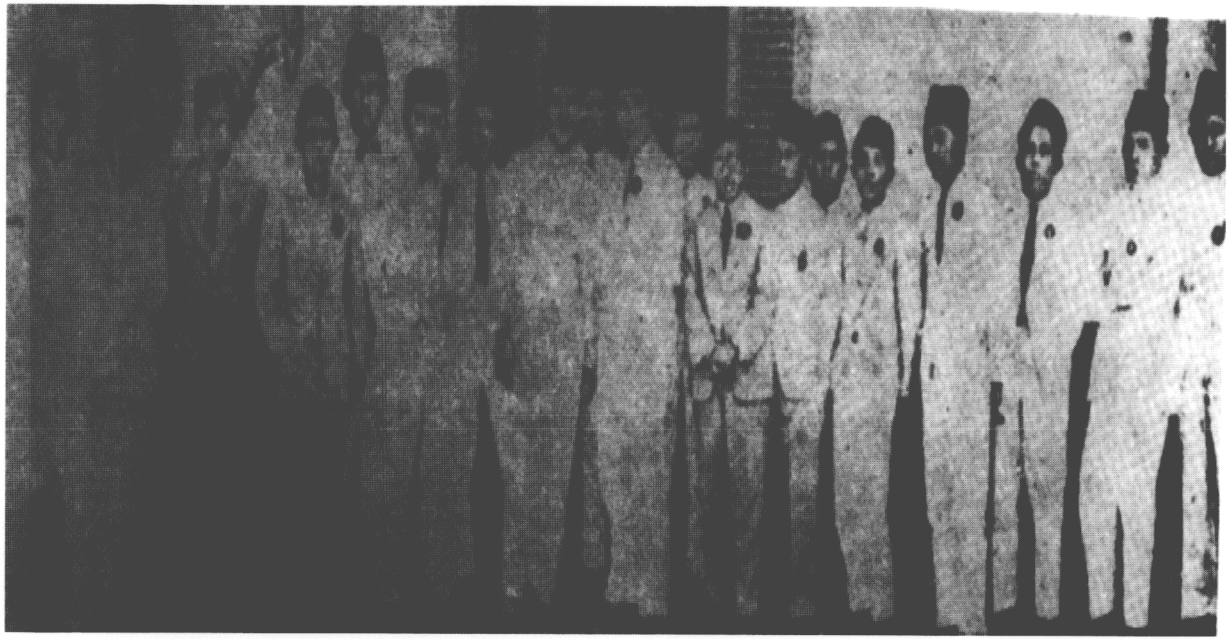
Sekembalinya dari Penjara Sukamiskin, Ir. Soekarno mengadakan pertemuan dengan kawan-kawan seperjuangan antara lain M.H. Thamrin (sebelah kanan Ir. Soekarno duduk)



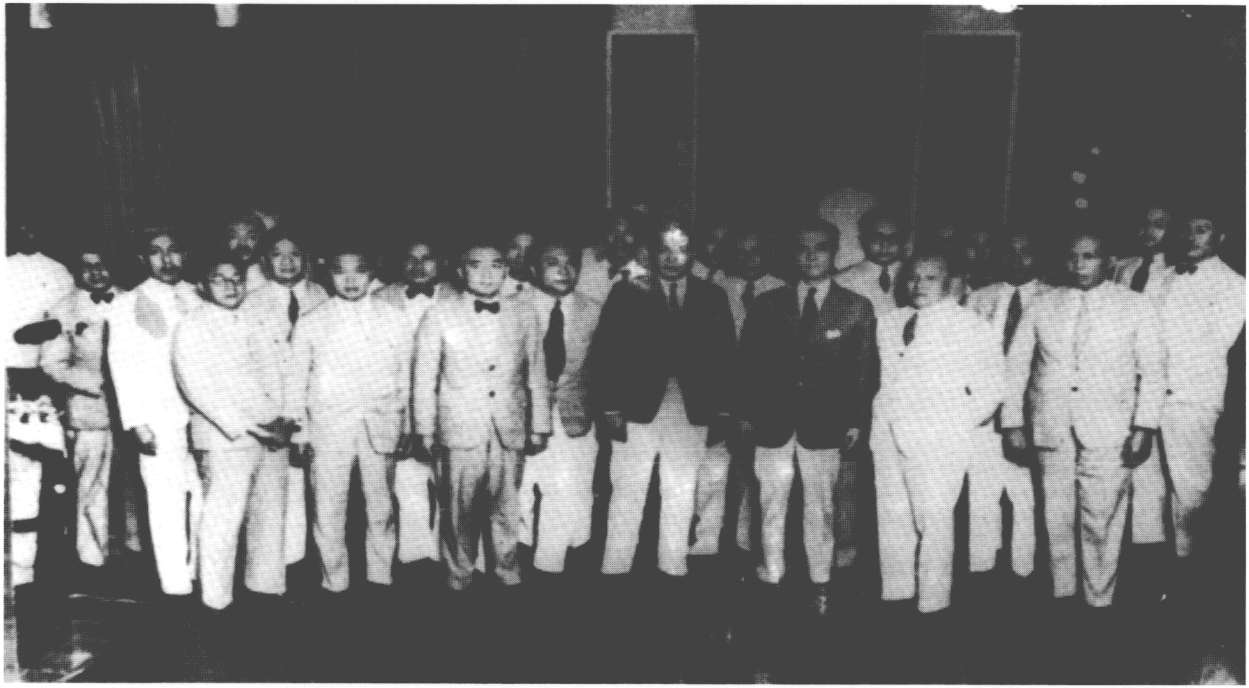
M. Thamrin kedua dari kanan dalam pertemuan dengan Walikota dan Wakil Walikota Batavia



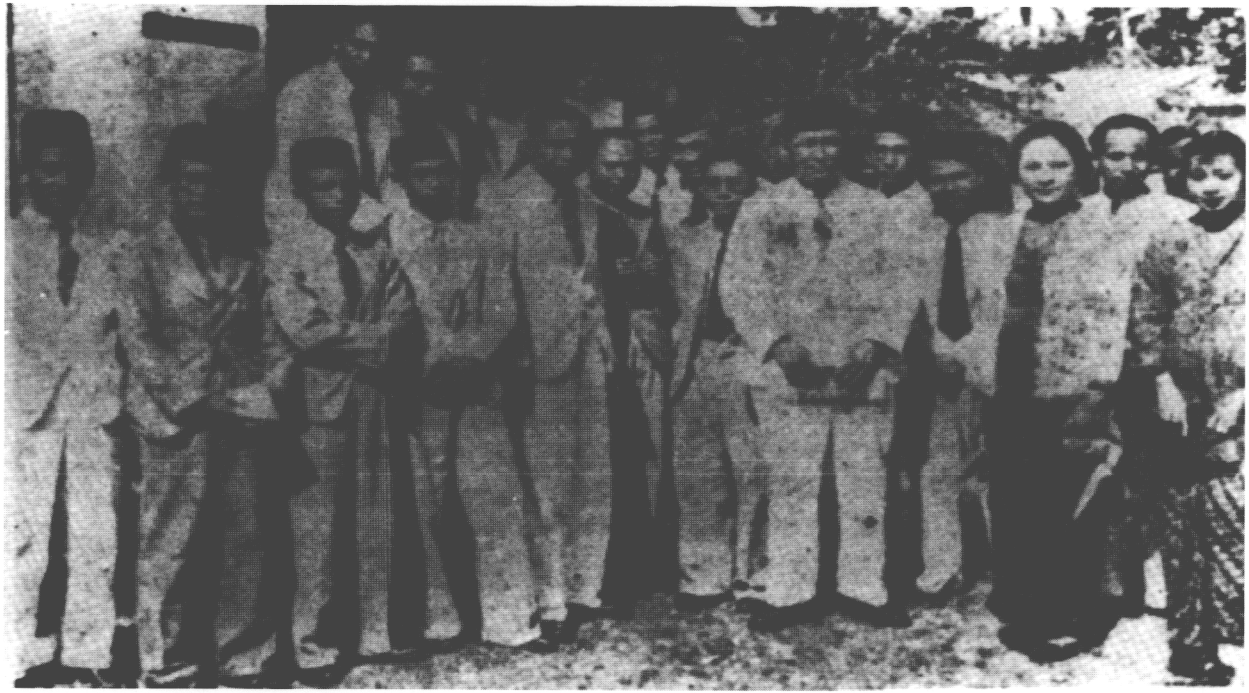
M. Thamrin (duduk ketiga dari kiri bergambar bersama wartawan ketika berkunjung ke Padang



Gambar bersama. Tampak antara lain M. Husni Thamrin dan istri, Zainal Abidin Ahmad, Abdul Wahid Rata, Adinegoro, Moh. Said, A.R. Rasjad, M. Junan Nasution, Hasbullah Parinduri, Mangaraja Ihutan, Hamka.



M. H. Thamrin jas hitam dan Dr. Sam Ratulangi menyambut Presiden Filipina, Manuel L. Queson dan rombongan



Gambar bersama pada Kongres II Partai Nasional Indonesia PNI tahun. Ditengah Tampak Ir. Soekarno dan M.H. Thamrin.



DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA

ISBN 978-979-8250-24-8